

711
will
a

**KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN
IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota**

Oleh

**LALE HARTIKA WULAN
LD4002035**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN
IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :


**LALE HARTIKA WULAN
LD4002035**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 31 Mei 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Mei 2004

Pembimbing Pendamping



Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

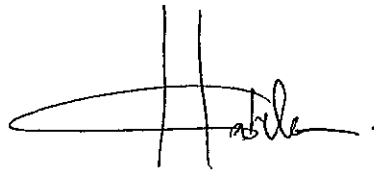


Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

**Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini
tidak terdapat karya yang pernah diajukan
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,
kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini
dan disebutkan dalam Daftar Pustaka**

Semarang, Mei 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lale Hartika Wulan', with a long horizontal flourish extending to the left.

**Lale Hartika Wulan
NIM L4D 002035**

ABSTRAK

Peningkatan status daerah otonom kota bagi Mataram yang juga berperan sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat menyebabkan munculnya dualisme penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah Mataram. Secara aturan perundangan, dualisme ini tidak diperbolehkan karena menciptakan kurang kondusifnya perkembangan pada salah satu daerah otonom. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian dilakukan pemindahan ibukota Kabupaten Lombok Barat ke kota Gerung sebagai kawasan yang memenuhi syarat. Implikasi yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan ibukota ini adalah pertama terhadap struktur kegiatan ekonomi dan keruangan internal Gerung dan kedua terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Kedua implikasi ini ada kaitannya dengan kondisi sosio-geografis Kabupaten Lombok Barat yang secara faktual terbagi dalam dua bagian kawasan yang berbeda, yaitu kawasan bagian utara dan kawasan bagian selatan. Pemindahan ibukota ke Gerung yang berada di kawasan bagian selatan tentunya berdampak secara struktural terhadap kawasan bagian utara. Melihat dari kenyataan ini maka permasalahannya adalah pada beban dan manfaat pemindahan ibukota, khususnya peran Gerung dalam memberikan pelayanan publik terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian pertanyaan penelitian yang mengemuka adalah bagaimana struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota dan pemekaran kecamatan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan serangkaian tahapan studi dengan menggunakan metode deskriptif eksplanatori. Tahapan studi dibagi dalam tiga kajian besar, pertama adalah mengkaji kedudukan Gerung sebagai ibukota kabupaten dengan menggunakan analisis location quotient, analisis shift share, analisis perkembangan keruangan untuk memperoleh gambaran struktur kegiatan ekonomi dan arah perkembangan ruang. Kedua, mengkaji struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall, analisis gravitasi, analisis titik henti, analisis kependudukan, analisis location quotient, dan analisis shift share untuk memperoleh gambaran perkembangan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota. Kedua kajian ini kemudian dijadikan masukan pendukung bagi kajian ketiga yang menggunakan analisis Proses Hierarki Analitik untuk memperoleh gambaran alternatif dampak (manfaat-beban) pemindahan ibukota.

Secara keseluruhan hasil kajian memperlihatkan hasil bahwa alternatif terpilih dampak pemindahan ibukota adalah pada penataan wilayah. Pilihan pada penataan wilayah berarti perlunya diciptakan efisiensi internal yang memperkuat integrasi wilayah. Perbaikan struktur internal melalui penataan wilayah ini dilakukan dengan dua alternatif: (1) memperbaiki area tumbuh baru yang lepas dari pusat pertumbuhan utama, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat; (2) pengembangan sistem koridor, yaitu pertumbuhan di sepanjang alur jaringan jalan utama yang keluar secara radial dari pusat-pusat kota. Dengan demikian arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok untuk mendukung penataan wilayah ini adalah pemantapan kota-kota kedua. Kota Gerung sebagai hierarki I di bagian selatan, dan hierarki II adalah Kecamatan Tanjung untuk bagian utara, dan Kecamatan Narmada untuk bagian tengah. Kota Tanjung dan Narmada diharapkan dapat berperan setara dengan ibukota kabupaten melalui pengembangan fasilitas wilayah yang dimiliki sehingga mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat.

ABSTRACT

Status upgrading for Mataram city into city autonomic region, which also plays a role as the capital city of West Lombok Regency caused a dualism in conducting the governmental system in Mataram area. According to the law, this dualism is prohibited, because it will create less conduciveness of the development in one of the autonomy region. In relation to that, finally it has been decided that the capital city of West Lombok Regency is moved to Gerung, one of the region that has already fulfilled all the requirements. Implications made because of this action are first, to the structure of economic activity and Gerung's internal spacing and the second is the zoning structure of West Lombok Regency. These two implications are related to socio-geographical condition of West Lombok Regency, which factually is divided into two different areas, the northern part and the southern part. Moving the capital city to Gerung, which is in the southern part, will structurally has an impact to the northern part. Based on this reality, so the problems are the burdens and also the benefits from moving capital city, especially the role of Gerung in giving public services to the zoning structure of West Lombok Regency. So the question in this research is how the zoning structure of West Lombok Regency going to be in the future because of the capital city movement and district fragmentation.

To answer this question, we have done a series of stages of research by using descriptive explanatory method. These stages of research are divided into three macro studies, the first is to study the position of Gerung as the new regency's capital city by using the Location Quotient (LQ) Analysis, Shift and Share Analysis, Zoning Development Analysis to have some views of the structure in economic activity and zone development. The second is to study the zoning structure of West Lombok Regency by using Scallo-gram Analysis and Marshall-central Index, Gravity Analysis, Stop-point Analysis, Demographical Analysis, Location Quotient (LQ) Analysis and Shift and Share Analysis to have some views about the zoning structure development of West Lombok Regency because of the moving. These two studies then become a supporting inputs for the third study which uses Analytical Hierarchy Process to have the view about the alternative impacts (benefits-burdens) of this moving. Throroughly, the results of the study show that the chosen alternative on the impacts of moving the capital city is on the area restructuring. By choosing this, means that we need to create an internal efficiency, which will stengthen the integration in the area. The improvement of internal structure through area restructuring is done by two alternatives : (1) improving a new growth area which is free from the center of growth, but still using the concentric pattern of central city; (2) developing the corridor system, means growth along the main street network which comes out radially from city centers. For that reason the directive of zoning structure in Lombok Regency to support this area restructuring is to stabilize second cities. Gerung as the first hierarchy in the southern part and the second hierarchy is Tanjung District for the northern part, and Narmada District for the central part. Expectedly, Tanjung and Narmada can have the some role with the regency's capital city through the development of area facilities that they have so that they will be able to anticipate all the characteristic differences in the area of West Lombok Regency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya maka tesis yang berjudul "*Kajian Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebagai Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten dan Pemekaran Kecamatan*" dapat penulis selesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dan selaku Pembimbing Utama
2. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP, selaku Pembimbing Pendamping yang telah dengan sabar memberi pengarahan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya tulisan ini;
3. Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP, selaku Pembahas atas masukan-masukan berharga yang diberikan dalam pembahasan tesis demi kesempurnaan tesis ini;
4. Bapak Ir. Bambang Setioko, M.Eng., selaku Penguji, yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini;
5. Rektor Universitas 45 Mataram dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas 45 Mataram atas kesempatan izin belajar pascasarjana pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro, serta staf tata usaha atas dukungan administratifnya;
6. Seluruh staf pengajar Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah membentuk dasar-dasar pemikiran dalam ilmu perencanaan pembangunan kota;
7. Segenap Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Instansi Vertikal di Kabupaten Lombok Barat; anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat; serta dunia usaha di Kabupaten Lombok Barat atas kerja samanya menjadi narasumber studi ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro atas bantuannya yang tulus dalam proses pengerjaan tesis ini; atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
9. Para staf dan karyawan Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Akhirnya pada orang-orang terdekat penulis, suami dan anak-anak, kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan pengertian mendalam, serta selalu memberikan bantuan dan dorongan dengan tulus tiada henti. Juga pada segenap sanak famili di Lombok atas dorongan semangat untuk menyelesaikan kuliah;

11. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tak mungkin disebutkan satu per satu tetapi keberadaannya terasa sangat membantu proses pematangan diri penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan studi lanjutan dari tesis ini merupakan hal yang sangat diharapkan guna memperoleh hasil yang lebih baik di kemudian hari.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan topik tesis ini.

Semarang, Mei 2004
Penulis,

Lale Hartika Wulan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi.....	13
1.3.1. Tujuan Studi.....	13
1.3.2. Sasaran Studi.....	13
1.4. Ruang Lingkup Studi.....	14
1.4.1. Ruang Lingkup Materi.....	14
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah.....	16
1.5. Kerangka Pemikiran.....	17
1.6. Pendekatan Penelitian.....	21
1.6.1. Tahapan Studi.....	21
1.6.2. Kerangka Analisis.....	23
1.6.3. Metode Penelitian.....	24
1.6.3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6.3.2. Narasumber.....	25
1.6.3.3. Analisis Data Penelitian dan Teknik Analisis.....	26
1.7. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB II. STRUKTUR PERWILAYAHAN DALAM	42
KONTEKS PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN	
KECAMATAN.....	
2.1. Struktur Keruangan Kota.....	42
2.1.1. Pengertian Kota.....	44
2.1.2. Aspek-aspek Kota.....	46

2.2.	Pertumbuhan dan Perkembangan Kota.....	47
2.2.1.	Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Kota.....	49
2.2.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan dan Perkembangan Kota.....	50
2.3.	Pengembangan Kota sebagai Ibukota pada Wilayah Baru.....	51
2.3.1.	Pengertian Ibukota Kabupaten.....	52
2.3.2.	Kedudukan Ibukota Kabupaten.....	53
2.3.3.	Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten.....	55
2.3.4.	Dampak Keberadaan Pusat Pertumbuhan Baru terhadap Perkembangan Struktur Ruang Kota.....	57
2.3.5.	Manfaat dan Beban Pusat Pertumbuhan Baru	58
2.3.5.1.	Kriteria Manfaat Dalam Perkembangan Kota	62
2.3.5.2.	Kriteria Beban Dalam Perkembangan Kota...	63
2.4.	Kesimpulan Kajian Pustaka.....	64
BAB III	KAJIAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN KECAMATAN.....	68
3.1.	Kajian Umum Wilayah Kabupaten Lombok Barat.....	68
3.1.1.	Kondisi Geofisik.....	68
3.1.1.1.	Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	68
3.1.1.2.	Kondisi Tofografi.....	70
3.1.1.3.	Administrasi Wilayah.....	72
3.1.2.	Kondisi Demografi.....	73
3.1.3.	Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang	74
3.1.4.	Kedudukan Perekonomian	75
3.1.5.	Kondisi Lingkungan Binaan.....	77
3.1.6.	Kondisi Penyediaan Fasilitas Wilayah.....	78
3.1.6.1.	Pendidikan.....	78
3.1.6.2.	Kesehatan.....	79
3.1.6.3.	Peribadatan.....	80
3.1.6.4.	Perdagangan dan Industri.....	81
3.1.6.5.	Pos dan Telekomunikasi.....	82
3.1.6.6.	Hotel dan Pariwisata.....	83
3.1.7.	Kondisi Sosial-Budaya.....	83
3.3.	Kondisi Umum Wilayah Gerung sebagai Ibukota Baru.....	83
3.2.	Gambaran Umum Mataram sebagai Ibukota Lama.....	88
BAB IV.	ANALISIS STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN.....	92
4.1.	Analisis Perkembangan Struktur Perwilayahan Lombok Barat.....	92

4.1.1.	Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat sebelum Pemindahan Ibukota.....	92
4.1.1.1.	Kemampuan Pelayanan.....	92
4.1.1.2.	Interaksi Keruangan.....	94
4.1.1.3.	Sistem Transportasi.....	97
4.1.1.4.	Perkembangan Penduduk.....	99
4.1.1.5.	Struktur dan Perkembangan Sektor Ekonomi.....	100
4.1.1.6.	Kedudukan Kota Mataram terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.....	101
4.1.2.	Kajian Struktur Perwilayahan Kabuapten Lombok Barat sebagai Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	104
4.1.2.1.	Kemampuan Pelayanan.....	104
4.1.2.2.	Interaksi Keruangan.....	107
4.1.2.3.	Sistem Transportasi.....	112
4.2.	Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.....	113
4.2.1.	Perkembangan Penduduk.....	119
4.2.2.	Struktur dan Perkembangan Sektor Ekonomi.....	120
4.3.	Dampak Keberadaan Kota Gerung terhadap Perkembangan Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat	125
4.4.	Analisis Manfaat dan Beban pemindahan Ibukota Kabupaten.....	131
4.4.1.	Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota.....	131
4.4.1.1.	Hasil Penilaian Manfaat dan Beban Pemindahan Kabupaten.....	131
4.4.1.2.	Hasil Penilaian Manfaat dan Beban dari setiap Bidang Penelitian.....	133
4.4.1.3.	Hasil Penilaian Manfaat dan Beban pada Tingkat Kebijakan.....	136
4.4.2.	Perbandingan Alternatif Terpilih dengan Kondisi Eksisting.....	144
4.4.3.	Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat dengan Alternatif Terpilih (PHA).....	146
BAB V.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	153
5.1.	Kesimpulan.....	153
5.2.	Rekomendasi.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....		160
LAMPIRAN HASIL ANALISIS.....		166

DAFTAR TABEL

TABEL I.1. : Pola Pemindahan Ibukopta Kabupaten.....	3
TABEL I.2. : Kebutuhan Data, Kajian Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebagai Akibat Pemindahan Ibukota..	24
TABEL I.3. : Skalogram Fungsi Pemukiman.....	27
TABEL I.4. : Perhitungan Bobot Fungsi.....	28
TABEL II.1. : Aspek, Variabel Dan Kreteria Penelitian Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten	66
TABEL III.1.: Luas Kabupaten Lombok Barat Dirinci Per Kecamatan Tahun 1995 s/d 2000-2001.....	69
TABEL III.2.: Peningkat Ketinggian Tanah (Meter) Dari Permukaan Air Laut Kabupaten Lombok Barat Dirinci Per Kecamatan Tahun 1995 s/d 2000-2001.....	71
TABEL III.3.: Jumlah Desa Dan Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 1995 s/d 2000-2001.....	72
TABEL III.4.: Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Tahun 1995, 1997, 2000 Dan 2001.....	73
TABEL III.5.: Luas Lahan Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Penggunaan Tanah (Ha) Tahun 1995 s/d 2000- 2001.....	74
TABEL III.6.: Produk Domestik Regionalmenurut Lapangan Kerja Atas Dasar Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 1999-2001.....	75
TABEL III.7.: PDRB Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Berdasarkan Atas Harga Konstan 1995-2001 (Jutaan Rp).....	76
TABEL III.8.: Panjang Jalan Di Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Status Tahun 2000 Dan 2001 (Km).....	77
TABEL III.9. : Jumlah Sarana Pendidikan (SD, SLTP, SLTA) Per Kecamatan Tahun 2001.....	78
TABEL III.10: Banyaknya Sarana Prasarana Peribadatan Dirinci Per Kecamatan Tahun 2001.....	80
TABEL III.11. : Banyaknya Pasar Di Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Jenisnya Tahun 2000 Dan 2001.....	81
TABEL III.12. : Banyaknya Perusahaan Dagang/Pasar (Tdup Dan Siup) Diterbitkan Di Kabupaten Lombok Barat Dirinci Per Kecamatan Tahun 2001.....	82
TABEL III.13. : Kepadatan Penduduk Kota Gerung Dirinci Per Desa Tahun 2001.....	84

TABEL III.14. : Penduduk Kota Gerung Menurut Mata Pencapaian Tahun 2001.....	85
TABEL IV.1. : Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota.....	93
TABEL IV.2. : Matrik Interaksi Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota Kabuapten.....	95
TABEL IV.3. : Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Tahun 1995, 1997 Dan 2000.....	99
TABEL IV.4. : Lq Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Sebelum Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	100
TABEL IV.5. : Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	105
TABEL IV.6. : Matrik Interaksi Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat Akibat Pemindahan Ibukota Kabuapten.....	108
TABEL IV.7. : Pemekaran Kecamatan Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten	114
TABEL IV.8. : Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Tahun 1995, 1997 Dan 2000.....	119
TABEL IV.9. : PDRB Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Berdasarkan Atas Dasar Konstan Tahun 1995-2001 (Jutaan Rp).....	121
TABEL IV 10. : Lq Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan Akiabat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	122
TABEL IV 11 : Manfaat Dan Beban Setiap Alternatif Pemindahan Ibukota	131
TABEL IV.12 : Manfaat Dan Beban Setiap Bidang Penelitian Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	133
TABEL IV.13 : Alternatif Manfaat Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	136
TABEL IV.14 : Alternatif Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	140
TABEL IV.15 : Kreteria Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	145

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	: Peta Orientasi Propensi Nusa Tenggara Barat	10
GAMBAR 1.2.	: Peta Orientasi Kabupaten Lombok Barat Dan Kota Mataram.....	11
GAMBAR 1.3.	: Kerangka Berpikir Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	20
GAMBAR 1.4.	: Kerangka Analisis Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	23
GAMBAR 1.5.	: Hierarki Manfaat Keberadaan Ibukota Gerung.....	35
GAMBAR 1.6.	: Hierarki Beban Keberadaan Ibukota Gerung.....	40
GAMBAR 2.1.	: Bentuk-Bentuk Kota.....	45
GAMBAR 2.2.	: Hierarki Persebaran Kota Ke desa dan Jaringan Ketergantungan desa-Kota.....	48
GAMBAR 2.3.	: Perkembangan Kota Dengan Kutub Pertumbuhan.....	57
GAMBAR 2.4.	: Kerangka Penentuan Kriteria Penelitian Manfaat Dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten Terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.....	67
GAMBAR 3. 1	: Orientasi Kota Gerung Sebagai Ibukota Baru.....	87
GAMBAR 3.2.	: Orientasi Kota Mataram Sebagai Ibukota Lama.....	91
GAMBAR 4.1.	: Sistem Perkotaan Kota Mataram.....	98
GAMBAR 4.2.	: Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	103
GAMBAR 4.3.	: Wilayah Pemekaran Kecamatan.....	118
GAMBAR 4.4.	: Struktur Perwilayahan Kota Gerung akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	129
GAMBAR 4.5.	: Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	130
GAMBAR 4.6	: Kerangka Arah Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Akibat Pemindahan Ibukota dengan Pilihan Alternatif (PHA).....	151
GAMBAR 4.7	: Arah Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. : Hasil Analisis Skallogram.....	167
Tabel A.1. : Penyekalaan Hierarki Di Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	167
Tabel A.2. : Penyekalaan Hierarki Di Kabupaten Lombok Barat Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	168
Tabel A.3. : Hasil Analisis Skallogram Kabupaten Lombok Barat.....	169
Tabel A.4. : Hasil Analisis Skallogram Kabupaten Lombok Barat.....	169
LAMPIRAN B : Hasil Analisis Indeks Sentralitas Marshal.....	170
Tabel B.1. : Penyekalaan Hierarki Di Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	170
Tabel B.2. : Nilai Sentralitas Fasilitas Per Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat.....	171
Tabel B.3 : Penyekalaan Hierarki Di Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	171
Tabel B.4. : Hasil Indeks Sentralitas Marshall Per Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat.....	173
Tabel B.5 : Penyekalaan Hierarki Di Kabupaten Lombok Barat Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	173
Tabel B.6. : Nilai Sentralitas Fasilitas Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat.....	175
Tabel B.7 : Penyekalaan Hierarki Di Kabupaten Lombok Barat Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten.....	176
Tabel B.8. : Hasil Indeks Sentralitas Marshall Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat.....	178
LAMPIRAN C : Hasil Analisis Gravitasi.....	179
Tabel C.1. : Interaksi Antar Kecamatan Sebelum Pemindahan Ibukota Di Kabupaten Lombok Barat.....	180
Tabel C.2. : Interaksi Antar Kecamatan Akibat Pemindahan Ibukota Di Kabupaten Lombok Barat.....	180
LAMPIRAN D : ANALISIS TITIK HENTI.....	184
Tabel D.1.: Jarak Titik Henti Antar Kecamatan Sebelum Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	184
Tabel D.1.: Jarak Titik Henti Antar Kecamatan Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	186

LAMPIRAN E : Hasil Analisis LQ.....	190
Tabel E.1. : Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	190
Tabel E.2. : Perhitungan LQ Kota Mataram.....	190
Tabel E.3. : Hasil Analisis Perhitungan LQ Kota Mataram.....	191
Tabel E.4. : Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	191
Tabel E.5. : Perhitungan LQ Kecamatan Bayan.....	191
Tabel E.6. : Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Bayan.....	192
Tabel E.7. : Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	192
Tabel E.8. : Perhitungan LQ Kecamatan Kayangan.....	192
Tabel E.9. : Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Kayangan.....	193
Tabel E.10.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	193
Tabel E.11.: Perhitungan LQ Kecamatan Gangga.....	193
Tabel E.12.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Gangga.....	194
Tabel E.13.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	194
Tabel E.14.: Perhitungan LQ Kecamatan Tanjung.....	194
Tabel E.15.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Tanjung.....	195
Tabel E.16.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	195
Tabel E.17.: Perhitungan LQ Kecamatan Pemenang.....	195
Tabel E.18.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Pemenang.....	196
Tabel E.19.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	196
Tabel E.20.: Perhitungan LQ Kecamatan Batulayar.....	196
Tabel E.21.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Batulayar.....	197
Tabel E.22.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	197
Tabel E.23.: Perhitungan LQ Kecamatan Gunungsari.....	197
Tabel E.24.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Gunungsari.....	198
Tabel E.25.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	198
Tabel E.26.: Perhitungan LQ Kecamatan Lingsar.....	198
Tabel E.27.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Lingsar.....	199
Tabel E.28.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	199
Tabel E.29.: Perhitungan LQ Kecamatan Narmada.....	199
Tabel E.30.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Narmada.....	200
Tabel E.31.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	200
Tabel E.32.: Perhitungan LQ Kecamatan Kediri.....	200

Tabel F 16. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kota Gerung.....	216
Tabel F 17. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Desa Babusalam.....	217
Tabel F 18. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Desa Gerung.....	217
Tabel F 19. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Desa dasan Geres.....	217
Tabel F 20. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Lembar.....	218
Tabel F 21. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Sekotong Tengah.....	218
LAMPIRAN G : Hasil Analisis Kependudukan.....	219
Tabel G.1. : Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Per Kecamatan tahun 1995, 1997, 2000 dan 2001 dan Proyeksi Jumlah Penduduk 5 dan 10 Tahun kedepan.....	219
LAMPIRAN H : HASIL Analisis Keruangan Gerung.....	220
Gambar 1 : Gambaran Umum Kota Gerung.....	220
Gambar 2.: Perkembangan Sistem Jaringan Kota Gerung.....	221
LAMPIRAN I : Hasi Analisis PHA.....	222
Tabel I.1.: Daftar Responden Penelitian.....	222
Tabel I.2.: Hirarki Manfaat Penilaian Penelitian.....	223
Tabel I.3.: Hirarki Beban Penilaian Penelitian.....	224
Tabel I.4: Kreteria manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	225
Tabel I.5: Kuisisioner Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.....	226

LAMPIRAN F : Hasil Analisis Shift-Share.....	212
Tabel F 1. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kota Mataram.....	212
Tabel F 2. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Bayan.....	212
Tabel F 3. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Kayangan.....	212
Tabel F 4. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Gangga.....	213
Tabel F 5. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Tanjung.....	213
Tabel F 6. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Pemenang.....	213
Tabel F 7. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Batulayar.....	214
Tabel F 8. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Gunungsari.....	214
Tabel F 9. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Lingsar.....	214
Tabel F 10. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Narmada.....	215
Tabel F 11. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Kediri.....	215
Tabel F 12. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Kuripan.....	215
Tabel F 14. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Labuapi.....	216
Tabel F 15. : Penentuan Sektor-Sektor Unggul, Agak Unggul, Agak Mundur Dan Mundur Dalam Selang Waktu Kajian Kecamatan Gerung.....	216

Tabel E.33.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Kediri.....	201
Tabel E.34.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	201
Tabel E.35.: Perhitungan LQ Kecamatan Kuripan.....	201
Tabel E.36.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Kuripan.....	202
Tabel E.37.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	202
Tabel E.38.: Perhitungan LQ Kecamatan Labuapi.....	202
Tabel E.39.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Labuapi.....	203
Tabel E.40.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	203
Tabel E.41.: Perhitungan LQ Kecamatan Gerung.....	203
Tabel E.42.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Gerung.....	204
Tabel E.43. : Penduduk Kota Gerung Dan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Mata Pencapaian.....	204
Tabel E.44. : Kreteria Dari Mata Pencapaian Penduduk Kota Gerung 1995-2001.....	205
Tabel E.45.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	206
Tabel E.46.: Perhitungan LQ Kota Gerung.....	206
Tabel E.47.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kota Gerung.....	206
Tabel E.48.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	207
Tabel E.49.: Perhitungan LQ Desa Babusalam.....	207
Tabel E.50.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Desa Babusalam.....	207
Tabel E.51.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	207
Tabel E.52.: Perhitungan LQ Desa Gerung.....	208
Tabel E.53.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Desa Gerung.....	208
Tabel E.54.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	208
Tabel E.55.: Perhitungan LQ Desa Dasan Geres.....	209
Tabel E.56.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Desa Dasan Geres.....	209
Tabel E.57.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	209
Tabel E.58.: Perhitungan LQ Kecamatan Lembar.....	210
Tabel E.59.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Lembar.....	210
Tabel E.60.: Perhitungan Dan Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Di Daerah Dengan Wilayah Acuan.....	210
Tabel E.61.: Perhitungan LQ Kecamatan Sekotong Tengah.....	211
Tabel E.62.: Hasil Analisis Perhitungan LQ Kecamatan Sekotong Tengah.....	211

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota sebagai pusat pemerintahan/ibukota pada dasarnya merupakan tempat kedudukan suatu administrasi pemerintahan yang bersifat membawahi beberapa kota/wilayah. Membawahi pada bagian ini merupakan ungkapan untuk menggambarkan peran ibukota sebagai pusat administrasi bagi wilayah wewenangannya. Pusat pemerintahan adalah lokasi perkantoran untuk semua kepentingan khusus yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan/tujuan perorangan atau kelompok, lembaga legislatif, dan pemerintah. Perkembangan pusat pemerintahan selalu diiringi dengan perkembangan kota sehingga dapat memiliki fungsi yang lebih kompleks karena selain sebagai pusat pemerintahan, kota juga harus mewadahi unsur-unsur fungsi kegiatan kota lain yang dapat menunjang keberlanjutan kota tersebut (Sujarto,1995).

Kota dalam perkembangannya merupakan pusat berbagai kegiatan dari suatu wilayah tertentu antara lain pusat pengelompokan dan pemukiman penduduk, pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan masih banyak lainnya. Kota tidak hanya merupakan pemusatan daerah pemukiman penduduk, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan administrasi saja, tetapi juga merupakan pusat penyediaan fasilitas, industri, perdagangan, modal, skill dan lain-lain kegiatan yang dibutuhkan bagi penunjang pertumbuhan daerah belakangnya (*hinterlandnya*) (Pamudji, 1985: 7).

Implikasi sebagai pusat pemerintah daerah otonom, suatu ibukota harus secara keseluruhan diorientasikan pada kota tersebut. Dampaknya kota tadi sebagai ibukota akan berkembang secara pesat, ditandai dengan peningkatan kebutuhan pengembangan secara

fisik, sosial ekonomi maupun kelembagaan. Tidak jarang kebutuhan ini kemudian ditindaklanjuti dengan peningkatan status administrasi ibukota tadi dari kawasan perkotaan nonstatus menjadi kawasan perkotaan berstatus otonom.

Peningkatan status administrasi pada konteks kabupaten berarti memunculkan adanya dualisme pelaksana operasional dua daerah otonom dalam satu kawasan. Dari aspek hukum, suatu daerah otonom mempunyai wilayah hukum positif berdasarkan atas batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa kewenangan hanya ada pada satu daerah saja. Apabila ada suatu kedudukan hukum daerah lain pada daerah tersebut, maka itu berarti ada daerah dalam daerah. Untuk menghindari hal tersebut, secara operasional ketentuan perundang-undangan telah menggariskan kebijakan yang mengharuskan kedudukan hukum suatu ibukota kabupaten mesti berada dalam wilayah administrasi kabupaten bersangkutan, sehingga apabila ibukota daerah kabupaten masih berada di dalam daerah otonom lain, maka harus segera dipindahkan dan berada di dalam wilayah administratifnya sendiri. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2/6 tanggal 15 Mei 1973 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Bagi Ibukota Kabupaten adalah salah satu pioner payung operasionalisasi kebijakan tersebut.

Banyak daerah di Indonesia yang mengalami proses pemindahan ibukota seperti diungkapkan di atas. Bagi kabupaten yang melakukan pemindahan ibukota sebagian besar polanya dilakukan dengan pertimbangan ibukota lama telah meningkat statusnya menjadi daerah otonom kota. Gambaran mengenai komposisi daerah yang sudah dan belum memindahkan ibukota kabupaten secara aktual adalah sebagai berikut:

TABEL I.1
POLA PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

NO	PROVINSI	KABUPATEN	IBUKOTA LAMA	IBUKOTA BARU	POLA PEMINDAHAN IBUKOTA
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar	Banda Aceh	Kota Jantho	I
2.		Aceh Utara	Lhokseumawe	Lhoksukon	I
3.		Aceh Timur	Langsa	Idi-Peurelak(ren)	I
4.	Sumatera Utara	Langkat	Binjai	Stabat	I
5.		Delit Serdang	Medan	Lubuk Pakam	I
6.		Simalungun	Pematang Siantar	Pematang Raya	I
7.		Asahan	Tanjung Balai	Kisaran	I
8.		Tapanuli Tengah	Sibolga	Kota Pandan	I
9.		Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan	Sipirok (ren)	I
10.		Sumatera Barat	Agam	Bukittinggi	Lubuk Basung
11.	Limapuluh Kota		Payakumbuh	Sarilamak	I
12.	Solok ¹⁾		Solok	Kayu Aro	I
13.	Padang Pariaman		Pariaman	Sicincin (ren)	I
14.	Riau	Rokan Hilir	Bagansiapi-api (sem)	Ujung Tanjung (def)	II
15.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Tanjungpinang	Tanjung Uban (ren)	I
16.	Jambi	Batanghari	Kenaliaseam	Muara Bulian	II
17.	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Lubuk Linggau	Muara Beliti (ren)	I
18.	Bengkulu	Bengkulu Utara	Bengkulu	Arga Makmur	I
19.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	Pangkal Pinang	Sungailiat	I
20.	Lampung	Lampung Tengah	Metro	Gunung Sugih	I
21.		Lampung Selatan	Tanjung Karang	Kalianda	J
22.	Banten	Tangerang	Tangerang	Tigaraksa	I
23.	Jawa Barat	Bekasi	Bekasi	Cikarang	I
24.		Bogor	Bogor	Cibinong	I
25.		Sukabumi	Sukabumi	Pelabuhan Ratu	I
26.		Cirebon	Cirebon	Sumber	I
27.		Bandung ²⁾	Bandung	Soreang	I
28.		Tasikmalaya	Tasikmalaya	Singaparna	I
29.	Jawa Tengah	Tegal	Tegal	Slawi	I
30.		Pekalongan	Pekalongan	Kajen	I
31.		Semarang ³⁾	Semarang	Ungaran	I
32.	Jawa Timur	Magelang	Magelang	Kota Mungkid	I
33.		Madiun	Madiun	Caruban	I
34.		Blitar	Blitar	Wlingi (ren)	I
35.		Mojokerto	Mojokerto	Mojosari	I
36.		Kediri	Kediri	Pare (ren)	I
37.		Malang	Malang	Kepanjen	I
38.		Pasuruan	Pasuruan	Bangil (ren)	I
39.		Probolinggo	Probolinggo	Kraksaan (ren)	I
40.		Surabaya ⁴⁾	Surabaya	Gresik	I
41.	Bali	Badung	Denpasar	Dalung Mengwi	I
42.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Mataram	Gerung	I
43.		Bima	Raba	Panda	I
44.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Kupang	Sulamu	I
45.		Bajawa	Ngada	Mbay	II
46.	Kalimantan Barat	Sambas ⁵⁾	Singkawang	Sambas	III
47.		Pontianak	Pontianak	Mempawah	I
48.	Sulawesi Utara	Minahasa	Manado	Tondano	I
49.	Gorontalo	Boalemo ⁵⁾	Tilamula (sem)	Marisa (def)	II

¹⁾ melalui dua tahap pemindahan, pertama dari Kota Solok ke Koto Baru, kemudian dari Koto Baru ke Kayu Aro

²⁾ melalui dua tahap pemindahan, pertama dari Kota Bandung ke Bale Endah, kemudian dari Bale Endah ke Soreang

³⁾ direncanakan untuk dipindah dari Ungaran ke Bawen

⁴⁾ Nama kabupaten dirubah menjadi Kabupaten Gresik

⁵⁾ Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1999, dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Melalui pemecaran ini, Singkawang sebagai ibukota Kabupaten Sambas masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkayang yang beribukota di Bengkayang, sehingga ibukota Kabupaten Sambas kemudian dipindahkan ke kota Sambas di wilayah Kabupaten Sambas.

50.	Sulawesi Tengah	Donggala	Palu	Banawa	I
51.		Banggai Kepulauan	Banggai (sem)	Salakan (def)	II
52.		Morowali	Kolonedale (sem)	Bungku (def)	II
53.	Sulawesi Selatan	Luwu	Palopo	Cimpu (ren)	I
54.	Sulawesi Tenggara	Kendari	Kendari	Unaaha	I
55.		Buton	Baubau	Pasarwajo	I
56.	Maluku Utara	Maluku Utara ⁷⁾	Ternate	Jailolo	I
57.		Halmahera Tengah ⁸⁾	Soasii	Weda	III
58.	Irian Jaya Barat	Sorong	Sorong	Aimas	I
59.	Papua	Paniai ⁹⁾	Enarotali	Nabire	II
60.		Jayapura	Jayapura	Sentani	I

Sumber Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri tahun 2003, diolah

Keterangan:

- ren = rencana sem = ibukota sementara def = ibukota definitif
 I = ibukota lama sudah berubah status sebagai daerah otonom kota
 II = posisi relatif ibukota lama dipandang tidak berkembang bagi pembangunan daerah
 III = terjadi pemekaran kabupaten yang berakibat kedudukan administratif ibukota masuk ke dalam wilayah administrasi kabupaten/kota pemekaran

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kabupaten yang status ibukotanya berubah menjadi daerah otonom, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Seiring dengan peningkatan status Ibukota Kabupaten Lombok Barat yaitu Mataram menjadi daerah otonom pada tahun 1994, maka muncul kebijakan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke luar dari wilayah administratif Kota Mataram. Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 7/KEP/DPRD/1995 tanggal 22 Agustus 1995 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat dari wilayah Kotamadya Mataram ke Gerung. Tujuan dari pemindahan ini adalah dalam rangka meningkatkan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten

⁶⁾ Berdasarkan UU No. 50 Tahun 1999 ibukota sementara Kabupaten Boalemo di Tilamuta dan ibukota definitif di Marisa. Pada perkembangannya, agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan pada masyarakat, melalui UU No. 6 Tahun 2003 Kabupaten Boalemo dimekarkan menjadi Kabupaten Boalemo beribukota di Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato beribukota di Marisa.

⁷⁾ Nama kabupaten dirubah menjadi Halmahera Barat

⁸⁾ Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003, dimekarkan menjadi Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Melalui pemekaran ini, Soasii sebagai ibukota Kabupaten Halmahera Tengah masuk dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan (meliputi Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara), sehingga ibukota Kabupaten Halmahera Tengah kemudian dipindahkan ke kota Weda di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

⁹⁾ Pada awalnya kegiatan pemerintahan Kabupaten Dati II Paniai dipindahkan dari Enarotali ke Nabire, namun melalui PP 52 Tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai dimekarkan menjadi Kabupaten Administrasi Paniai yang beribukota [kembali] di Enarotali dan Kabupaten Administrasi Puncak Jaya beribukota di Kota Mulia. Berfungsinya kembali Enarotali sebagai ibukota mengakibatkan nama Kabupaten Dati II Paniai kemudian dirubah menjadi Kabupaten Dati II Nabire. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 status wilayah administrasi Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya ditingkatkan menjadi daerah otonom.

Lombok Barat. Sebagai tindak lanjut dari upaya ini adalah berupa dukungan politis sebagai kerangka yuridis formal untuk penetapan ibukota baru bagi Kabupaten Lombok Barat yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. Dalam peraturan ini secara eksplisit ditetapkan Gerung, yaitu suatu ibukota kecamatan dengan nama yang sama, berada sekitar 15 km ke arah selatan dari Kota Mataram sebagai ibukota kabupaten baru.

Beberapa hal yang penting yang menjadi pertimbangan pemindahan ibukota:

1. Mampu mendukung fungsi suatu ibukota kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan umum pembangunan daerah kabupaten yang bersangkutan;
2. Memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan yang tinggi yang dapat mendukung kelangsungan ibukota selanjutnya.
3. Terletak pada posisi strategis dalam arti aman dan relatif memusat terhadap wilayahnya untuk dapat melakukan tindakan pembinaan pengembangan wilayahnya.

Gerung diharapkan dapat berkembang lebih jauh sebagai pusat ekonomi/perdagangan dan jasa. Hal ini didukung oleh kedekatan lokasinya dengan Pelabuhan Lembar sebagai outlet yang melayani wilayah Pulau Lombok untuk keperluan interaksi antarpulau. Dalam jangka panjang kondisi ini akan menimbulkan dampak dalam pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah pengaruhnya.

Struktur kota Gerung akan mengalami perubahan secara menyeluruh baik dari aspek sosial ekonomi, sosial budaya maupun fisik. Perubahan ini ditandai dengan perubahan fungsi kota yang diikuti dengan perubahan fisik sebagai akibat aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Perluasan fisik, yaitu bertambahnya areal terbangun yang menyebar ke arah pinggiran. Ini terjadi pada sepanjang jalur jalan utama regional, dan juga berkembangnya kawasan-kawasan baru pada wilayah pinggiran kota, yang ditandai dengan

munculnya berbagai bangunan baru di sepanjang jalan dari Kota Mataram ke Kota Gerung dan sekitarnya.

Dengan mencermati arah perkembangan kota, maka akan dapat diprediksi bentuk kota yang diinginkan, sehingga dapat diantisipasi munculnya permasalahan ketidakteraturan kota di belakang hari atau dengan kata lain pada akhirnya ada kemudahan untuk menata kota itu sendiri.

Munculnya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 tahun 1999 menjadi faktor pendorong percepatan perubahan struktur perwilayahan administratif di Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengatasi kepadatan penduduk di suatu tempat/ pemerataan, beberapa kecamatan kemudian dimekarkan. Pemekaran kecamatan ini berada di wilayah utara, tengah dan selatan dari Kabupaten Lombok Barat, yaitu wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi, diantaranya wilayah selatan (Kecamatan Gerung dimekarkan menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar), wilayah tengah (Kecamatan Kediri dimekarkan menjadi Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gunungsari dimekarkan menjadi Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kecamatan Narmada dimekarkan menjadi Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar), dan wilayah utara (Kecamatan Tanjung dimekarkan menjadi Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang, Kecamatan Gangga dimekarkan menjadi Kecamatan Gangga dan Kecamatan Kayangan). Dilihat dari pemanfaatan lahan terbangun, orientasi kepadatan penduduk, dengan segala aktivitasnya, menggambarkan bahwa kawasan ini lebih pesat perkembangannya dibandingkan dengan kawasan utara dan selatan. Pola jaringan transportasi vertikal utara-selatan yang mengikuti bentuk wilayah administratif menyebabkan interaksi antara kawasan utara dan selatan tidak bisa secara langsung, karena ada pembatas berupa wilayah administratif Kota Mataram yang harus dilewati.

Ketergantungan kawasan utara terhadap Kota Mataram dalam hal akses ke arah selatan menjadi relatif tinggi. Pada kawasan selatan yang relatif datar di bagian tengah dan berbukit di bagian selatan sistem jaringan transportasi relatif bervariasi, dengan pola grid sehingga memungkinkan lokasi-lokasi dapat dicapai dengan mudah. Pola jaringan ini dan keberadaan outlet Pelabuhan Lembar turut mendorong pertumbuhan kawasan selatan lebih pesat dibandingkan kawasan utara.

Untuk menciptakan pusat perkembangan baru suatu daerah perlu dikaji manfaat dan beban yang akan ditimbulkan, yang nantinya bisa menjadi acuan bagi kebijakan strategi arah pembangunan kota dan wilayah. Manfaat dan beban ini terjadi akibat adanya aktivitas yang bersifat positif dan negatif. Dalam hal ini manfaat diarahkan sebagai tujuan yang akan dicapai, sedangkan beban diartikan hal-hal yang perlu ditangani untuk mencapai tujuan. Hal ini timbul dipacu oleh respon atau pendapat di kalangan masyarakat mengenai kelayakan apakah Gerung pantas menjadi ibukota kabupaten, dengan didasari oleh karakteristik wilayah

Pemindahan ibukota kabupaten ke arah selatan dari ibukota lama ini secara langsung berdampak terhadap pelayanan publik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya apabila dilihat dari aspek sentralitas terhadap keseluruhan wilayah. Sebagaimana diketahui bahwa secara struktur fisik perwilayahan, Kabupaten Lombok Barat memanjang secara vertikal utara dan selatan. Perbedaan yang mendasar dari dua kawasan ini dapat dilihat dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Secara fisik, kedua kawasan ini dibatasi oleh pegunungan yang merupakan rangkaian dari sistem Gunung Rinjani yang membujur dari arah timur sampai arah barat menuju pantai. Akibatnya kawasan bagian utara disebut sebagai "*dayan gunung*" (utara gunung) dan kawasan selatan sebagai "*lauk gunung*" (selatan gunung).

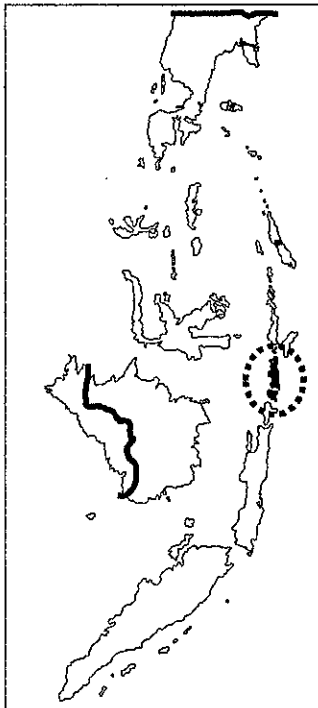
Kawasan utara meliputi lima kecamatan, yaitu Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan merupakan suatu kawasan perbukitan dan pegunungan 40% dengan ketinggian 0->1000 meter dari permukaan laut, dengan kemiringan/lereng > 2%, terbagi dalam lahan kering, hutan lindung, perkebunan, area konservasi, sawah tadah hujan, zona wisata dan danau. Kepadatan penduduk rata-rata 20 jiwa per km² dan kondisi sarana prasarana masih terbatas.

Kawasan selatan meliputi enam kecamatan, yaitu Labuapi, Kediri, Gerung, Kuripan, Lembar dan Sekotong Tengah. Kawasan ini berupa dataran rendah dan sebagian kecil 20% dataran tinggi, dengan ketinggian 0-<500 meter dari permukaan laut dengan kemiringan/lereng 2%, terbagi dalam lahan kering, perkebunan, hutan lindung, area konservasi, sawah basah dan tadah hujan, zona wisata. Kepadatan penduduk > 65 jiwa per km² dan infrastruktur yang cukup memadai.

Aspek budidaya pertanian memperlihatkan bahwa produk domestik kawasan selatan mengikuti pola tanam padi-padi-palawija, sedangkan kawasan utara berpola tanam padi-palawija-padi. Perbedaan ini dipengaruhi perbedaan iklim, dan curah hujan.

Secara aspek sosial-budaya, karakteristik masyarakat di kawasan utara menggunakan logat bahasa yang sedikit berbeda dalam pengelompokan bahasa dengan masyarakat di kawasan selatan. Kawasan utara umumnya menggunakan dialek "*kato-kate*" sedangkan kawasan selatan menggunakan dialek "*meno-mene*" dan "*ngeno-ngene*". Pada kawasan utara juga masih didominasi oleh adat istiadat yang dipengaruhi oleh kultur "*wetu telu*", sedangkan di wilayah selatan "*waktu lima*" (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, 1978). *Wetu telu* adalah varian dari budaya Islam Sasak yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Siwa-Budha, sedangkan *waktu lima* adalah Islam yang dipengaruhi oleh unsur Melayu-Arab (Cederroth, 1980).

Berdasarkan gambaran perbedaan karakter kawasan selatan dan utara di atas, pemindahan ibukota kabupaten ke Gerung di kawasan selatan berarti memindahkan konsentrasi kegiatan ke arah selatan Kota Mataram, dan ini berarti wilayah bagian utara secara fisik akan semakin jauh dalam jangkauan pelayanan publik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini peran ibukota lama masih akan mendominasi sebagai sumber pembangkit pergerakan, karena sebagian besar sumber daya penggerak pelaksanaan jasa pemerintahan masih bertempat tinggal di ibukota lama, di samping pergerakan dari arah utara akan selalu melewati ibukota lama. Artinya di samping perubahan struktur fisik keruangan pada koridor Mataram sebagai ibukota lama dan Gerung sebagai ibukota baru, maka ada implikasi-implikasi lain yang akan terjadi khususnya dalam pengembangan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat itu sendiri secara keseluruhan.



LAUT FLORES



PULAU SUMBAWA

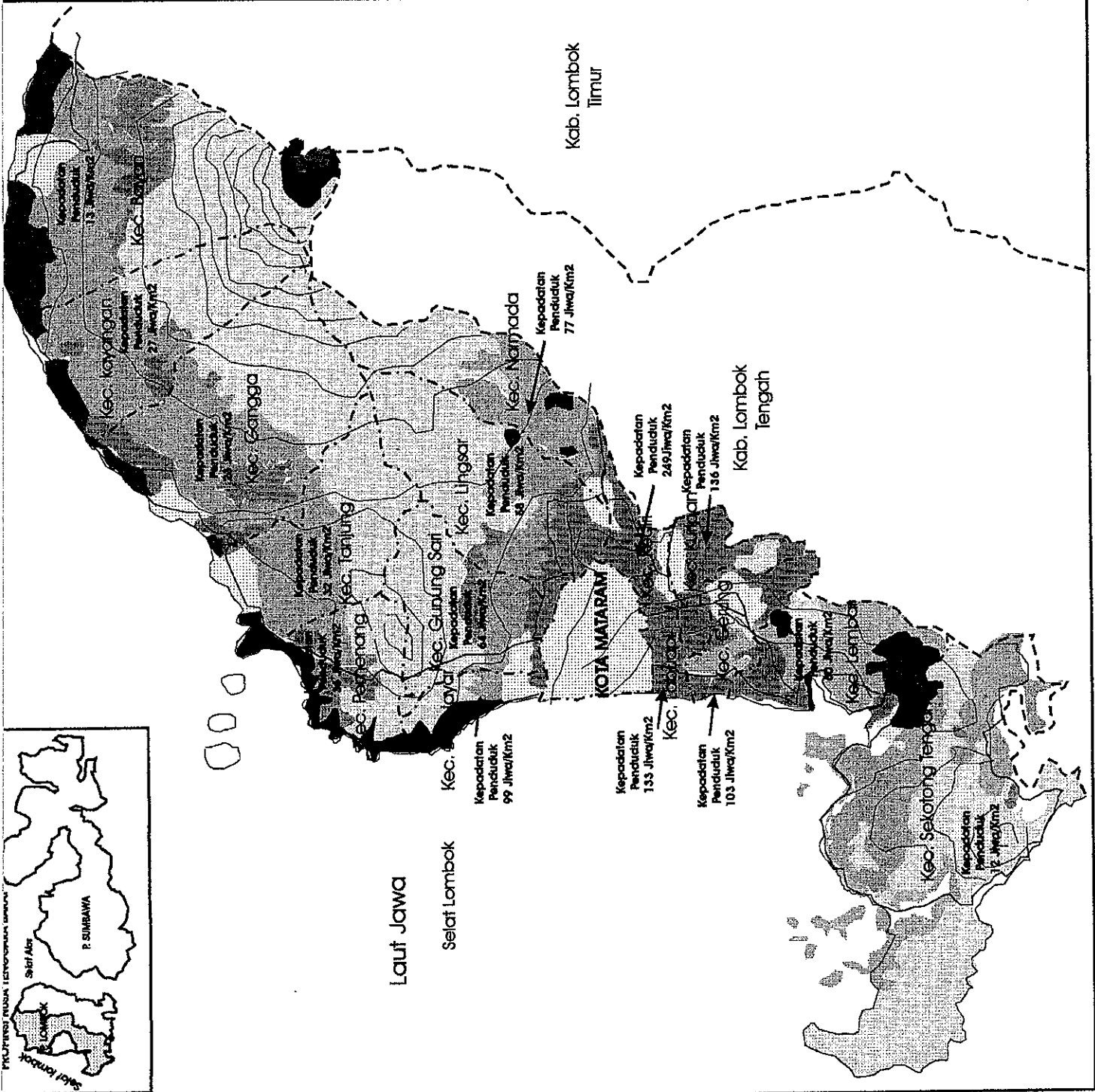
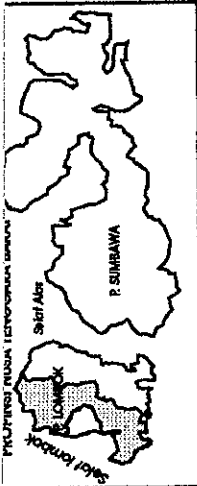
SAMUDERA HINDIA

PETA ORIENTASI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETERANGAN :

- - - : Batas Kabupaten
- - - : Batas Kota
- : Jalan Utama
- : Sungai
- : Ibukota Propinsi

<p>MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	NOMOR GAMBAR	Utara
	1.1	
<p>TESIS</p> <p>KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN PETA PERWILAYAHAN KABUPATEN DAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN</p>	SKALA	
	1 : 1.400.000	SUMBER BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
 PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS
 KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

PETA ORIENTASI KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KOTA MATARAM

- KETERANGAN :**
- - - : Batas Kabupaten
 - . - . : Batas Kota
 - : Jalan Propinsi/Negara
 - : Garis Pantai
 - ▨ : Pertanian Ladang Kering
 - ▨ : Garis Danau/DAM
 - ▨ : Hutan Konversi
 - ▨ : Hutan Lindung
 - ▨ : Perkebunan Tanaman Tahunan
 - ▨ : Area Konservasi
 - ▨ : Kawasan Kota/Ibu Kota Kec.
 - ▨ : Zona Pelabuhan
 - ▨ : Sawah Tadah Hujan
 - ▨ : Tegalan
 - ▨ : Zona taman Laut
 - ▨ : Pertanian Ladang Basah
 - ▨ : Zona Wisata
 - : Kontur

SUMBER	UTARA
BAPPEDA LOMBOK BARAT	
SKALA	NOMOR GAMBAR
1 : 100.000	1.2

1.2. Perumusan Masalah

Penetapan Gerung sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat pada satu sisi harus dioperasionalkan secara maksimal guna mencapai tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hasil akhir yang diharapkan adalah pada kemajuan kawasan ibukota dan wilayah secara keseluruhan. Mengingat wilayah secara keseluruhan mempunyai perbedaan karakter dan dengan adanya pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk pemerataan penduduk, maka akan terjadi kemajuan wilayah sesuai dengan karakter yang dimiliki. Karakter keruangan Kabupaten Lombok Barat terdiri dari dua bagian kawasan yang secara homogenitas berbeda. Proses pemindahan ibukota yang dilakukan pasti akan menghasilkan perubahan. Perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara cepat maupun lambat, namun tetap terjadi saat ini maupun dimasa akan datang. Perubahan yang dimaksud saat ini belum terlihat namun disadari bahwa pemindahan ini akan berpengaruh bagi perkembangan pembangunan daerah.

Melihat perkembangan Kota Gerung maka perlu diperhatikan fenomena perubahan struktur perubahan keruangan Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan yang berarti bermuara pada pengembangan struktur kewilayahan. Implikasi dari pengembangan struktur kewilayahan ini adalah pada perlunya mengenali manfaat dan beban jangkauan pelayanan publik yang diperankan oleh Gerung sebagai ibukota kabupaten baru pada aspek pemerintahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan.

Hakikatnya perwilayahan pembangunan akan menciptakan rumusan arahan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat melalui pembangunan perwilayahan di masa yang akan datang. Melalui perwilayahan yang kondusif dan mampu menciptakan akses terhadap upaya mengakomodir perkembangan potensi dan aktivitas produksi lokal wilayah Kabupaten Lombok Barat yang menyentuh karakter ruang atau

wilayah kabupaten secara keseluruhan hal ini dirangsang dengan adanya pemekaran kecamatan dimana dalam hal ini dapat menciptakan sektor-sektor baru dibidang ekonomi, yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian wilayah

Jangkauan pelayanan publik ini menjadi kriteria untuk menilai kinerja Gerung sebagai ibukota kabupaten baru dalam upaya mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dengan demikian permasalahan yang mengemuka adalah pada struktur kewilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota ke Gerung. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam studi ini adalah "*Bagaimana struktur kewilayahan Kabupaten Lombok Barat sebagai akibat pemindahan ibukota kabupaten dan pemekaran kecamatan?*"

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1. Tujuan Studi

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam studi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat sebagai akibat pemindahan ibukota kabupaten dan pemekaran kecamatan.

1.3.2. Sasaran Studi

Sasaran yang dilakukan dari penelitian ini sehingga tujuan studi dapat dicapai adalah:

1. Menganalisis perkembangan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat
2. Mengidentifikasi dampak pemekaran kecamatan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat

3. Mengidentifikasi kedudukan Kota Gerung dalam struktur perwilayahan
4. Menganalisis manfaat dan beban pemindahan ibukota dari Mataram ke Gerung
5. Mengidentifikasi dampak pemindahan ibukota kabupaten dari Mataram ke Gerung terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat
6. Arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat dari pemindahan ibukota dari Mataram ke Gerung.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah dalam konteks: perspektif teoritis pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan yang berdampak terhadap pengembangan wilayah pengaruhnya. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang diamati berupa perubahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat dari perbedaan karakteristik wilayah setelah pemindahan ibukota kabupaten, memahami proses pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut, dan faktor-faktor yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota Gerung sebagai pusat pertumbuhan. Sebagai batasan waktu penelitian adalah sejak Gerung difungsikan sebagai ibukota pada Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2000, sehingga dapat dianalisis bentuk arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini substansial kajian yang akan dipakai adalah :

1. Peran kota sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah pengaruh menentukan kinerja pelayanan publik pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Ukuran kinerja pelayanan publik ini

adalah pada hasil perbandingan manfaat dan beban dari keberadaan pusat pertumbuhan sebagai ibukota kabupaten. Di samping itu letak wilayah terpisah, sedikit banyak menyulitkan aparatur pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugasnya karena tidak berada di wilayah/daerah dilayaninya. Oleh karena itu perlu perhatian untuk melaksanakan fungsi ibukota (Pamudji, 1985: 35)

2. Pemekaran kecamatan, dimana pemekaran ini terjadi akibat dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menentukan arah perkembangan wilayah akibat adanya otonomi daerah, yang bertujuan untuk lebih menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif bagi wilayahnya terutama dalam bentuk struktur perekonomian wilayah untuk lebih mengembangkan pendapatan daerah untuk mendokrak pendapatan perkapita masyarakat.
3. Manfaat dan beban keberadaan pusat pertumbuhan baru adalah suatu perubahan yang terjadi akibat adanya suatu aktivitas yang bersifat positif dan negatif pada suatu lingkup tertentu (Sumarwoto, 1988: 43). Berdasarkan hal tersebut manfaat diartikan perubahan secara positif dan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan beban merupakan hal yang perlu diperhatikan karena memberi dampak negatif dari tujuan yang ingin dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Penelitian ini merupakan perkiraan/peramalan manfaat dan beban yang ditimbulkan akibat dampak pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat dan diidentifikasi sebagai arah perubahan sesuai dengan karakteristik perwilayahan Kabupaten Lombok Barat secara internal. Manfaat dan beban dalam hal ini dinilai dari pelaku yang terlibat langsung seperti pemerintah, masyarakat dan swasta dalam hal ini didefinisikan menurut keterkaitan dalam materi. Aspek variabel manfaat dan beban dalam hal ini adalah: aspek fisik keruangan, aspek ekonomi, aspek sosial kependudukan, aspek kelembagaan

4. Perwujudan dari arah perkembangan ini adalah pada kecenderungan bentuk struktur kota yang muncul. Struktur kota inilah yang nantinya dapat dinilai sebagai suatu gambaran peran ibukota dalam kaitannya dengan efektivitas peran sebagai pusat pertumbuhan terhadap struktur perwilayahan wilayah pengaruhnya. Artinya bentuk keruangan ibukota sebagai wujud kemajuan apakah berdampak juga pada perubahan konstelasi keruangan wilayah pengaruhnya. Struktur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan yang secara hierarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang. Arah perkembangan keruangan ibukota mencerminkan kecenderungan interaksi dengan wilayah pengaruh.

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penelitian adalah unit kecamatan. Untuk memperjelas proses analisis, maka penelitian ini menggunakan unit analisis perekonomian wilayah, dan aspek spasial terhadap kecendrungan terjadi setelah pemindahan ibukota dilihat dari perubahan sektor-sektor basis dan fisik dalam wilayah (hierarki kota-kota dan wilayah pengaruh) karena merupakan kajian analisis terhadap kelayakan Kecamatan Gerung terpilih sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat, secara administratif perencanaan dipandang mampu menjelaskan perubahan ruang yang ada secara empiris. Hal ini diperkuat oleh Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 7/KEP/DPRD/1995 tanggal 22 Agustus 1995 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat dari wilayah Kotamadya Mataram ke Gerung. Mengingat ada keterkaitan antara perkembangan yang terjadi di dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, maka secara makro Kota Mataram juga dijadikan sebagai wilayah kajian.

Wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki batas antara lain (Gambar 1.1 dan 1.2)

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok

1.5. Kerangka Pemikiran

Mataram yang sebelumnya berperan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat telah meningkat status sebagai daerah otonom, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan ibukota ke Gerung sebagai kawasan yang memenuhi syarat. Dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan fenomena ini adalah, pertama pada struktur kegiatan ekonomi dan keruangan internal Gerung dan kedua terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Dampak terhadap struktur wilayah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, peran sektor strategis dan tingkat pertumbuhan dari kawasan-kawasan yang di dalamnya.

Kebutuhan ruang kota adalah perwujudan dari upaya mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk dan perubahan serta perkembangan kegiatan usahanya. Demikian pula peran kota yang mengalami peningkatan, dengan maksud bahwa dengan bertambahnya penduduk maka akan makin banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat kota tersebut. Hal tersebut memunculkan dinamika perkembangan kota, yaitu berbagai faktor-faktor yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan kota, antara lain: 1) faktor fisik, meliputi kemampuan tanah, kualitas dan kuantitas lingkungan tanah, sifat iklim, harga dan nilai tanah, manfaat lingkungan, pola penggunaan lahan, distribusi

ruang, tata bangunan dan pola tata jaringan prasarana; 2) faktor sosial budaya, meliputi jumlah penduduk dan kualitas kehidupan bermasyarakat; 3) sedangkan untuk faktor ekonomi meliputi kegiatan usaha, politik ekonomi, faktor lahan. Dari ketiga faktor tersebut maka akan diketahui arah perkembangan fisik keruangan kota yaitu apa yang akan dan telah dicapai oleh Gerung, sehingga kota tersebut akan dapat merumuskan pola atau arahan perkembangan kota dan akan terbentuk struktur ruang kota yang diharapkan.

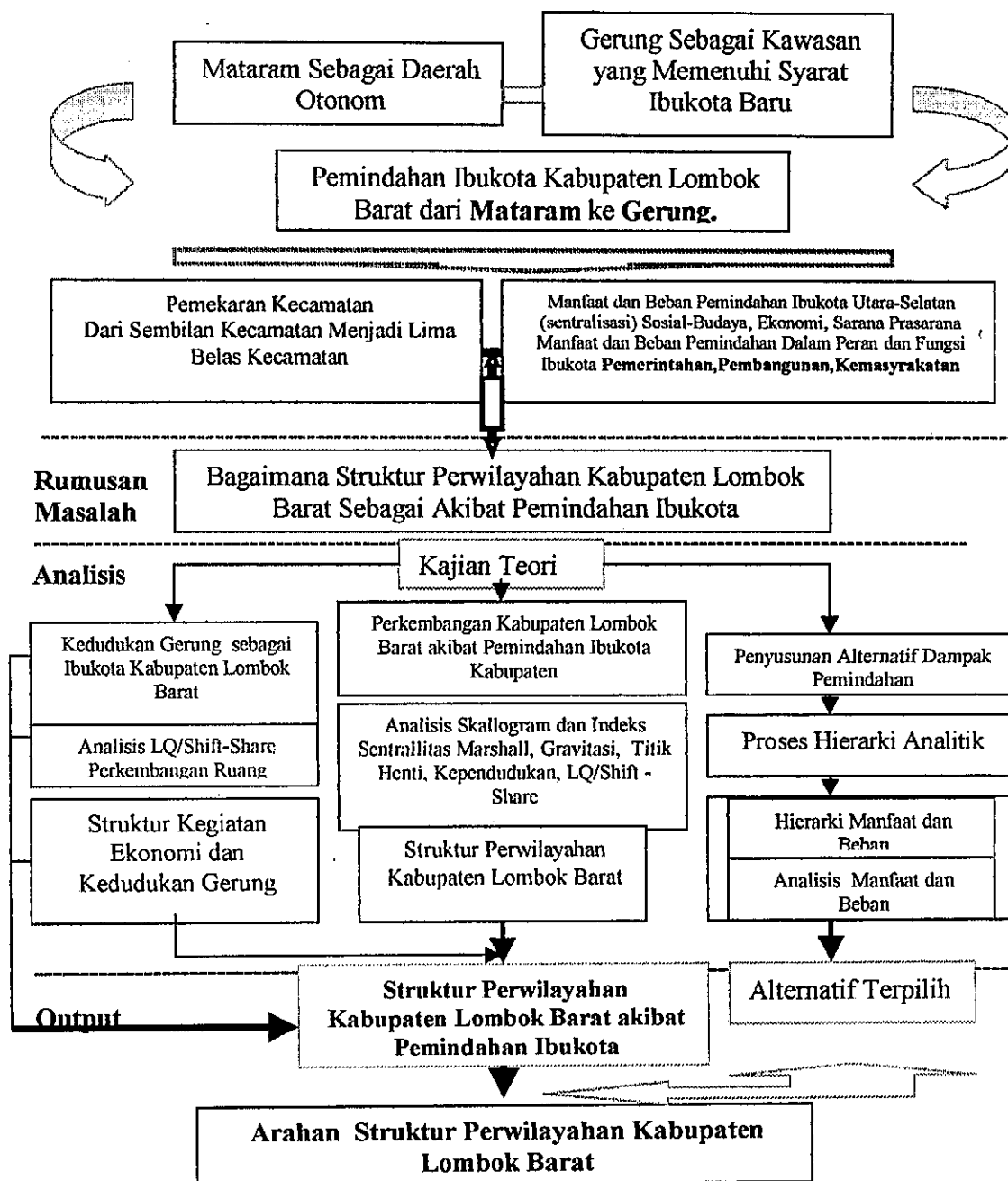
Seiring pemindahan, terjadi perubahan kebijakan otonomi daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri mencapai tujuan pengembangan wilayah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan pemekaran kecamatan dalam kerangka memperpendek jangkauan pengendalian pemerintahan daerah dan pemerataan pembangunan. Pemindahan ibukota baru menimbulkan dampak berupa manfaat dan beban terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota baik secara internal kota maupun perwilayahan Kabupaten secara keseluruhan. Manfaat disini, dapat dilihat dari apa yang dapat diberikan dari adanya pemindahan ibukota kabupaten terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara positif. Sedangkan beban, adalah permasalahan-permasalahan negatif yang ditimbulkan dengan adanya pemindahan tersebut. Perbandingan beban dan manfaat dilakukan sebagai upaya menilai pengaruh yang timbul terhadap jalannya pembangunan Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan.

Struktur perwilayahan berkaitan dengan gambaran ruang Kabupaten Lombok Barat sendiri khususnya dilihat dari kemungkinan perlunya mengetahui dampak dari manfaat dan beban akibat pemindahan ibukota, melalui aplikasi hierarki keruangan sistem kota-kota beserta wilayah pengaruhnya akan terdeteksi bagaimana memberikan kontribusi peran ibukota sebagai pusat pemerintahan dalam memberi pelayanan, terutama pelayanan pada

publik sehingga manfaat yang ditimbulkan dapat mendorong dan memberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu.

Kedua bagian kajian tadi secara keseluruhan menjadi dasar bagi penentuan strategi pengembangan Gerung sebagai ibukota kabupaten dalam kerangka perannya sebagai pusat pemerintahan dalam pelayanan terhadap publik untuk mendukung pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Latar Belakang



Sumber Hasil analisis 2003

GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI
STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA DAN
PEMEKARAN KECAMATAN

1.6. Pendekatan Penelitian

1.6.1. Tahapan Studi

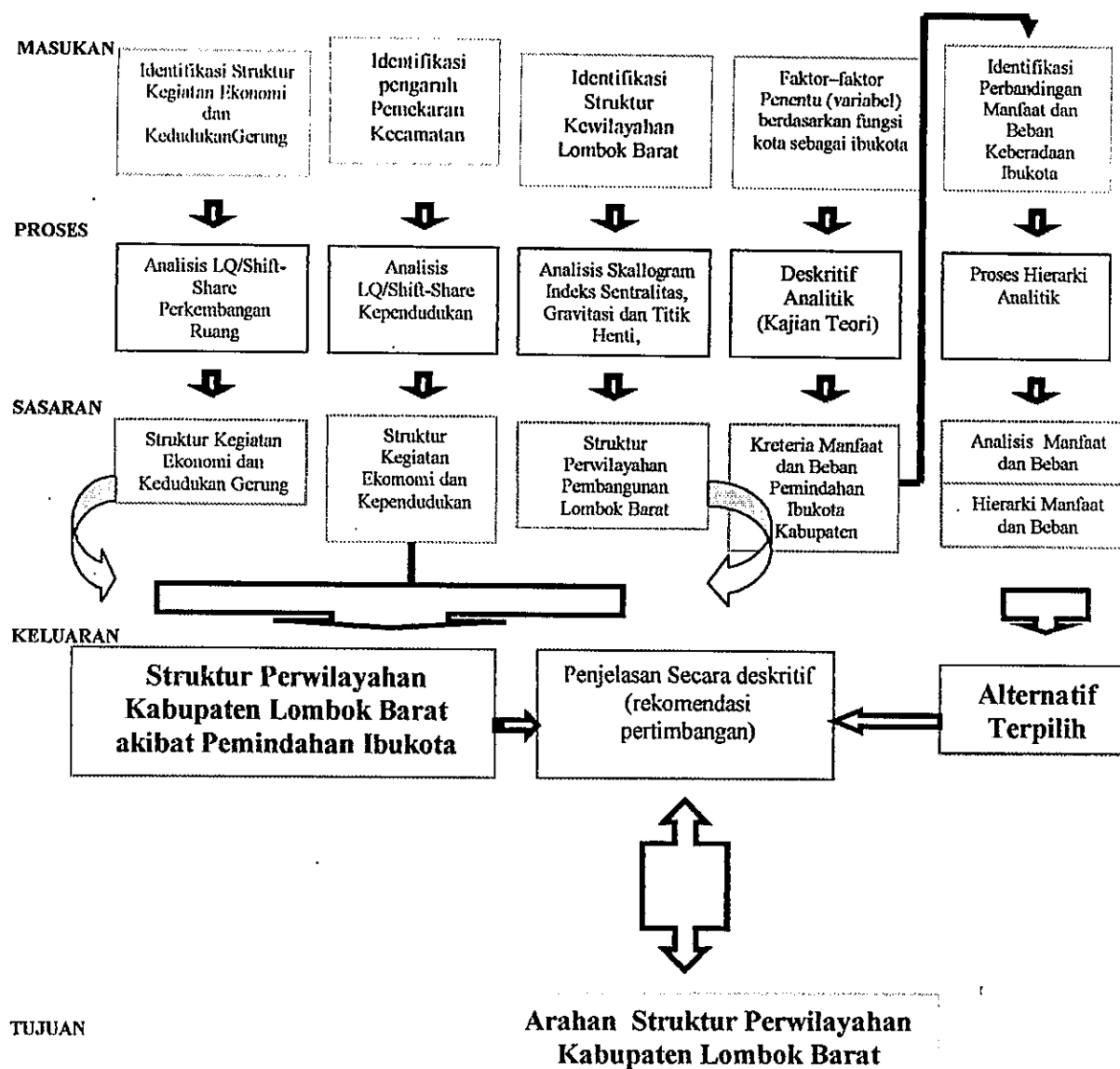
Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan keadaan pada masa sekarang.

Langkah-langkah penelitian terdiri beberapa tahapan.

- a. Identifikasi pusat pelayanan/hierarki kota/kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, dilakukan untuk menentukan Arah Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat, melalui :
 - Identifikasi dan analisis struktur ruang wilayah. Analisis ini adalah untuk mengetahui struktur ruang dan arah kecenderungan perkembangan;
 - Identifikasi dan analisis jangkauan pelayanan. Analisis ini adalah untuk mengetahui jangkauan pelayanan Gerung sebagai ibukota kabupaten
- b. Identifikasi kedudukan Kota Gerung dalam struktur perwilayahan
 - Identifikasi dan analisis perekonomian. Analisis ini adalah untuk mengetahui kinerja perekonomian kota, pergeseran struktur dan identifikasi sektor unggul kota;
 - Identifikasi tingkat keruangan kota. Analisis ini adalah untuk mengetahui perubahan ruang sebelum dan sesudah pemindahan ibukota.
- c. Identifikasi pengaruh pemekaran kecamatan terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat
 - Identifikasi dan analisis perekonomian. Analisis ini adalah untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur dan identifikasi sektor unggul daerah;

- Identifikasi dan analisis kependudukan. Analisis ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan penduduk, persebaran penduduk dan struktur penduduk.
- d. Penyusunan alternatif dampak pemindahan ibukota secara teoritis.
 - e. Menyusun kriteria manfaat dan beban pemindahan ibukota dalam rangka pembangunan wilayah secara teoritis.
 - f. Melakukan identifikasi perbandingan manfaat dan beban keberadaan ibukota Gerung dalam rangka pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan teknik Proses Hierarki Analitik (PHA).
 - g. Hasil alternatif dikaitkan dengan kedudukan Gerung dan analisis struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.
 - h. Keseluruhan proses ini disusun untuk memperoleh kesimpulan mengenai arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terhadap manfaat dan beban akibat pemindahan ibukota kabupaten terhadap perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.

1.6.2. Kerangka Analisis



Sumber Hasil Analisis 2003

GAMBAR I.4.
KERANGKA ANALISIS
STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI
AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

1.6.3. Metode Penelitian

1.6.3.1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui dan mendapatkan data dan informasi yang representatif tentang kondisi Ibukota Kabupaten Lombok Barat dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder ditujukan untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Gerung secara umum, khususnya kondisi fisik, sosial-budaya, ekonomi, prasarana dan struktur binaan. Data ini dihimpun dari berbagai sumber, antara lain Kantor Statistik Kabupaten Lombok Barat, Bappeda Kabupaten Lombok Barat, Potensi Desa dan sumber-sumber sekunder lain. Data primer ditujukan untuk mengetahui persepsi narasumber mengenai pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. Data primer dihimpun dari masyarakat, pemerintah, dan swasta.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survai dengan wawancara berstruktur sebagai masukan dari berbagai sumber diantaranya berasal dari unsur pemerintah daerah, masyarakat dan swasta yang dijadikan narasumber, wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dilengkapi dengan pengamatan lapang secara langsung oleh peneliti di lapangan.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA

No.	Kebutuhan Data	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Perolchan Data
1.	Fisik Keruangan	Kondisi Fisik Wilayah	Jumlah, jenis, dan penyebaran SDA	Sekunder	BPS, Bapeda
		Sumberdaya Alam	Potensi Wilayah	Sekunder	BPS, Bapeda
		Penggunaan Lahan	Pemanfaatan lahan	Skunder	BPN, Bapeda

		Hierarki Kota	Orde/hierarki kota-kota/SWP	Skunder	BPS, Bapeda
		Sarana Prasarana	Transportasi, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, pribadatan, rekreasi, dll	Sekunder	BPS, Bapeda
2	Sosial dan Kependudukan	Kuantitas Penduduk	Jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk	Sekunder	BPS, Bapeda
		Dinamika Sosial Masyarakat	Interaksi sosial, kegiatan keagamaan, perekonomian masyarakat	Sekunder, Primer	BPS, Bapeda Pengamatan langsung, wawancara dengan masyarakat
3	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Nilai PDRB	Sekunder	BPS, Bapeda
		Struktur Ekonomi		Sekunder	BPS, Bapeda
		Pembiayaan Pembangunan	Nilai Investasi	Sekunder	BPS, Bapeda
4	Administrasi Kelembagaan	Pelayanan	Jangkauan Pelayanan	Primer	Wawancara langsung dengan masyarakat, swasta dan Pemerintah
		Manfaat dan Beban	Kcadaan sebelum dan sesudah pemindahan	Primer	Wawancara langsung dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah

Sumber: Hasil Penyusunan 2004

Keterangan: BPS = Kantor Badan Pusat Statistik Perwakilan Kabupaten Lombok Barat
 BPN = Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
 Bapeda = Badan Perencanaan Kabupaten Lombok Barat

1.6.3.2. Narasumber

Narasumber yang dipilih untuk memperoleh gambaran tentang pilihan alternatif dampak pemindahan ibukota terdiri dari komponen publik dan dunia usaha, dengan pertimbangan mewakili keseluruhan komponen pelaku pembangunan di wilayah studi. Narasumber publik (pemerintah) dibagi secara proporsional atas dasar keterwakilan asal narasumber yaitu kawasan bagian utara (LBU) dan kawasan bagian selatan (LBS), meliputi

komponen yaitu aparat sekretariat daerah, aparat dinas daerah dan aparat lembaga teknis daerah serta instansi vertikal di daerah, sedangkan narasumber pada DPRD Kabupaten Lombok Barat dipilih secara sengaja berdasarkan asal wilayah pemilihan, yaitu kecamatan yang termasuk kawasan bagian utara dan kecamatan yang termasuk kawasan bagian selatan. Narasumber DPRD sekaligus mencerminkan aspirasi masyarakat.

Narasumber swasta (dunia usaha) dipilih berdasarkan struktur kegiatan ekonomi yang relatif menonjol untuk dilakukan investasi pada kawasan ibukota Gerung dan kawasan Lombok Barat lainnya berdasarkan fungsi yang ditetapkan oleh kebijakan yang ada (Rencana Tata Ruang). Narasumber dunia usaha dipilih dari asosiasi pengusaha, pengrajin dan sebagainya.

Secara lengkap komposisi narasumber untuk kebutuhan analisis PHA dirincikan sebagai berikut:

- A. Aparat Pemerintah Daerah: 1) Sekretaris Daerah, 2) Asisten 1 Sekretaris Daerah, 3) Bagian Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah, 4-6) Lembaga Teknis Daerah, 7-9) Dinas Daerah, 10) Pengadilan Agama (instansi vertikal);
- B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 11-15) Anggota Dewan dari kecamatan bagian utara, 16-23) Anggota Dewan dari kecamatan bagian selatan.
- C. Swasta: 24-30) Asosiasi Pengusaha (Kadin), Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi; Jasa Pengadaan Barang, Jasa Transportasi, UKM, Perbankan.

1.6.3.3. Analisis Data Penelitian dan Teknik Analisis

Setelah data dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompok variabel sosial ekonomi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (*empiris*) dan teoritis. Data yang bersifat

kuantitatif dianalisis dengan pendekatan matematik yang diolah dengan bantuan perangkat lunak komputer

A. Aspek Spasial (Hierarki Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pengembangan)

(1). Metode Skalogram Guttman

Metoda skalogram digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana pola fungsi/fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat pada berbagai tingkatan perkotaan/pusat pelayanan dan bagaimana pola tersebut melayani kebutuhan penduduk di wilayah yang ditinjau (Rondinelli, 1985: 115).

**TABEL I.3.
SKALOGRAM FUNGSI PEMUKIMAN**

	FASILITAS PELAYANAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kota A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kota B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kota C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kota D	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kota G	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Sumber Rondinelli (1985)

Keterangan :
(1,2,...) : fungsi/fasilitas
(A,B,..) : Kecamatan /Kota

(2). Metode Indeks Sentralitas Marshall

Metode ini tidak hanya melihat ketersediaan fasilitas yang diamati tetapi juga memperhitungkan jumlah unit fasilitas yang tersedia. Dengan pengalihan jumlah fasilitas yang ada dengan bobot untuk masing-masing fasilitas nantinya akan diketahui nilai pusat

pelayanan masing-masing. Berdasarkan nilai pusat pelayanan dapat dikelompokan. Metoda Indeks Sentralitas Terbobot dapat dipakai untuk menentukan tingkat sentralitas suatu satuan permukiman. Indeks sentralitas dari suatu pemukiman dihitung berdasarkan jumlah dari bobot fungsi yang terdapat pada pemukiman tersebut. Makin besar indeks ini menunjukkan tingkat sentralitas yang makin tinggi pula (Rondinelli, 1985)

Hitung bobot dari setiap fungsi berdasarkan rumus (Rondinelli, 1985):

$$C = \frac{1}{T}$$

Dengan :

C = bobot fungsi
 t = nilai sentralitas total, diambil sama dengan 100
 T = jumlah total fungsi dalam wilayah yang ditinjau

TABEL I.4.
PERHITUNGAN BOBOT FUNGSI

SATUAN PEMUKIMAN	FUNGSI										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
Jumlah fungsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Total	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bobot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Sumber Rondinelli, 1985

Keterangan :

A,...,H : Lokasi/Kecamatan/Kota
 1,2,... : fungsi/fasilitas

(3) Metode Gravitasi (Single Constraint Gravity)

Metode ini digunakan untuk melihat kekuatan daya tarik-menarik (interaksi) antar kota/ kecamatan dengan kota-kota yang lainnya. Metode ini tidak hanya untuk mengetahui

jangkauan pelayanan, namun juga sangat berguna untuk lebih menentukan apakah suatu pusat pelayanan yang sudah didapatkan pada kedua metode sebelumnya, benar-benar merupakan pusat pelayanan karena melayani daerahnya sendiri dan daerah lain atau hanya melayani daerahnya sendiri yang berarti bahwa daerah ini bukanlah pusat pelayanan (Bintarto, 1987, 85-87).

Konsep ini digunakan untuk analisis sosial-urban, untuk menjelaskan mengapa lahan berharga tinggi di tempat pusat kota dan yang beraksesibilitas tinggi serta mengapa harga lahan tinggi di kota besar daripada di kota kecil. Variabel yang dipakai untuk mengetahui tingkat interaksi ialah jarak dan jumlah penduduk. Perumusan model gravitasi digambarkan sebagai berikut:

$G = \frac{P_1 \times P_2}{D^2}$	Keterangan : G = Besarnya hubungan tarik-menarik (interaksi). P1 = Jumlah penduduk pusat 1. P2 = Jumlah penduduk pusat 2. D = Jarak antara pusat 1 dan 2.
----------------------------------	---

Sumber Bintarto, 1987

(4). Metode Titik Henti

Teori titik henti dikemukakan oleh Whyne Hammond untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai batas pengaruh suatu pusat pelayanan atau kota terhadap wilayah sekitarnya. Latar belakang disusunnya teori ini adalah setiap kota memiliki lebih dari satu wilayah pengaruh. Hal ini dikarenakan karena kota tersebut memiliki berbagai macam jenis pelayanan tingkat rendah sampai dengan jenis pelayanan tingkat tinggi. Semakin tinggi tingkat pelayanan, maka cakupan pelayanannya akan lebih luas. Perlu diketahui bahwa pengaruh total suatu kota terhadap *hinterland*-nya berkurang mengikuti jaraknya dari kota. Rumus teori titik henti tersebut adalah (Bintarto, 1987: 89-94):

$Th = \frac{j}{1 + \sqrt{(Px / Py)}}$	<p>Keterangan :</p> <p>Th = titik henti</p> <p>j = jarak antara kota x ke kota y</p> <p>Px = jumlah penduduk kota x</p> <p>Py = jumlah penduduk kota y</p>
---------------------------------------	--

Sumber Bintarto, 1987

(5). Analisis Tingkat Perkembangan

Prosedur ini akan dilakukan dengan membandingkan kondisi ruang terbangun pada kawasan ibukota kabupaten Gerung pada tahun awal, yaitu tahun sebelum dibangunnya fasilitas dengan kondisi ruang terbangun setelah dibangunnya fasilitas. Pertambahan pemanfaatan ruang yang muncul sebagai selisih dari kedua kondisi akan mencerminkan sebaran kegiatan dalam ruang pada periode tersebut. Di data dari tahun 1995 hingga saat ini.

Kegiatan sektor yang strategis sebagai penentu kegiatan kawasan berdasarkan analisis sebelumnya menjadi pertimbangan bagi hasil superimpose. Sebaran ini merupakan gambaran dari kecenderungan arah pergerakan struktur ruang kawasan, yang menentukan bentuk keruangan kota secara keseluruhan.

B. Aspek Kependudukan (Metode Kecenderungan)

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk masa lalu secara agregat dan mengasumsikan kecenderungan masa lalu itu akan tetap akan berlangsung di masa akan datang, model yang digunakan yaitu Metode Eksponensial. Model ini memiliki asumsi bahwa pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, tidak konstan tetapi proporsional (Bintarto, 1987).

Model pertumbuhan eksponensial adalah model bunga berganda, rumus yang digunakan:

$$P_t = P_o (1+R)^t$$

P_t = Proyeksi jumlah penduduk
 P_o = Jumlah Penduduk Semula
 R = Tingkat Pertumbuhan
 T = Waktu

Sumber Bintarto, 1987

C. Aspek Perekonomian

Analisis struktur ekonomi merupakan analisis untuk dapat mengetahui potensi dasar sebagai faktor utama yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan sektor ekonomi daerah, metode yang digunakan yaitu :

(1). Metode Location Quotient (LQ)

Penggalian potensi struktur kegiatan di kawasan Kabupaten Lombok Barat dapat dilakukan dengan teknis menemukenali daya saing kawasan berupa identifikasi sektor strategis (sektor basis), seperti shift-share, location quotient (Warpani, 1980 : 68)

Rumus untuk LQ adalah:

$$LQ = \frac{\frac{\text{Peubah spesialisasi daerah}}{\text{Peubah acuan daerah}}}{\frac{\text{Peubah spesialisasi wilayah acuan}}{\text{Peubah acuan wilayah acuan}}}$$

Sumber Warpani, 1980

Dari perhitungan LQ suatu sektor, kriteria umum yang digunakan adalah:

- Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan.
- Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan.
- Jika $LQ = 1$, tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

(2). Metode Shift-Share

Metode shift-share digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian kawasan, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggul kawasan dalam kaitannya dengan perekonomian acuan (wilayah acuan/wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih titik waktu (Warpani, 1980).

Analisis ini bertitik tolak pada asumsi pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen:

1. Pertumbuhan Wilayah Acuan (*Economic Growth*): mengukur perubahan kinerja ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan.
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (*KPP/Proportional shift*): mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti bahwa sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (*KPK/Differential shift*): mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya. Dengan demikian apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi adalah PEK, maka persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$PEK = KPW + KPP + KPK$
$PEK = \left(\frac{Y^*}{Y} - \frac{Y_i'}{Y_i} \right) + \left(\frac{Y^*}{Y} - \frac{Y^*}{Y} \right) + \left(\frac{Y_i'}{y_i} - \frac{Y_i'}{Y_i} \right)$
Y^* = indikator ekonomi acuan akhir tahun kajian Y = indikator ekonomi acuan awal tahun kajian Y_i' = indikator ekonomi acuan sektor i akhir tahun kajian Y_i = indikator ekonomi acuan sektor i awal tahun kajian y_i' = indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i akhir tahun kajian y_i = indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i awal tahun kajian
Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus: $PN = KPP + KPK$

Sumber Warpani, 1980

D. Proses Hierarki Analitik

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persepsi akibat dari pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat dengan menanyakan beberapa pertanyaan sehubungan dengan keadaan daerah Kabupaten Lombok Barat akibat dari adanya pemindahan ibukota terhadap masyarakat dan struktur perwilayahan sehingga dapat diketahui apa yang sebenarnya cocok menyadi arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat di masa akan datang, metode yang digunakan, yaitu :

(1) Metode Proses Hierarki Analitik

Sebagaimana dikemukakan bahwa PHA secara prosedural dimulai dari penyusunan hierarki sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Maksud penyusunan hierarki ini adalah untuk menstrukturkan permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok secara hierarki (Saaty, 1993: 5).

Hierarki yang dimaksudkan di sini merupakan gambaran dari struktur sistem yang disusun oleh interaksi fungsional komponen-komponennya dan berdampak terhadap sistem itu sendiri secara keseluruhan. Hierarki secara ilustratif berupa diagram pohon yang disesuaikan dengan tingkatannya. Hierarki dapat tersusun dengan baik berdasarkan struktur

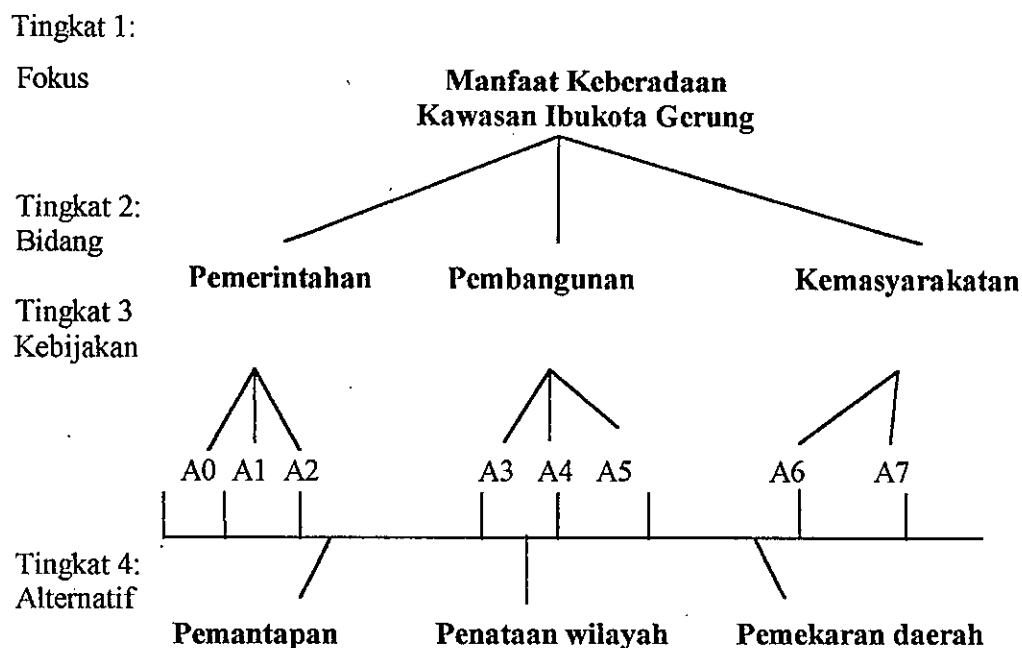
berpikir yang sistematis. Pada konteks ini, penyusunan hierarki didasarkan pada kajian teoritis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan suatu kota.

Hierarki untuk penilaian alternatif disusun dalam dua bagian, yaitu hierarki manfaat dan hierarki beban. Penyusunan hierarki tersebut, didasarkan pada kajian teoritis mengenai faktor-faktor manfaat dan beban dari tiga arahan alternatif implikasi. Hierarki manfaat dan beban masing-masing disusun atas empat tingkatan, sebagai berikut:

- a. Tingkat 1 yaitu fokus, merupakan tujuan diaplikasikannya metoda analitik hierarki proses terdiri dari manfaat dan beban kawasan Ibukota Gerung dalam kerangka pembinaan wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- b. Tingkat 2 yaitu bidang, merupakan pengelompokan bidang pembinaan tugas-tugas pemerintahan, berupa ketataprajaan (pemerintahan), administrasi pembangunan (pembangunan) dan kesejahteraan sosial (kemasyarakatan).
- c. Tingkat 3 yaitu kebijakan, yang merupakan penjabaran dari masing-masing bidang.
- d. Tingkat 4 yaitu alternatif, merupakan pilihan yang akan dipertimbangkan untuk strategi pengembangan.

1. Hierarki Manfaat

Berikut ini uraian dari masing-masing tingkat hierarki dan secara skematis terlihat pada Gambar.



GAMBAR I.5.
HIERARKI MANFAAT KEBERADAAN IBUKOTA GERUNG

Sumber Metode PHA Saaty (1993) diolah

Keterangan:

A0 = Konsentrasi perkantoran

A1 = Peningkatan kemampuan aparatur

A2 = Efisiensi dan efektivitas tugas pengelolaan pembangunan

A3 = Pengembangan wilayah sekitarnya

A4 = Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis perenc. pembangunan

A5 = Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan

A6 = Peningkatan pelayanan masyarakat

A7 = Peningkatan kemandirian ekonomi

A. Tingkat 1: Fokus

Manfaat sebagai ibukota kabupaten sesuai visi dan misi dan sesuai pula dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

B. Tingkat 2: Bidang

- a. Pemerintahan. Manfaat ditinjau dari bidang pemerintahan meliputi: konsentrasi pelayanan perkantoran, peningkatan kemampuan aparatur, efisiensi dan efektifitas tugas pengelolaan pembangunan.
- b. Pembangunan. Manfaat ditinjau dari bidang pembangunan, terdiri dari: pengembangan kota dan wilayah sekitarnya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis perencanaan pembangunan dan peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan.
- c. Kemasyarakatan. Manfaat ditinjau dari bidang kemasyarakatan terdiri atas: peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan kemandirian ekonomi.

C. Tingkat 3: Kebijakan

- a. Konsentrasi Perkantoran (A0). Manfaat yang diterima karena memungkinkan pembentukan kantor pengelola dan instansi lainnya.
- b. Peningkatan Kemampuan Aparatur (A1). Manfaat yang diterima karena terbukanya peluang bagi pengembangan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
- c. Efisiensi dan Efektifitas Tugas Pengelolaan Pembangunan (A2). Manfaat yang diterima karena akan memperlancar tugas-tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Pengembangan Kota dan Wilayah Sekitarnya (A3). Manfaat yang diterima untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan kota dan wilayah sekitarnya, terutama pengembangan potensi ekonomi dan potensi penduduk kota dan wilayah sekitarnya.

- e. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan (A4). Manfaat yang diterima untuk memperlancar tugas dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, terutama dikaitkan dengan penataan ruang, perbaikan kualitas lingkungan, dan pembangunan fasilitas pelayanan umum.
- f. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Pembangunan (A5). Manfaat yang diterima karena peluang bagi peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan, baik yang berasal dari dana perimbangan maupun yang berasal dari potensi keuangan.
- g. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (A6). Manfaat yang diterima masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur dan pelayanan fasilitas dan utilitas.
- h. Peningkatan Kemandirian Ekonomi (A7). Manfaat yang diterima memungkinkan pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta serta mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan serta pengembangan ekonomi sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

D. Tingkat 4: Alternatif

- a. Alternatif I yaitu pemantapan peran dan fungsi kawasan ibukota Gerung.
- b. Alternatif II yaitu penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua
- c. Alternatif III yaitu pemekaran daerah

2. Hierarki Beban

A. Tingkat 1: Fokus

Beban dalam rangka mewujudkan kota yang ideal sesuai potensi sebagai ibukota dan sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

B. Tingkat 2: Bidang

- a. Pemerintahan. Beban bentuk pengelolaan, meliputi: penyiapan aparatur pengelola pembangunan, rentang kendali pengelolaan pembangunan, penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana dan perangkat peraturan perundang-undangan.
- b. Pembangunan. Beban bentuk pengelolaan ditinjau dari sisi pembangunan antara lain: pertumbuhan penduduk, restrukturisasi tata ruang, peningkatan pengeluaran pembiayaan pembangunan.
- c. Kemasyarakatan. Beban bentuk pengelolaan dilihat dari sisi Kemasyarakatan, terdiri atas: tuntutan pelayanan masyarakat, biaya transportasi, serta meningkatnya konflik sosial utara-selatan.

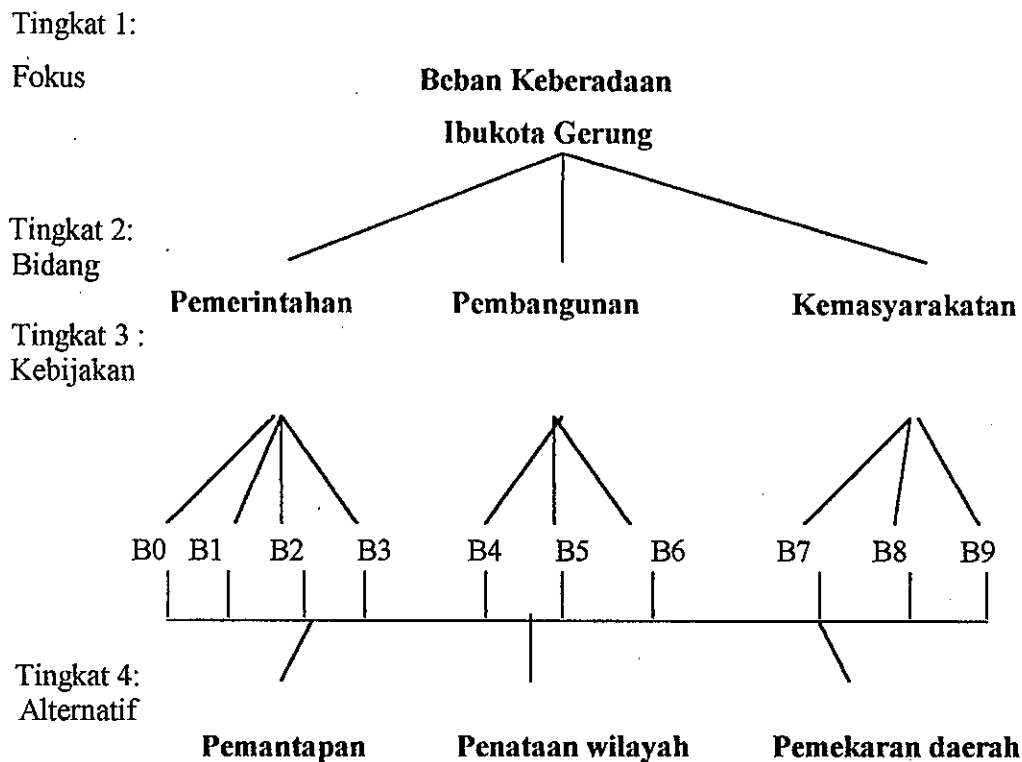
C. Tingkat 3: Kebijakan

- a. Rasio Personil dengan Masyarakat (B0). Beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan biaya, sulit membentuk tenaga tetap
- b. Beban Tugas Aparat Keamanan (B1). Beban kerja yang meningkat sebagai konsekuensi ibukota baru, akibat struktur wilayah
- c. Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat (B2). Beban akibat pemindahan struktur organisasi dan tata laksana sehingga memerlukan penataan kembali perangkat kelembagaan yang ada secara keseluruhan.

- d. Aparat Pemerintah (B3). Beban kesadaran politik masyarakat berbeda, pembentukan kader susah
- e. Mata Pencaharian (B4). Beban akibat meningkatnya jumlah penduduk sehingga membawa tekanan terhadap lapangan kerja dan fasilitas dan utilitas kota.
- f. PAD (B5). Beban yang diakibatkan perubahan dan penataan kembali wilayah sehingga membawa konsekuensi terhadap pembiayaan pembangunan
- g. Hubungan fungsional antar Desa-Kota (B6). Beban keuangan akibat struktur ekonomi memberi dampak pada perkembangan wilayah
- h. RTRW (B7). Beban keterbatasan lahan dimasa datang mengakibatkan harga lahan tinggi.
- i. Kepadatan Penduduk Perkotaan (B8). Beban yang ditanggung tenaga kerja ahli mencari kerja diluar daerah, akibat kesempatan kerja yang ada sedikit
- j. Tingkat Pendidikan (B9). Beban yang ditanggung rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung

D. Tingkat 4: Alternatif

- a. Alternatif I yaitu pemantapan peran dan fungsi kawasan ibukota Gerung.
- b. Alternatif II yaitu penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua
- c. Alternatif III yaitu pemekaran daerah



GAMBAR I.6
HIERARKI BEBAN KEBERADAAN IBUKOTA GERUNG

Sumber Metode PHA Saaty (1993) diolah

Keterangan:

B0 = Rasio personil dengan masyarakat

B1 = Beban tugas aparat keamanan

B2 = Tingkat dukungan partisipasi masyarakat

B3 = Aparat pemerintah

B4 = Mata pencaharian

B5 = PAD

B6 = Hubungan fungsional antar daerah-kota

B7 = RTRW

B8 = Kepadatan penduduk perkotaan

B9 = Tingkat pendidikan

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi dan kerangka berpikir, yang menjadi landasan berpikir peneliti

BAB II. KAJIAN TEORI STRUKTUR PERWILAYAHAN DALAM KONTEKS PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN KECAMATAN

Menjelaskan teori-teori, pustaka dan hasil-hasil studi yang ada keterkaitannya dengan permasalahan studi, hingga dapat menjawab permasalahan secara teoritis.

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN KECAMATAN

Menceritakan informasi, data dan deskripsi tentang wilayah studi, dalam hal ini kedudukan Gerung akibat dari pemindahan ibukota dan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat sebagai akibat pemindahan ibukota, sebelum dan sesudah, untuk dapat menggambarkan arahan struktur perwilayahan dimasa akan datang.

BAB IV. ANALISIS STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

Analisis dalam bab ini bertujuan melihat arah struktur perwilayahan. Terdiri dari: Analisis wilayah, Skalogram, Indeks Sentralitas Marshall, Gravitasi dan Titik Henti (Hierarki Pelayanan), *LQ* dan *Shift-Share* (sektor basis), Analisis Kependudukan, Analisis Keruangan dan PHA (Manfaat dan Beban dari pemindahan ibukota Kabupaten Lombok Barat).

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dipakai sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam menentukan struktur perwilayahannya.

BAB II

STRUKTUR PERWILAYAHAN DALAM KONTEKS PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN KECAMATAN

2.1. Struktur Keruangan Kota

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan yang baik yang terencana maupun tidak terencana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992. wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hierarki dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan, seperti pusat kota, pusat pemerintahan, infrastruktur dan sebagainya. Struktur kota sendiri merupakan suatu gambaran diagramatis yang menunjukkan posisi fasilitas, hubungan dan hierarki kawasan.

Struktur keruangan kota tidak terlepas dari bentuk-bentuk penggunaan lahan perkotaan. Struktur kota dapat dilihat dari tiga aspek yaitu (Yunus, 2000) :

1. Struktur ekonomi kota yang menunjukkan kegiatan ekonomi yang diselenggarakan penduduk kota
2. Struktur sosial kota, merupakan struktur yang memperlihatkan adanya tingkatan yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat kota
3. Struktur fisik kota dapat diartikan suatu kesatuan yang kompleks yang dibentuk oleh unsur-unsur kegiatan fungsional kota seperti tempat tinggal, tempat berkarya, tempat berkreasi serta sebagai unsur jaringannya yang satu sama lain mempunyai sifat hubungan timbal-balik.

Sedangkan mengenai pembentukan struktur ruang kota ini, secara terperinci Chapin mengatakan ada tiga sistem kunci yang sangat berpengaruh, yaitu sistem kegiatan/aktivitas, sistem pembangunan dan sistem lingkungan (Chapin, 1979 : 28-31).

Sistem aktivitas ini merupakan perwujudan dari adanya kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan sistem pembangunan adalah sistem pembangunan lahan yang ada di kota tersebut. Pada prinsipnya pembangunan ini meliputi usaha merubah maupun mengembangkan ruang-ruang yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya sebagai wadah dari berbagai kegiatan yang ada di kota tersebut. (Yunus, 1982)

Menurut Herbert dalam Yunus (2000:107) struktur dan bentuk kota merupakan dua unsur yang saling berpengaruh. Bentuk dapat diartikan sebagai suatu penampilan fisik yang terjadi karena adanya suatu kompleks struktur sebagai kerangka dasarnya serta tekstur yang spesifik. (Jayadinata, 1999: 179)

Dengan demikian 'struktur' merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh unsur-unsur fungsional yang satu sama lain mempunyai sifat saling mempengaruhi. Jadi struktur kota adalah suatu kegiatan fungsional kota seperti tempat tinggal, tempat berkarya, tempat berekreasi serta berbagai unsur jaringannya. Sedangkan 'bentuk' diartikan sebagai suatu penampilan fisik yang terjadi karena suatu kompleks struktur sebagai kerangka dasarnya serta tekstur yang spesifik. Jadi bentuk kota merupakan penampilan bentuk atau morfologi fisik kota yang terjadi karena adanya suatu kerangka struktur kegiatan fungsional kota itu satu sama lainnya berhubungan. Secara struktural, unsur-unsur pembentuk kegiatan internal kota terdiri dari kegiatan fungsional, wujudnya dalam bentuk bangunan dan prasarana. Secara sistem, unsur-unsur struktural ini dapat dikelompokkan menjadi apa yang disebut sebagai sistem aktivitas kota yang pada umumnya terdiri dari sektor produksi;

sarana angkutan; tempat tinggal; pelayanan sosial dan kesejahteraan; pelayanan perekonomian; rekreasi; prasarana perangkutan; prasarana utilitas umum (Sujarto, 2000).

2.1.1. Pengertian Kota

Kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya (Bintarto, 1987).

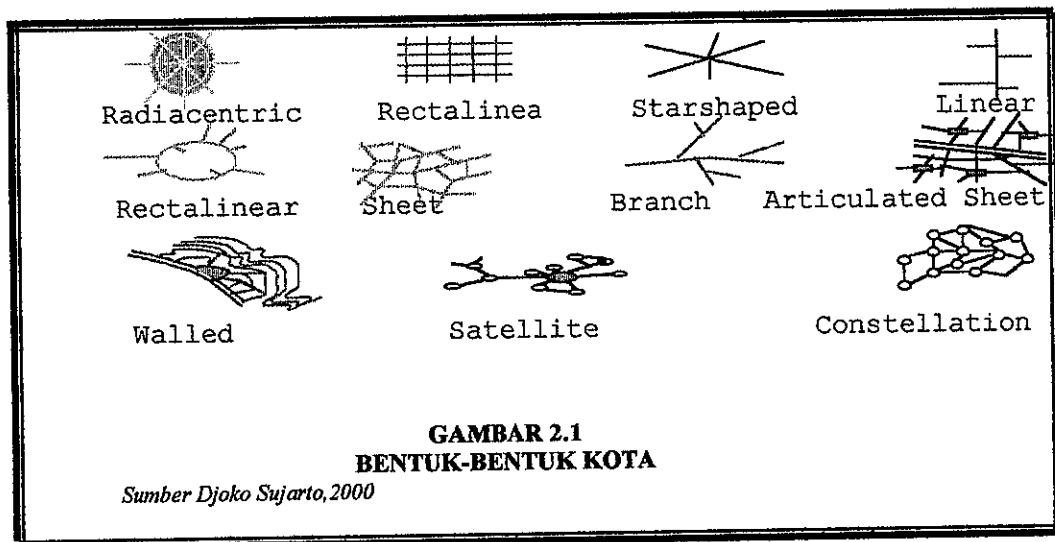
Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk kenampakan fisik dari lingkungan kota. Smailes (1955) dalam Yunus (1994) memperkenalkan tiga unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan, pola-pola jalan dan tipe atau karakteristik bangunan. Sementara itu Conzen (1962) dalam Yunus (1994) juga mengemukakan unsur-unsur yang serupa dengan dikemukakan Smailes, yaitu *plan, architectural style, and land use* (Yunus, 1994).

Perkembangan fisik kota menurut Northam (1975) merupakan ekspansi konsentrasi kota yang meliputi konversi lahan di wilayah pinggiran dari penggunaan yang *non-urban* menjadi penggunaan lahan yang bersifat kekotaan (Firman, 1997: 196-197)

Sedangkan menurut Djoko Sujarto (2000) bentuk kota antara lain :

- a. Radiacentric : suatu bentuk yang mengikuti struktur jaringan berbentuk jari-jari.
- b. Rectalinier : suatu kota yang dibentuk oleh suatu pola gridiron. Pola ini ditunjukkan terutama pada kota-kota besar di Amerika Serikat.
- c. Starshaped : bentuk kota yang terjadi karena adanya pertumbuhan yang secara linier mengikuti jaringan jalan bermula dari bagian pusat kota.
- d. Linier : pola yang berkembang memanjang jaringan jalan utama.

- e. Ring : suatu bentuk cincin yang melingkari suatu kegiatan utama seperti pusat kegiatan, fungsi dominan dan lain-lain di bagian tengah kota.
- f. Sheet : suatu kota yang berkembang secara melebar mengikuti suatu struktur jaringan yang tidak berpola.
- g. Branch : suatu bentuk kota yang mengikuti jaringan jalan yang bercabang-cabang.
- h. Walled : suatu bentuk yang ditentukan oleh adanya batasan berupa dinding, misalnya suatu wilayah tebing yang membatasi kota.
- i. Satellite : bentuk kota kecil tersendiri yang fungsional tergantung pada suatu kota induk.
- j. Konstelation : pola kota besar dengan fungsi dan tingkatan yang relatif sama.



Dari pernyataan di atas, pola ruang suatu kota terbentuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: fasilitas dan utilitas penunjang aktivitas, aksesibilitas dan aktivitas ekonomi. Pusat kota yang merupakan daerah sebagai tempat aktivitas dan pelayanan kota utama yang biasanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan-jasa, pusat pelayanan dengan intensitas bangunan yang cukup tinggi.

2.1.2. Aspek-aspek kota

Aspek-aspek kota menurut Widyaningsih (2001:34-36) :

1. Aspek Fisik

Meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan atau pengaturan penggunaan tanah, dan ruang yang merupakan sumber daya alam. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang terencana atau tidak, meliputi penggunaan dan rencana penggunaan lahan, kebutuhan dan keinginan individu, sarana dan prasarana transportasi, tipe dan fungsi bangunan, kegiatan individu atau kelompok yang rutin, kependudukan, potensi fisik serta persepsi dan perilaku.

2. Aspek sosial

Menyangkut masalah kependudukan antara lain adalah masalah perkembangan, migrasi, aktifitas ekonomi, tenaga kerja dan beban ketergantungan. Dalam perencanaan penduduk dapat menjadi indikator perkembangan kota, yang salah satu aspeknya adalah pergerakannya.

3. Aspek-aspek yang menyangkut sumber daya manusia terdiri atas keadaan penduduk (jumlah, sebaran, struktur, agama, pendidikan, pendapatan), proses penduduk (alamiah dan buatan) dan lingkungan sosialnya (pola kontrol, kegiatan dan konstruksi).

4. Aspek Ekonomi

Fungsi dasar kota menurut Branch (1996:71) adalah untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari tiga bagian: (1) ekonomi pemerintah meliputi pelaksanaan pemerintahan kota; (2) ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta; (3) ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi nirlaba. Menurut Koestoer (2001: 6), dinamika ekonomi kota, dapat ditandai oleh

penyebaran sektor-sektor ekonomi kota, penyebaran pasar, nilai tanah serta pergeseran penggunaan tanah. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini ditekankan pada pembangunan ekonomi. Dominasi kegiatan sektoral akan mempengaruhi secara fisik perkembangan fisik kota terutama menyangkut aspek tata guna tanah dan aksesibilitas dalam segi transportasi.

2.2. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Pertumbuhan suatu kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Mekanisme inilah menjadikan kota tumbuh. Secara umum kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam di dalam kota yang bersangkutan.

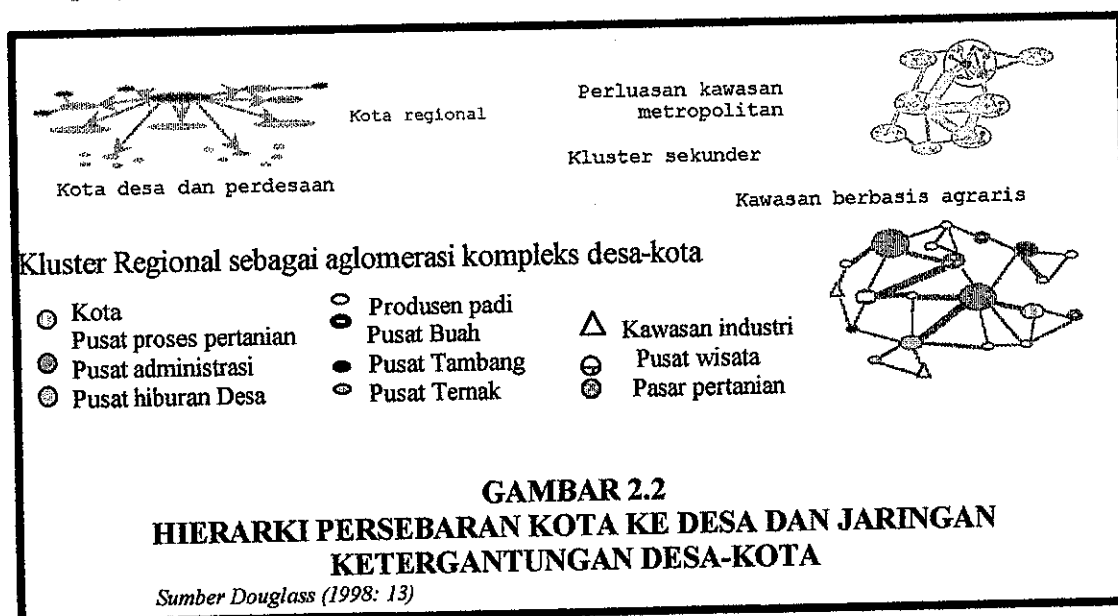
Tingkat pertumbuhan dan perkembangan setiap kota tidak sama tergantung pada faktor-faktor perkembangannya. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam perkembangan kota dan dapat bersifat negatif atau bermasalah untuk perkembangan kota. Faktor-faktor perkembangan kota dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Sisi internal perkembangan kota disebabkan oleh aktivitas sosial ekonomi, perkembangan penduduk dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya, sedangkan sisi eksternal perkembangan kota disebabkan perkembangan ekonomi daerah belakang dan interaksi antara kota dengan wilayah di sekitarnya (Sujarto, 2000: 10).

Menurut Raharjo dalam Widyaningsih, (2001: 53) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota adalah penduduk (keadaan, proses,

lingkungan sosial), lokasi yang strategis, fungsi kawasan perkotaan, kelengkapan fasilitas sosial ekonomi, kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, faktor kesesuaian lahan dan faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa proses pertumbuhan kota berlangsung secara alami dan dapat juga direncanakan. Bentuk perencanaan tersebut yang paling kuat mempengaruhi arah perkembangan dan pertumbuhan kota adalah kebijakan pemerintah daerah.

Suatu kota tumbuh dan berkembang sesuai dengan peranannya sebagai fungsi untuk malancarkan pengawasan (administratif-politis), pusat pertukaran (komersial) dan untuk memproses bahan sumberdaya (industrial). (Daldjoeni, 1987).

Fungsi tersebut menyatakan bahwa kota merupakan pusat aktivitas bagi daerah sekitarnya, fungsi kota inilah yang kemudian mampu menarik aktivitas di dalamnya sehingga kota tumbuh seiring pertumbuhan aktivitas yang terjadi. Disamping itu kota mengandung empat hal utama yang menjadi faktor penarik aktivitas penduduk baik lokal maupun pendatang yaitu; menyediakan fasilitas perdagangan bagi penduduk; menyediakan lahan usaha bagi penduduk; membuka kemungkinan munculnya usaha jasa dan mempunyai kegiatan industri (Friedmann, 1974).



Dari gambar arah pertumbuhan kota tersebut dapat terlihat bahwa suatu kota cenderung berkembang mengikuti aktivitas pusat kotanya. Pertumbuhan ruang kota akan sangat di pengaruhi oleh jarak ke pusat kota, sehingga semakin dekat dengan pusat kota aktivitas yang terjadi semakin padat. Dan seiring perkembangan aktivitas yang terjadi aktivitas kota akan cenderung tumbuh ke pinggiran kota mengikuti jalur transportasi yang ada.

2.2.1. Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Dalam pertumbuhan kota, pusat kota menempati lokasi sentral dengan jarak jangkauan yang relatif mudah dari semua bagian kota dan mempunyai intensitas bangunan yang tinggi atau padat (Branch, 1996). Karena itu pusat kota ditandai dengan adanya konsentrasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdiri dari pasar dan pertokoan, di samping itu pusat kota juga biasanya merupakan pusat perkantoran

Dalam proses pertumbuhan suatu kota akan mengalami beberapa macam perubahan, Ractliff dalam Hendarto (1997:2) mengemukakan ada empat macam perubahan, yaitu :

1. Perluasan fisik (*lateral expansion*), yaitu pengisian dan perluasan areal ke arah pinggiran kota yang umumnya terjadi disepanjang jalur jalan utama regional dan pembentukan wilayah-wilayah baru di kawasan pinggiran kota.
2. Perubahan struktur kota akibat pergeseran internal (*internal shift*), yaitu perubahan struktur kota akibat pergeseran penggunaan yang disebabkan adanya penyesuaian penggunaan terhadap kebutuhan pelayanan yang baru

3. Pergerakan wilayah perumahan (*development of resident areas*), yaitu perpindahan atau pergerakan wilayah perumahan karena motif-motif ekonomi dan kebutuhan sosial penduduk.
4. Pergantian fungsi ekonomi (*economic of succession*), yaitu akibat adanya peningkatan nilai lahan

2.2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota cenderung tumbuh seiring dengan penambahan penduduk. Lokasi yang strategis, kelengkapan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kemampuan ekonomi wilayah belakang yang kuat akan membuat suatu kota cenderung lebih cepat berkembang. Pada umumnya terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota menurut Hendarto (1997) sebagai berikut :

- a) Faktor Penduduk, yaitu adanya pertumbuhan penduduk baik yang disebabkan oleh penambahan alami dan atau karena migrasi.
- b) Faktor Sosial Ekonomi, yaitu berkaitan dengan kegiatan usaha masyarakat.
- c) Faktor sosial budaya, yaitu menyangkut perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh dari luar atau akibat dari luasnya komunikasi dan sistem informasi antara kota tersebut dengan kota-kota lainnya.

Sedangkan masalah yang muncul biasanya akan menjadi kontra produktif (menghambat) bagi perkembangan kota. Beberapa hal diantaranya seperti: pertumbuhan penduduk, pola penggunaan ruang,, tumbuhnya sektor informal.

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda (Yunus, 1978: 2). Menurut

Yunus (1994), untuk menyoroiti perkembangan kota, dibandingkan keadaan periode waktu. Kaitannya dengan faktor waktu, (1) semakin banyak titik waktu yang digunakan sebagai dasar pembandingan adalah semakin baik, dan (2) bahwa makin lama jangka waktu yang digunakan akan semakin baik.

2.3. Pengembangan Kota sebagai Ibukota pada Wilayah Baru

Ibukota merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahannya, dimana ada sekelompok orang – orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis (Poerwadarminta, 1982 : 368).

Ibukota kabupaten merupakan pusat pemerintahan pada dasarnya tempat kedudukan suatu administrasi pemerintah yang bersifat membawahi (mensubkordinasi) beberapa kota/wilayah wewenangnya. Pusat pemerintahan adalah lokasi perkantoran untuk semua kepentingan khusus yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan/tujuan perorangan maupun kelompok, lembaga legislatif, dan pemerintah (Eisner, 1993).

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah setempat bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat diwilayah-wilayah pengaruhnya (Christaller dalam Glasson, 1974).

Dalam kaitannya disini pemerintah daerah harus mampu melayani, mengawasi dan mengontrol proses pembangunan, perubahan dan realisasi potensi sumberdaya wilayah berupa perubahan fisik, ekonomi, dan sosial-politik yang saling mempengaruhi (Hilhorst, 1990).

Perubahan yang dimaksud dalam pembangunan dalam batasan wilayah yang ada adalah perubahan struktur wilayah, ditandai dengan terbentuknya spesialisasi dan

pembentukan hierarki kota. Struktur wilayah yang tidak seimbang, ditandai dengan peningkatan peringkat keseimbangan kota dalam suatu wilayah.

2.3.1. Pengertian Ibukota Kabupaten

Dari batasan-batasan yang dimiliki suatu kabupaten dapat disimpulkan bahwa ibukota kabupaten merupakan hal wajib dimiliki suatu kabupaten. Menurut Majid Ibrahim, setiap wilayah baik wilayah administratif maupun wilayah pembangunan mempunyai kota besar, sedang dan kecil sebagai pusatnya. Wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten dan kecamatan masing-masing memiliki ibukota sebagai pusat yang merupakan kota terbesar yang terdapat dalam lingkungan daerahnya (Ibrahim dalam Neonufa, 1999).

Secara khusus suatu ibukota dapat dikemukakan berdasarkan beberapa ketentuan perundangan sebagai berikut ;

1. Pada undang-undang No 18 tahun 1965 (UU tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah terdahulu yaitu sebelum diganti oleh Undang Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok pemerintahan di Daerah) dinyatakan bahwa secara yuridis ibukota kabupaten merupakan suatu pusat administrasi pemerintah yang setingkat dengan kotamadya yang menempatkan kegiatan fungsional pemerintah yang mengurus dan menyelenggarakan segala kegiatan administrasi (dalam arti mengurus, melayani, dan mengontrol kegiatan administrasi) dan pemerintahan dibawahnya (kecamatan) di wilayahnya.
2. Ibukota kabupaten merupakan alat penghubung (komunikator) dari dan ke pemerintahan daerah tingkat I (provinsi), antar daerah tingkat II di dalalam suatu provinsi serta menjaga kesatuan wilayah administrasinya

3. Ibukota kabupaten sebagai suatu kota harus dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik suatu wilayah kabupaten.

Perencanaan suatu ibukota kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan pengembangan kota secara umum. Namun dalam beberapa bagian memiliki karakteristik khusus yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu fungsi yang spesifik adalah pusat pemerintahan dapat mewakili fungsi kota yang lebih kompleks karena selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kota tersebut harus mewedahi fungsi-fungsi kegiatan kota yang lain dan menunjang keberlanjutan kota tersebut (Sujarto,2000).

2.3.2. Kedudukan Ibukota Kabupaten

Ibukota kabupaten memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan daerah-daerah lain yang berada dalam lingkup ibukota kabupaten. Peran tersebut tidak lepas dari kewenangan kabupaten terhadap wilayah yang terdapat didalam wewenangnya. Dari kewenangan yang ada maka ibukota kabupaten sebagai wadah untuk menampung kegiatan kabupaten merupakan tempat kedudukan administrasi pemerintahan yang bersifat mensubordinasi beberapa kecamatan didalamnya. Ibukota kabupaten merupakan fokus riil bagi kehidupan regionalnya (Fawcet dalam Glasson, 1974).

Ibukota kabupaten merupakan kota utama yang memiliki tingkatan pelayanan paling tinggi dan kedudukan paling dominan. Dari hierarki pelayanan di negara berkembang yang terbagi menjadi empat bagian, ibukota kabupaten termasuk tingkatan kota utama (Primate City). Empat tingkatan hirarki pelayanan tersebut (Rondinelli, 1978 : 64-65, 175-180) antara lain :

1. Pusat Desa (*Village Centre*)

Merupakan permukiman dengan kriteria sebagai pusat yang menyediakan pelayanan dasar dan berbagai fasilitas untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian bagi desa, memiliki fasilitas untuk memacu kegiatan non pertanian dan meningkatkan produktifitas pertanian, menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah perdesaan, memiliki organisasi kemasyarakatan yang dapat meningkatkan partisipasi penduduk dalam melaksanakan pembangunan, dan terakhir terletak pada titik simpul yang menghubungkan dengan kota kecil dan pusat wilayah.

2. Kota Kecil/Kota Pasar (*Market Town: Small City*)

Berfungsi sebagai tempat kegiatan pemasaran terutama produk pertanian dan berperan dalam menghubungkan kehidupan perkotaan dan perdesaan. Hal ini tercipta dengan adanya fasilitas dan kelembagaan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan barang dan jasa ke kota yang lebih besar.

3. Kota Menengah : Pusat Wilayah (*Regional Centre*)

Berperan dalam transformasi dan pengembangan ekonomi wilayah secara struktur ruang, menyerap penduduk migran dari desa dan menciptakan mekanisme agar penduduk tersebut dapat menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi kota.

4. Kota Utama (*Primate City*)

Memiliki tingkat pelayanan paling tinggi dan berperan sebagai pusat utama dan memiliki kedudukan paling dominan. Kegiatan yang ada didalamnya antara lain komersial, jasa, administrasi pemerintahan, pendidikan, industri dan perdagangan

dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami transformasi menuju ke kegiatan tersier.

Sesuai dengan UU No 5/1974 tentang : “Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, maka fungsi dan peranan pemerintah daerah tingkat II kabupaten antara lain sebagai berikut (Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan, Departemen Dalam Negeri, april 1982, hal 4-6, Pedoman Pemindahan Ibukota Kabupaten):

1. Bidang otonomi daerah : hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
2. Bidang urusan pemerintahan umum meliputi bidang-bidang ketentraman, ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya.

2.3.3. Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten

Dalam tulisan sebelumnya ditegaskan bahwa ibukota harus dapat menyebarkan pembangunan secara merata. Dari kedudukan ibukota sebagai penyebar investasi yang memberikan keuntungan bagi wilayah disekitarnya maka tiga unsur penting bagi terselenggaranya kegiatan di Ibukota sebagai pusat pelayanan (Daldjoeni, 1992:101-104, Glasson, 1977:134-135) adalah :

- Hierarki, yaitu tingkatan pelayanan dimulai dari pelayanan tingkat rendah di pusat kecil sampai pelayanan tingkat tinggi yang terdapat di pusat besar (kota besar). Dengan demikian kota besar memiliki hampir semua jenis dan jumlah pelayanan secara terbatas.

- Penduduk ambang, yaitu jumlah penduduk minimum yang dapat mendukung kegiatan pelayanan. Jenis fasilitas tertentu membutuhkan penduduk ambang (Threshold population) yang berbeda.
- Lingkup besar, yaitu jarak maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk untuk mencapai suatu pusat pelayanan. Jika di luar jarak pelayanan maka mencari pusat lain. Lingkup pasar hampir sama dengan batas pengaruh suatu pusat pelayanan.

Dengan berdasarkan pernyataan tersebut serta kajian sebelumnya dapat diambil suatu kriteria penentuan lokasi ibukota kabupaten. Mengingat peranan ibukota kabupaten sangat penting untuk mendukung pengembangan wilayah, maka dalam penentuan lokasi ibukota kabupaten harus berfungsi optimal. Berfungsi optimal dalam arti bahwa dalam menentukan lokasi ibukota kabupaten harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung fungsi ibukota kabupaten.

Dari pola pemindahan ibukota kabupaten yang ada bisa dilihat lokasi ibukota lama rata-rata berada pada posisi sentral terhadap wilayah pengaruhnya. Posisis sentral ini diukur dari kesamaan jarak jangkauan pelayanan dan kemudahan akses jangkauan pelayanan. Bila dilihat dari bentuk wilayah kabupaten dari beberapa kasus yang melakukan pemindahan ibukota dapat dibagi dalam berapa kategori: kabupaten berbentuk pipih membujur, kabupaten yang berbentuk pipih melintang, kabupaten yang berbentuk persegi empat atau cendrung membelah, dan berbentuk segitiga. Dari semua bentuk tersebut ibukota lama dari kasus pemindahan tadi secara relatif berada pada posisi sentral.

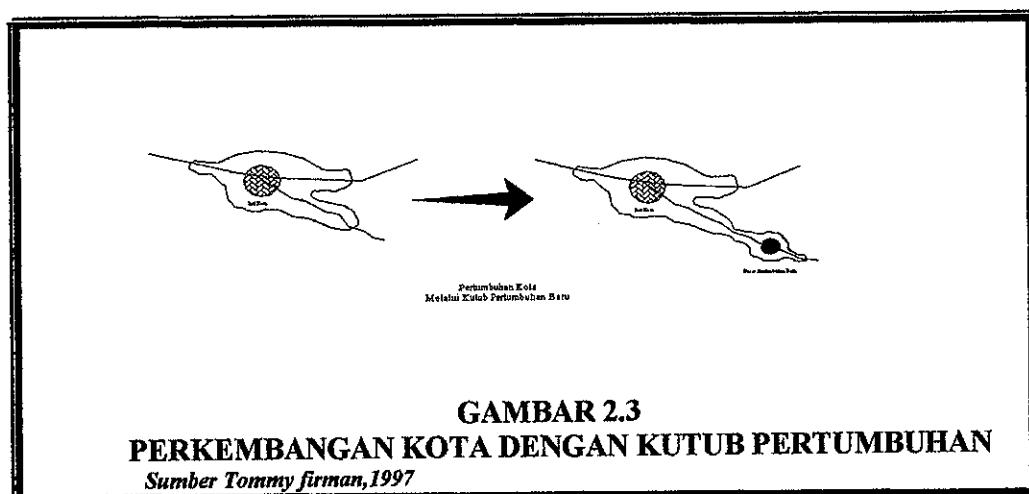
Perkembangan dari posisi ibukota yang berbentuk sentral ini cenderung mengalami kecepatan pertumbuhan karena adanya kosentrasi dari segala arah wilayah pengaruhnya. Faktor inilah yang menyebabkab ibukota kabupaten bersangkutan membutuhkan pelayanan

kelembagaan yang terimplikasi dengan adanya kelembagaan otonom. Implikasi dari daerah otonom inilah yang mempengaruhi konstilasi struktur wilayah keruangan dari wilayah pengaruh. Kabupaten yang ibukotanya berubah status menjadi otonom akhirnya dihadapkan pada penentuan lokasi baru yang sebisa mungkin atau yang harus relatif sama pelayanannya terhadap wilayah pengaruh seperti ibukota lama/sebelumnya.

Pada kasus pemindahan ibukota di Indonesia (tabel I.1) terlihat bahwa lokasi ibukota baru pada kabupaten berbentuk membujur atau melintang adalah ditempatkan di kawasan yang merupakan area pertumbuhan baru/lahan kosong, kota kedua di ibukota lama dan daerah antara dua kota kedua.

2.3.4. Dampak Keberadaan Pusat Pertumbuhan Baru Terhadap Perkembangan Struktur Ruang Kota

Fenomena dengan munculnya pusat pertumbuhan baru adalah arah perkembangan kota yang lebih menyebar ke pinggiran kota pada kawasan pertumbuhan baru. Pembangunan kota tidak lagi terpusat dengan adanya pusat pertumbuhan yang membutuhkan ketersediaan infrastruktur kota (fasilitas dan utilitas) untuk memenuhi permintaan terhadap kebutuhan dan pelayanan masyarakat.



Dari gambar tersebut dapat dilihat adanya pengaruh keberadaan pusat pertumbuhan yang berkembang di pinggiran kota dengan tarikan aktivitas ke kawasan tersebut terhadap perubahan dalam ruang kota. Hal ini berpengaruh juga terhadap strategi dalam pemerataan pembangunan dan pemekaran kota .

Oleh Karena itu Hauser, et al, 1985, dalam bukunya "Penduduk dan Masa Depan Perkotaan-Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan", menyatakan dampak dari keberadaan sebagai ibukota, sebagai berikut :

- a. Didalam analisa keadaan dasar, adalah menilai kondisi eksisting pada saat sekarang
- b. Analisa kecendrungan perkembangan yaitu mengenai kecendrungan sejak masa lalu sampai sekarang dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan.
- c. Analisis sistem serta kebutuhan ruang, yaitu menilai hubungan ketergantungan antara sub sistem antar fungsi dan pengaruhnya apabila sistem dan fungsi itu berkembang serta perhitungan ruang yang dibutuhkan di kota sekitarnya sebagai akibat perkembangan dimasa depan
- d. Analisa kemampuan pengelolaan pemerintah kota yaitu menilai kondisi keruangan daerah, organisasi pelaksana dan pengawasan, personalia, baik pada saat sekarang maupun yang diperlukan dimasa depan

2.3.5. Manfaat dan Beban Pusat Pertumbuhan Baru

Perkembangan suatu wilayah tentunya membawa akibat atau dampak atau pengaruh, terutama pada fungsi utama kota sebagai ibukota kabupaten. Dalam hal ini fungsi kota sebagai (UU NO 22/1999):

1. Pemerintahan, dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten, berarti mengakibatkan status dan kedudukan menjadi jelas dan meningkat, yaitu sebagai ibukota kabupaten.

Hal ini mempengaruhi suatu kota sebagai ibukota kabupaten secara internal dan keseluruhan wilayah administrasi dari kabupaten itu sendiri secara eksternal.

2. Pembangunan, dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten otomatis berdampak langsung dalam pembangunan daerah
3. Kemasyarakatan, dalam bidang kemasyarakatan ini memberi dampak bagi perkembangan penduduk kabupaten, disamping itu karena fasilitas sosial terjadinya mobilitas penduduk masuk ke wilayah ibukota kabupaten. Terutama dalam pemberian pelayanan publik.

Sebagai ibukota kabupaten berperan sebagai administrasi pemerintahan yang merupakan pusat kelembagaan dan informasi. Proses ini dipengaruhi oleh faktor fisik atau non-fisik, seperti fisik, ekonomi, kependudukan, sosial, pola pelayanan, administratif, politik dan kelembagaan, serta teknologi (Rondinelli, 1978)

Manfaat pemindahan ibukota adalah suatu perubahan yang terjadi dari perkembangan dari sebuah kota mengarah ke arah yang positif dan memberi dampak yang diarahkan sebagai bagian yang ingin dicapai. Sedangkan Beban pemindahan ibukota merupakan permasalahan – permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat dari pemindahan tersebut dan perlu diperhatikan guna ditangani penyelesaiannya hingga tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan pembangunan. Dampak ini dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung (Otto Sumarwoto, 1988)

Dalam kaitannya dengan kajian ini manfaat dan beban diarahkan sebagai perubahan karakteristik yang dapat mempengaruhi karakteristik pada tingkat fungsi dan pelayanan kota terhadap publik terkait pada masa yang akan datang dari struktur perwilayahan, berupa perubahan secara fisik, ekonomi, dan sosial yang saling mempengaruhi (Hilhorst, 1990).

Berdasarkan kriteria-kriteria manfaat dan beban pemindahan ibukota yang dikemukakan di atas, maka implikasi yang terjadi adalah pada tiga kondisi (Hasil Analisis,2004):

a. Berdampak positif bagi kemajuan daerah;

Dampak positif ditandai oleh terjadinya perubahan struktur keruangan melalui penataan wilayah yang dapat memajukan wilayah, mengurangi kesenjangan antarkawasan dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat.

b. Berdampak negatif bagi kemajuan daerah;

Dampak negatif ditandai oleh terjadinya anomali pada masyarakat berupa ketidakpuasan atas kondisi yang dihadapi. Kondisi ini akan semakin berkembang sebagai aspirasi apalagi sistem yang strukturalis menyebabkan tidak bisa dikembangkannya potensi sumberdaya yang dimiliki. Bentuk sikap ini kemudian berwujud pada upaya pemekaran daerah

c. Tidak berdampak atau stagnan dengan kondisi sebelumnya.

Kondisi stagnan yaitu suatu keadaan yang tidak terdapat perbedaan nyata antara sebelum pemindahan dan sesudah pemindahan akan disikapi oleh terjadinya upaya-upaya pemantapan perkembangan yang sudah ada dan meningkatkan upaya pembangunan pada kawasan yang relatif tertinggal.

Atas dasar tiga kemungkinan tadi, maka alternatif yang dapat diajukan atas pemindahan ibukota adalah (Hasil Analisis 2004):

1) Pemantapan peran dan fungsi ibukota baru

Peningkatan fungsi ibukota baru sebagai pusat pemerintahan, yang memiliki struktur perwilayahan tiap daerah berbeda. Berdampak pada cara atau strategi yang digunakan hingga kota tersebut dikatakan sebagai ibukota kabupaten layak untuk membina

wilayahnya (dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan sesuai dengan fungsi kota sebagai pusat wilayah)

2) Penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua

Pembangunan ibukota, sebagai ibukota kabupaten harus memenuhi syarat dengan meningkatkan manajemen kota, mampu mendukung fungsi kota sebagai ibukota kabupaten dan penambahan sarana dan prasana dalam menunjang memberi pelayanan kepada daerah belakang diwilayahnya dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemanfaatan fungsi kota-kota kedua

3) Pemekaran wilayah

Hal ini ditimbulkan karena ketidak siapan suatu kota menjadi ibukota kabupaten, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga apa yang terjadi dilapangan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menimbulkan dampak-dampak yang sifatnya lebih menjadi beban baik bagi pemerintah maupun masyarakat, ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah.

Secara umum, kota-kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan berkembang secara bertahap dan sangat tergantung pada potensi wilayah. Rondinelli memiliki pandangan mengenai interaksi keruangan, perubahan yang dikatakan sebagai manfaat dan beban pemindahan ibukota dapat dilihat dalam empat aspek utama yaitu fisik keruangan, ekonomi, sosial kependudukan dan administrasi kelembagaan (Rondinelli, 1978, 141-147)

1. Aspek Fisik Keruangan

Manfaat dan beban yang ditimbulkan pada perubahan fisik, diukur terhadap karakteristik wilayah kajian. Terdiri dari kondisi fisik (tofografi, geologi dan hidrologi) alam dan interaksi kependudukan terhadap jaringan transportasi, pola pemanfaatan

lahan (fungsi lindung, budidaya, pertanian dan non pertanian) serta sarana dan prasarana wilayah

2. Aspek Ekonomi

Ditandai dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan wilayah, dengan melihat pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi akibat adanya interaksi keruangan kaitannya dengan pasar dengan komoditi berbagai jenis barang, modal, dan produksi. Dilihat dari PDRB dalam kurun waktu tertentu atau dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang berkerja pada sektor pertanian dengan non pertanian. Disisi pemerintah, mengukur perkembangan investasi pembangunan, dan pendanaan lainnya. Untuk swasta diarahkan pada peluang pengembangan dan investasi.

3. Aspek Sosial Kependudukan

Manfaat dan beban yang tercermin pada aktivitas perilaku dan pola kehidupan masyarakat, keterkaitannya dengan pergerakan penduduk dan migrasi baik yang bersifat permanen maupun sesaat.

4. Aspek Kelembagaan

Manfaat dan beban terhadap pelayanan masyarakat oleh pemerintah, kaitannya dengan administrasi, politik dan kelembagaan. Khususnya dalam hal ini ibukota sebagai pusat pemerintahan dalam mendorong, menggerakkan dan mengendalikan perkembangan yang terjadi di wilayah pengaruhnya

2.3.5.1. Kriteria Manfaat dalam Perkembangan Kota

Faktor positif perkembangan suatu kota adalah potensi kedudukan kota dalam konstelasi regional. Lokasi geografis yang strategis dan kemampuan ekonomi wilayah belakang yang kuat, membuat suatu kota cenderung lebih cepat berkembang. Selain itu

kemampuan menarik sumberdaya produktif dari luar karena kemampuan menciptakan produksi (pasar input) yang dibutuhkan oleh pasar juga dapat membuat perkembangan kota lebih pesat. Berkaitan dengan hal tersebut, Mochtarrram Karyoedi (1987: 5) menyebutkan tiga faktor positif perkembangan kota yaitu:

- a. Modal dasar, yaitu lahan dalam kota, sumber pendanaan dan penduduk kota;
- b. Penunjang primer, yaitu kegiatan industri dan jasa komersial yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam wilayah sekitar;
- c. Penunjang sekunder atau faktor pembentuk struktur internal kota, yaitu prasarana kota, lingkungan perumahan, fasilitas pelayanan umum dan tenaga kerja.

Ketiga faktor di atas menegaskan bahwa perkembangan suatu kota ditentukan oleh tingkat pertumbuhan populasi, investasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Inilah yang dikemukakan oleh teori Neoklasik sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah.

Seiring dengan wujud fisik perkembangan ekonomi yang dikemukakan di atas, maka fungsi kota sebagai pusat kegiatan ekonomi di satu sisi dan pengelolaan pembangunan kota di sisi lainnya haruslah sejalan. Kriteria dalam melihat pengelolaan pembangunan salah satunya berupa kemampuan dari suatu kota untuk menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan warga.

2.3.5.2. Kriteria Beban dalam Perkembangan Kota

Ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai faktor yang berkecenderungan menimbulkan beban dalam perkembangan kota. Di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang melewati ambang sehingga menimbulkan masalah pada permukiman, penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, sampah rumah tangga, pelayanan kesehatan

serta pendidikan dan ruang terbuka. Selain itu yang tidak kalah pentingnya beban perkembangan kota terlihat juga pada pola penggunaan ruang, lemahnya pengelolaan dan rendahnya pelaksanaan peraturan dan ketertiban hukum, bermunculannya penyakit sosial serta pengaruh-pengaruh negatif pada budaya. Indikasi dari faktor negatif pada pengaturan dan pengelolaan, antara lain: munculnya perumahan-perumahan liar, penggunaan tanah yang tidak teratur, masalah pembiayaan pembangunan, perkembangan fisik kota yang tidak terarah, rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas kota dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kemunculan dari sektor informal adalah beban lain dari perkembangan kota. Sektor informal muncul sebagai eksekutif dari adanya tekanan terhadap berbagai fasilitas kota, sehingga berpengaruh pada kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan tingkat daya serap kesempatan kerja. Jadi kelayakan infrastruktur yang masih minim, peraturan-peraturan yang kurang menunjang bagi penciptaan efisiensi penanam modal, lemahnya kelembagaan pemerintah kota dan lemahnya pembiayaan pembangunan adalah beberapa hal yang merupakan faktor negatif atau masalah dalam perkembangan kota.

2.4. Kesimpulan Kajian Pustaka

Mengingat bahwa salah satu fungsi dari kajian pustaka adalah sebagai dasar pijakan dalam menentukan kriteria penelitian, maka pada sub bab ini akan dilakukan perangkuman pendapat para ahli yang menyetujui mengenai kriteria yang dipergunakan dalam penelitian tersebut. Kriteria ini dipergunakan dalam mengkaji manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten dalam konteks struktur perwilayahan. Dalam kaitannya dengan arahan pengembangan kewilayahan, melandasi para pelaku pembangunan dapat disimpulkan, bahwa pengembangan struktur ruang kota dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti : fisik (pusat pertumbuhan dan hierarki kota), ekonomi (pergeseran dan kinerja perekonomian daerah), Penduduk (pertumbuhan penduduk), sosial-budaya dan administrasi, politik, kelembagaan .

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, sebagai ibukota baru akan memberi dampak manfaat yaitu hal -hal yang dapat dikembangkan kearah depannya dan beban yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan, terkait dengan peran dan fungsi sebagai ibukota terutama dibidang : pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dampak ini ditimbulkan akibat lokasi ibukota, berkaitan dengan pelayanan publik.

Berdasarkan pola pemindahan yang ada (Tabel I.1) dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah Indonesia dalam konteks pemindahan ibukota kabupaten maka secara umum, perubahan yang teridentifikasi sebagai manfaat dan beban akibat pemindahan ibukota dikelompokkan dalam empat aspek utama yaitu aspek fisik keruangan (manfaat dan beban yang diukur terhadap karakteristik fisik dan keruangan wilayah), aspek ekonomi (manfaat dan beban yang dipengaruhi karakteristik perekonomian masyarakat dan wilayah, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi), aspek sosial kependudukan (manfaat dan beban yang terjadi akibat adanya suatu aktivitas pada perilaku dan pola kehidupan masyarakat) dan aspek kelembagaan (manfaat dan beban pelayanana masyarakat oleh pemerintah). Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL II.1
**ASPEK, VARIABEL dan KRITERIA PENELITIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT
 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN**

No	Peran dan Fungsi Ibukota	Aspek	Variabel	Kriteria	Indikator	Kreteria Manfaat	Kreteria Beban	Alternatif
1	Pemerintahan	Administrasi Kelembagaan	Pelayanan	Jangkauan Pelayanan Pemerintahan serta Kecendrungan Dampak terhadap Masyarakat	Jangkauan pelayanan	Kosentrasi Perkantoran	Rasio Personil dengan Masyarakat	PEMANTAPAN IBUKOTA
2	Pembangunan	Fisik Keruangan	Kondisi Fisik Wilayah	Karakter Fisik Wilayah	Kelengkapan, Tekstur Tanah, Keadaan Batuan, dll	Peningkatan Kemampuan Aparatur	Beban Tugas Aparat keamanan	
			Sumberdaya Alam	Potensi Sumber Daya Alam Wilayah	Jumlah, Jenis dan Penyebaran SDA	Efisiensi dan Efektifitas Tugas Pengelolaan Pembangunan	Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat	
			Penggunaan Lahan	Pemanfaatan lahan	Luas, Penyebaran Lahan	Pengembangan Kota dan Wilayah Sekitarnya	Aparat Pemerintah	
			Hierarki Kota	Meningkatkan Jangkauan Pelayanan terhadap Wilayah Belakng	Orde/hierarki kota-kota dan SWP	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Hubungan Fungsional antar Desa-Kota	PENATAAN WILAYAH
			Sarana-Prasarana	Mempromudah Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	Prasarana Dasar		RTRW	
		Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Perubahan Tingkat Perekonomian/Perubahan PDRB	Nilai PDRB			
			Struktur Ekonomi	Mengukur Peran Sektor-Sektor Perekonomian Wilayah	Nilai PDRB per Sektor dan PDRB Lokal	Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Pembangunan	Mata Pencaharian	
			Pembiayaan Pembangunan	Tanggung jawab Pembiayaan Pembangunan	Nilai Investasi	Peningkatan kemandirian Ekonomi	PAD	
3	Kemasyarakatan	Sosial dan Kependudukan	Kuantitas Penduduk	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Penyebaran Penduduk	Jumlah, Kepadatan, Laju Pertumbuhan dan Penyebaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kepadatan Penduduk Perkotaan	PEMEKARAN WILAYAH
			Dinamika Sosial Masyarakat	Pengaruh Norma dan Budaya terhadap Prilaku masyarakat	Interaksi Sosial, Kegiatan Agama, Perekonomian Masyarakat		Tingkat Pendidikan	

Sumber Hasil Pengolahan 1999 dari Direktorat Tata Kota dan Daerah, 1999 dan Rondinelli, 1983, 141-147

Latar Belakang

SEBAB PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Implikasi sebagai pusat pemerintah daerah otonom kabupaten, suatu ibukota harus secara keseluruhan diorientasikan pada kota tersebut. (UU No 20/1999)

Kajian Teori

DAMPAK PEMINDAHAN

Manfaat pemindahan ibukota adalah suatu perubahan yang terjadi dari perkembangan dari sebuah kota mengarah ke arah yang positif dan memberi dampak yang diarahkan sebagai bagian yang ingin dicapai. Sedangkan Beban pemindahan ibukota merupakan permasalahan – permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat dari pemindahan tersebut dan perlu diperhatikan guna ditangani penyelesaiannya hingga tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan pembangunan. Dampak ini dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung (Otto Sumarwoto, 1988)

Analisis

ASPEK PENELITIAN

(Rondinelli, 1983; 141-147)

1. Aspek Fisik Keruangan
 - Makro : Potensi & Permasalahan
 - Mikro : Kebijakan
2. Aspek Kependudukan
3. Aspek Ekonomi
4. Aspek Administrasi Pemerintahan

Kreteria Penelitian

Output

ANALISIS AHP
ALTERNATIF TERPILIH

AKIBAT

Gerung memenuhi syarat sebagai Ibukota, Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat dari Kota Mataram ke Gerung

KEDUDUKAN GERUNG SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN

Peran Ibukota diperhatikan antara lain (Rondinelli, 1985:52-60) :

1. Strategi harus diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi, dengan pemberian akses yang luas bagi perekonomian wilayah.
2. Investasi yang cenderung dipusatkan di kota utama harus didesentralisasikan ke wilayah lainnya.
3. Dalam tata ruang regional, ditempatkan dalam suatu sistem yang secara fungsional saling berkaitan dan terintegrasi. Fungsi dan peranan ibukota ditentukan berdasarkan kegiatan pelayanan dan lingkup pelayanannya.

STRUKTUR PERWILAYAHAN

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan yang baik yang terencana maupun tidak terencana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992. Wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan, seperti pusat kota, pusat pemerintahan, infrastruktur dan sebagainya. Struktur kota sendiri merupakan suatu gambaran diagramatis yang menunjukkan posisi fasilitas, hubungan dan hierarki kawasan.

Sumber hasil analisis 2003

GAMBAR 2. 4

KERANGKA PENELITIAN KRITERIA PENELITIAN MANFAT DAN BEBAN PEMINDAHAN IBUKOTA TERHADAP STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB III

KAJIAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMINDAHAN IBUKOTA

3.1. Kajian Umum Wilayah Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Ibukota Lombok Barat sejak semula terbentuk berada di wilayah Kota Mataram, hingga seiring dengan perkembangannya dan adanya otonomi daerah dengan dikeluarkan Undang-Undang No 19 tahun 1999, dikeluarkan penetapan ibukota baru bagi Kabupaten Lombok Barat berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2000 dari Mataram ke Gerung, sekalipun masa perpindahannya berlangsung baru, namun pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembangunan keterkaitannya dengan kelayakan sebagai ibukota baru untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi wilayah pengaruhnya.

3.1.1. Kondisi Geofisik

3.1.1.1. Letak Geografi dan Luas Wilayah

Kabupaten Lombok Barat terletak diantara 115,46 –116, 28 Bujur Timur dan 8,12 – 8,55 Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut (Gambar 1.1 dan 1.2):

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
3. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Kota Mataram
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 1672,15 Km² dengan ketinggian berkisar antara 0-1000 meter dari permukaan air laut. Keadaan alam sebagian besar daratan, dengan pulau-pukau kecil yang disebut dengan gili. Dataran berada di wilayah bagian tengah, sedangkan wilayah selatan merupakan daerah pegunungan dan perbukitan dengan lahan kering sehingga cocok untuk budidaya tanaman lahan kering (tahunan), sedangkan wilayah utara juga merupakan dataran tinggi lahan basah cocok untuk agrobisnis terutama tanaman hortikultura, dan terdapat gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat yang masih aktif, yaitu Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.775 meter. Rincian luas wilayah Kabupaten Lombok Barat per-kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL III.1.
LUAS KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI PER KECAMATAN
TAHUN 1995 s/d 2000- 2001

Wilayah Pengaruh	1995 s/d 2000			2001		
	Luas	Wilayah	Persentase	Luas	Wilayah	Persentase
	Km ²	Ha	(%)	Km ²	Ha	(%)
Mataram	61,30	6,130	100	61,30	6,130	100
Bayan	329,10	32,910	19,68	329,10	32,910	19,68
Kayangan	-	-	-	126,35	12,635	7,56
Gangga	383,60	38,360	16,79	157,35	15,735	9,41
Tanjung	196,73	19,673	11,77	115,64	11,564	6,92
Pemenang	-	-	-	81,09	8,109	4,85
Gunungsari	123,85	12,385	7,41	89,74	8,974	5,37
Batulayar	-	-	-	34,11	3,411	2,04
Narmada	204,20	20,420	12,22	107,62	10,762	6,44
Lingsar	-	-	-	96,58	9,658	5,78
Kediri	43,10	4,310	2,58	21,64	2,164	1,29
Kuripan	-	-	-	21,56	2,156	1,29
Labuapi	28,33	2,833	1,69	28,33	2,833	1,69
Gerung	132,59	13,259	7,93	62,30	6,230	3,73
Lembar	-	-	-	70,29	7,029	4,20
Sekotong Tengah	330,45	33,045	19,79	330,45	33,045	19,76
Lombok Barat	1.672,15	167,215	100	1.672,15	167,215	100

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat

Melihat luas wilayah perkecamatan tahun 1995 s/d 2000 terlihat kecamatan-kecamatan yang luas wilayahnya diatas 10% adalah Kecamatan : Bayan, Gangga, Tanjung, Narmada, dan Sekotong Tengah dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan ada yang hanya 1-7%, Kecamatan : Labuapi, Kediri, Gunungsari dan Gerung dari luas wilayah kabupaten. Dilihat dari fenomena tersebut perlunya strategi yang dapat mengantisipasi perbedaan luas wilayah dikaitkan dengan sumberdaya alam dan pertumbuhan penduduk, yang ternyata sebarannya banyak terdapat di wilayah kecamatan-kecamatan yang luas wilayahnya dibawah 10%. Untuk itu pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan adanya "otonomi daerah", melalui pemekaran kecamatan baik yang berada di utara, tengah dan selatan. Dengan tujuan lebih memaksimalkan potensi-potensi yang berada di wilayahnya, guna tidak terjadi kesenjangan antar kecamatan. Selain itu untuk pemerataan jumlah penduduk terutama di wilayah tengah yang memiliki mobilitas dan daya tarik tinggi, sehingga orientasi masyarakat baik dalam mencari lapangan pekerjaan, usaha dan tempat tinggal lebih ke wilayah tengah.

3.1.1.2. Kondisi Tofografi

Karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat terbentang dari utara ke selatan, dengan tingkat tofografi, bagian utara dan selatan terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah/datar tersebar luas sampai pantai, ketinggian meningkat dari bagian tengah ke utara sedangkan untuk bagian tengah sebagian besar merupakan lahan datar dan terdapat pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau yang berada diperairan laut maupun yang berada diperairan darat baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenduduk secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan : Sekotong Tengah, Lembar dan

Tanjung), untuk lebih lanjut tingkat ketinggian wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL III.2.
PERTINGKAT KETINGGIAN TANAH (METER) DARI PERMUKAAN LAUT
KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI PER KECAMATAN
TAHUN 1995 s/d 2000- 2001

Wilayah Pengaruh	1995-2000			Jumlah (Ha)	2001			Jumlah (Ha)
	Luas Peningkat	Ketinggian (Ha)			Luas Peningkat	Ketinggian (Ha)		
	100-500	500-1000	1000		100-500	500-1000	1000	
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayan	10,314	9,655	9,767	36610	10,314	9,655	9,767	32,910
Kayangan	-	-	-	-	4,230	3,310	0,970	12,635
Gangga	10,354	6,815	1,986	24631	6,124	3,505	1,016	15,735
Tanjung	7,663	4,411	5,86	19673	4,653	2,211	2,06	11,564
Pemenang	-	-	-	-	3,010	2,200	3,80	8,109
Gumungsari	4,990	3,076	0,301	12385	3,445	1,073	0,201	8,974
Batulayar	-	-	-	-	1,545	2,003	0,100	3,411
Narmada	11,489	5,478	0,584	20420	8,243	4,264	0,321	10,762
Lingsar	-	-	-	-	3,246	1,214	0,263	9,658
Kediri	26	-	-	4320	26	-	-	2,164
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	2,156
Gerung	1,664	0,058	-	8308	1,104	0,043	-	6,230
Lembar	-	-	-	-	0,560	0,015	-	7,029
Sekotong Tengah	69,297	29,531	13,224	169,215	69,297	29,531	13,224	33,045
Lombok Barat				167,215				167,215

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagian besar terlihat pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan laut dengan luas 55,163 Ha atau 32,99% dari luas Kabupaten Lombok Barat, kecuali Kecamatan : Kayangan, Pemenang, Batulayar, Lingsar, Kuripan dan Lembar. Sedangkan ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut seluas 69,297 Ha atau 41,44% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat kecuali Kecamatan : Kayangan, Pemenang, Batulayar, Lingsar, Kuripan, Labuapi dan Lembar. Untuk ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut seluas 29,531 Ha atau 17,66% dari luas Kabupaten Lombok Barat kecuali Kecamatan : Kayangan, Pemenang, Batulayar, Lingsar, Kediri, Kuripan, Labuapi, Gerug dan Lembar. Ini menggambarkan lahan mana yang efektif menjadi lokasi ibukota, ternyata yang layak

menjadi lokasi adalah wilayah tengah seperti Kecamatan : Gunungsari, Narmada, Kediri dan Gerung.

3.1.1.3. Administrasi Wilayah

Wilayah kecamatan dan desa dari tahun 1995-2001, berkembang dari 10 kecamatan dan 102 desa dan 572 dusun berkembang menjadi 15 kecamatan, 110 desa, dan 661 dusun, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.3
JUMLAH DESA DAN DUSUN DI TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 1995 s/d 2000-2001

Wilayah Pengaruh	Jumlah Desa		Jumlah Dusun	
	1995 s/d 2000	2001	1995 s/d 2000	2001
Bayan	8	8	60	60
Kayangan		5		41
Gangga	10	5	75	34
Tanjung	9	5	55	36
Pemcnang		4		19
Gunungsari	17	10	77	43
Batulayar		7		34
Narmada	25	15	122	67
Lingsar		10		55
Kediri	11	7	41	25
Kuripan		4		16
Labuapi	10	10	42	42
Gerung	9	11	61	46
Lembar		4		25
Skotong Tengah	3	5	28	28
Lombok Barat	102	110	572	661

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat

Pemekaran baik itu kecamatan, desa maupun dusun dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan jumlah penduduk, yang nantinya untuk mempermudah pembangunan, sehingga tidak hanya pada wilayah tertentu saja aktivitas kegiatan berlangsung,. Hal ini menghindari terjadinya kesenjangan wilayah. Karena adanya daya tarik suatu wilayah yang lebih kuat dibandingkan wilayah yang lain.

3.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang merupakan obyek dan subyek pembangunan adalah hal yang penting untuk diperhatikan baik perkembangan jumlahnya maupun kebutuhannya. Tingkat perkembangan penduduk Kabupaten Lombok Barat akhir tahun 2001 sebanyak 674.490 jiwa, meningkat dari tahun 1995 yang berjumlah 455.513 jiwa, pertumbuhan penduduk selama periode 1990-2000 rata-rata sebesar 1,37% per tahun.

TABEL III.4.
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN
TAHUN 1995, 1997, 2000, dan 2001

Wilayah Pengaruh	Penduduk (jiwa)			
	1995	1997	2000	2001
Mataram	280.239	299.345	310.128	317.434
Bayan	20.420	31.527	38.169	38.290
Kayangan	-	-	-	32.804
Gangga	47.789	64.148	69.845	37.278
Tanjung	50.052	59.983	65.426	38.892
Pemenang	-	-	-	27.766
Gunungsari	58.038	77.091	82.884	60.158
Batulayar	-	-	-	32.873
Narmada	91.993	115.234	132.236	77.366
Lingsar	-	-	-	54.454
Kediri	50.418	66.565	76.186	48.441
Kuripan	-	-	-	28.279
Labuapi	34.617	43.418	52.163	54.056
Gerung	75.237	89.759	97.096	63.457
Lembar	-	-	-	39.418
Sekotong Tengah	26.949	36.182	40.734	40.958
Lombok Barat	455.513	583.907	665.749	674.490

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari pertambahan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi dan cukup besar di kecamatan-kecamatan yang berada pada hierarki I dan II (Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gerung). Sedangkan

wilayah pengaruh yang berada di posisi hierarki III, tidak terlalu pesat pertumbuhannya, terutama di bagian utara (Kecamatan Bayan) dan selatan (Kecamatan Sekotong Tengah)

3.1.3. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat meliputi penggunaan lahan untuk fungsi yang beragam yaitu permukiman, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, pertambangan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

TABEL III.5.
LUAS KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI MENURUT PENGGUNAAN
TANAH (Ha) TAHUN 1995 - 2001

No	Penggunaan Lahan	1995		2001	
		Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	245,10	1,30	3.816,16	2,28
2	Sawah	25.245,28	15,24	25.253,00	15,10
3	Tegalan	25.212,32	15,32	25.484,60	15,24
4	Perkebunan	30.765,98	19,03	30.644,88	18,33
5	Kolam/Empang	324,10	0,20	435,84	0,26
6	Hutan	77.532,17	42,23	70.527,31	42,18
7	Ladang/Huma	-	-	-	-
8	Padang Rumput/Semak	8.446,19	5,05	8.446,19	5,05
9	Rawa-rawa/Tambak	1.471,02	0,65	1.071,00	0,64
10	Lain-lain	1.535,07	0,92	1.535,07	0,92
	Lombok Barat	167.215,00	100,00	167.215,00	100,00

Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat

Wilayah Kabupaten Lombok Barat hampir dipenuhi oleh hutan memiliki persentase terbesar 42.18% diikuti oleh perkebunan, tegalan, sawah, padang rumput, permukiman, tambak dan terkecil empang dengan persentase 0.26 %, ini menunjukkan potensi terbesar dari Kabupaten Lombok Barat adalah pertanian. Untuk arahan kedepan pemerintah daerah

dapat mengatur strategi struktur perwilayahan yang dapat memanfaatkan potensi wilayah, sehingga dapat tercipta suatu struktur wilayah yang terintegrasi

3.1.4. Kedudukan Perekonomian

Secara umum pendapatan regional merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan atau dengan kata lain pendapatan regional merupakan ukuran atas nilai tambah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah.

TABEL III.6.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL MENURUT LAPANGAN KERJA ATAS
DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 1995,1999,2000 dan 2001 (JUTAAN Rp)

No (1)	Lapangan Usaha (2)	1995 (3)	1999 (4)	2000 (5)	2001 (6)
1	Pertanian	101.680.362	183.116.858	191.678.782	194.880.065
2	Pertambangan dan Penggalian	19.868.577	19.868.577	20.805.763	22.299.617
3	Industri	19.073.766	19.073.766	20.307.838	21.698.925
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	30.346.310	3.346.310	3.458.068	3.547.846
5	Bangunan	50.621.677	50.621.677	53.988.018	57.670.001
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	62.090.171	122.090.171	115.356.230	124.096.484
7	Pengangkutan dan Komunikasi	44.880.894	64.880.894	68.394.690	72.416.441
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.513.673	12.513.673	13.228.608	14.322.916
9	Jasa	88.472.173	88.472.173	88.591.693	89.378.660
	PDRB	310.561.757	563.984.099	575.809.690	600.310.955

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat

Dalam kaitannya dengan identifikasi potensi sektoral yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat, maka dapat terlebih dahulu digambarkan seberapa besar kontribusi masing-masing sektor terhadap peningkatan nilai PDRB secara keseluruhan. Dengan demikian akan terlihat sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan

TABEL III.7.
PDRB KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN ATAS DASAR
HARGA KONSTAN TAHUN 1995, 2000 dan 2001 (JUTAAN Rp)

Wilayah Pengaruh (1)	1995 (2)	2000 (3)	2001 (5)
Bayan	34.430.020	34.430.020	36.927.993
Kayangan		30.526.092	32.468.968
Gangga	25.008.155	25.008.155	26.911.941
Tanjung	37.071.580	37.071.580	40.245.561
Pemenang		27.938.083	30.010.657
Gunungsari	42.430.889	42.430.889	46.119.687
Batulayar		66.074.246	66.779.061
Narmada	55.162.063	55.162.063	58.747.783
Lingsar		35.678.264	38.301.075
Kediri	32.715.416	32.715.416	35.604.773
Kuripan		22.291.909	24.126.980
Labuapi	36.781.473	36.781.473	39.766.409
Gerung	43.675.298	43.675.298	45.864.748
Lembar		41.332.086	45.516.670
Sekotong Tengah	32.868.634	32.868.634	35.637.342
Lombok Barat	310.561.757	563.984.099	600.310.955

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan komoditi yang dihasilkan sektor pertanian dikelompokkan dalam lima sub sektor yaitu : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perternakan dan perikanan. Komoditi utama yang dihasilkan yaitu kelapa dan kopi. Komoditi yang tampaknya cukup potensial di daerah ini adalah kopi, cengkeh, dan kapuk. Hasil hutan utamanya adalah kayu rimba (bulat), rotan, asam dan kemiri. Kebutuhan akan protein hewani semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akan daging berarti perlu adanya peningkatan jumlah ternak sebagai sumber daging. Komoditas ternak terdiri dari ayam buras, sapi, ayam ras, itik, kambing, babi, burung dara, entok, domba, kerbau, kuda, kelinci, angsa dan kalkun. Hasil perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Barat tahun 2001 berdasarkan produksi perikanan laut, ikan air tawar dan ikan air payau. Untuk sektor perdagangan, hotel

dan restoran, tumbuh pesat seiring berkembangnya pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, yang terkenal akan pariwisata pantainya yang indah, hal tersebut mempengaruhi sektor lainnya seperti pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa untuk mendukung. Terlihat dari pergerakan nilai PDRB dari tahun 1995-2000 (tabel III.7)

3.1.5. Kondisi Lingkungan Binaan

Untuk menunjang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Lombok Barat, dilihat dari karakteristik wilayah yang memanjang dari utara ke selatan dan sebagian besar didaratan, terlebih lagi adanya pemindahan ibukota dari Mataram ke Gerung dengan lokasi yang berada agak ke selatan, disini peran dari fasilitas wilayah yang mengakses ke ibukota, sangat penting keterkaitan dalam pelayanan publik dalam hal ini transportasi darat, hingga tahun 2001 tercatat panjang jalan kabupaten sepanjang 1.091,63 km yang terdiri dari atas jalan nasional sepanjang 28,70 km atau 2,6%, dari panjang jalan di Kabupaten Lombok Barat., jalan propensi sepanjang 247,55 km atau 22,70%, jalan kabupaten 616,78 km atau 56,50% dan jalan desa sepanjang 198,60 km atau 18,20%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.8.
PANJANG JALAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI MENURUT
STATUS JALAN TAHUN 2000 DAN 2001 (KM)

Status Jalan	Tahun			
	2000		2001	
	Km	%	Km	%
Desa	198,60	18,2	198,60	18,2
Kabupaten	616,78	56,5	616,78	56,5
Propensi	247,55	22,7	247,55	22,7
Nasional	28,70	2,6	28,70	2,6
Lombok Barat	1091,63	100	1091,63	100

Sumber Dinas PU Kimpraswil

Sedangkan jembatan tercatat 209 buah dengan panjang bentangan keseluruhan 1387,58 meter. Sarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat, antara lain mobil penumpang 10.480 buah, mobil barang 8830 buah, bus 1801 buah dan sepeda motor 87269 buah. Di Kabupaten Lombok Barat terdapat sebuah pelabuhan yaitu pelabuhan lembar. Selama 2001 jumlah kapal yang berkunjung ke pelabuhan lembar sebanyak 305 buah kapal pelayanan nusantara, 6 pelayanan samudra, 516 kapal pelayaran

3.1.6. Kondisi Penyediaan Fasilitas Wilayah

3.1.6.1. Pendidikan

Pembangunan suatu bangsa akan dapat berhasil bila didukung oleh pelaku pembangunan yang berkualitas. Untuk menciptakan pelaku pembangunan yang berkualitas, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan non formal

TABEL III.9.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN (TK, SD, SLTP DAN SLTA)
PER KECAMATAN TAHUN 1995 s/d 2000 - 2001

Wilayah Pengaruh	1995 s/d 2000				2001			
	TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mataram	124	454	43	12	176	577	53	17
Sekotong Tengah	1	43	8	2	1	43	8	2
Lembar	-	-	-	-	4	35	5	1
Gerung	10	89	24	10	6	54	19	9
Labuapi	5	37	10	6	5	37	10	6
Kediri	12	57	21	14	4	35	15	13
Kuripan	-	-	-	-	8	22	6	1

Narmada	16	101	30	9	12	61	12	6
Lingsar	-	-	-	-	4	40	8	3
Gunungsari	13	64	20	8	7	40	13	8
Batu Layar	-	-	-	-	6	24	7	0
Pemenang	-	-	-	-	4	23	11	4
Tanjung	9	58	18	7	5	35	7	3
Gangga	8	57	15	6	6	30	8	3
Kayangan	-	-	-	-	2	27	7	3
Bayan	3	32	7	2	3	32	7	2
Lombok Barat	77	541	138	64	77	541	138	64

Sumber Dinas P dan K Kabupaten Lombok Barat

Sampai dengan akhir 2001, di Kabupaten Lombok Barat jumlah sekolah taman kanak-kanak sebanyak 77 buah, sekolah dasar sebanyak 541 buah, SLTP 138 buah, SLTA sebanyak 64 buah. Pendidikan Luar Biasa sebanyak 2 buah hanya terdapat di dua Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yaitu Kecamatan Bayan dan Kecamatan Narmada. Mengingat jumlah penduduk yang buta huruf di Kabupaten Lombok Barat cukup besar. Program belajar kelompok diterapkan yaitu kelompok belajar A dan kelompok belajar B pada akhir tahun 2001 jumlahnya mencapai 27 buah paket A sebanyak 9 buah dengan murid 120 orang dan paket B 18 buah dengan murid 335 orang.

3.1.6.2. Kesehatan

Di samping dari pendidikan, perkembangan kualitas SDM juga dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan. Tersedia fasilitas kesehatan Puskesmas 19 buah. Posyandu sebanyak 70 buah. Dan untuk saat ini sedang dibangun Rumah Sakit, berlokasi di ibukota kabupaten, untuk melengkapi ketersediaan fasilitas publik di bidang kesehatan.

3.1.6.3. Peribadatan

Penduduk di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan registrasi 2001 mayoritas memeluk agama Islam 630.198 orang atau 93, 44%, kemudian Hindu Dharma 34.094 orang atau 5,06%, Budha 9617 orang atau 1,43%, Katolik 366 orang atau 0,05%, Kristen Protestan 282 orang atau 0,04%. Dengan demikian fasilitas peribadatan yang ada sebagian besar adalah masjid, langgar dan mushola bagi yang beragama Islam, mencapai 1958 buah, pura 143 buah, seperti diketahui Pulau Lombok memiliki julukan "Pulau Sribu Masjid", untuk menggambarkan bahwa mayoritas penduduk disini menganut agama islam, sedangkan gereja 0 buah hingga bagi pemeluk agama nasrani melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah umatnya untuk ke gereja mereka harus ke Kota Mataram, disini fasilitas tersedia buat pemeluk kristen katolik dan kristen protestan, untuk pure bisa dijumpai hampir disemua kecamatan, mengingat sejarah penganut agama ini turunan dari kerajaan hindu yang berada di Kota Mataram (Kecamatan Cakranegara), pendatang dari Pulau Bali yang menetap di Pulau Lombok dan wihara 42 buah dapat dilihat di tabel dibawah ini :

TABEL III.10.
BANYAKNYA SARANA PRIBADATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
DIRINCI PER KECAMATAN TAHUN 1995 s/d - 2001

Kecamatan	1995 - 2000						2001					Jml
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Jml	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Mataram	346	4	3	50	1	502	510	6	6	60	1	583
Bayan	136	-	-	7	1	144	136	-	-	7	1	236
Kayangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
Gangga	184	-	-	17	6	207	184	-	-	3	6	607
Tanjung	131	-	-	19	9	159	131	-	-	13	9	471
Pemenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Gunungsari	205	-	-	16	-	211	205	-	-	9	-	646
Batulayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Narmada	240	-	-	22	15	277	240	-	-	20	5	819
Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12
Kediri	271	-	-	15	8	304	271	-	-	9	8	886

Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Labuapi	173	-	-	8	-	181	173	-	-	8	-	543
Gerung	274	-	-	14	-	284	274	-	-	10	-	856
Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Sekotong Tengah	225	-	-	25	3	253	225	-	-	25	3	759
Lombok Barat	1838	-	-	143	43	2023	2349	6	6	203	43	2607

Sumber Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat

Keterangan :

- | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---|--------|
| 1 | Masjid | 3 | Gereja Katolik | 5 | Wihara |
| 2 | Gereja Protestan | 4 | Pure | | |

3.1.6.4. Perdagangan dan Industri

Memperhatikan keberadaan pasar di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2001 terkait jumlah pasar tradisional/los pasar sebanyak 35 buah dengan los pasar 114 buah. Sedangkan untuk pertokoan (Toko dan Kios) jumlahnya mencapai 465 buah atau terjadi peningkatan dari jumlah tahun 2000 sebanyak 385 buah atau meningkat 80 buah, sedangkan untuk pasar modern (pasar swalayan) dalam proses negosiasi dengan swasta, dalam rencana akan didirikan di Kota Gerung.

TABEL III. 11.
BANYAKNYA PASAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI MENURUT
JENISNYA TAHUN 2000 DAN 2001

No	Jenis Pasar	Banyaknya (Buah)	
		2000	2001
1	Pasar Tradisional/Los Pasar	35/95	35/114
2	Pertokoan (Toko dan Kios)	385	465
3	Pasar Modern (Pasar Swalayan)	-	-
	Jumlah	35/480	25/579

Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Lombok Barat tahun 2000 sebanyak 14.834 perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerja 15.727 orang. Sedangkan jumlah

ijin perusahaan yang terbit tahun 2001 sebanyak 220 buah SIUP. Ini menunjukkan peran sektor ini kedepan akan menjadi sektor yang dapat diunggulkan, terlebih lagi keterdedian sumberdaya alam dan Pelabuhan Lembar yang dapat difungsikan dalam mendukung sektor ini, terutama dalam pedistribusian dan pemasaran secara lokal maupun regional. Dapat dilihat di tabel dibawah ini :

TABEL III.12.
BANYAKNYA PERUSAHAAN DAGANG/PASAR (TDUP DAN SIUP)
DITERBITKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI PER
KECAMATAN TAHUN 2001

Wilayah Pengaruh	2001	
	TDUP	SIUP
Bayan	-	5
Kayangan	-	5
Gangga	-	4
Tanjung	-	15
Pemenang	-	6
Gunungsari	-	37
Batulayar	-	27
Narmada	-	26
Lingsar	-	14
Kediri	-	18
Kuripan	-	6
Labuapi	-	23
Gerung	-	20
Lembar	-	5
Sekotong Tengah	-	9
Lombok Barat	-	220

Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

3.1.6. 5. Pos dan Telekomunikasi

Sampai dengan keadaan tahun 2001 seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat telah dilayani oleh Kantor Pos dan Kantor Pos Pembantu yang merupakan sentral pelayanan bagi masyarakat di desa-desa dan daerah terpencil. Tercatat sebanyak 12 buah Kantor Pos, yang terdiri dari kantor Pos 6 buah, Kantor Pos Pembantu 1 buah yaitu di Kecamatan Lingsar dan Pos Keliling desa sebanyak 5 buah.

3.1.6.6. Hotel dan Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah andalan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keadaan alam, peninggalan sejarah, taman hiburan dan budaya masyarakat Lombok Barat sangat memikat para wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Barat tahun 2001 sebanyak 246.136. Untuk itu perlu fasilitas pendukung seperti hotel dan akomodasi lainnya. Hotel tercatat 76 buah yang terdiri dari hotel bintang 16 buah dan hotel melati 60 buah.

3.1.7. Kondisi Sosial Budaya

Di wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat kita jumpai beragam budaya, seperti digambarkan dalam latar belakang, mengindikasikan masih adanya “wajah lampau” masyarakat Sasak yang, primordial, feodal dan patrimonial. Walaupun secara sosio-institusional tidak lagi memiliki kredibilitas, tetapi dalam bentuknya sebagai sikap dan perilaku individu masih cukup tangguh untuk menghambat keberadaan lembaga-lembaga sosial baru di masyarakat.

3.2. Kajian Umum Wilayah Gerung sebagai Ibukota Baru

Adapun letak ibukota baru ini adalah sebelah selatan Kota Mataram dengan jarak sekitar 15 km. Secara umum Kota Gerung dapat digambarkan merupakan suatu kota baru yang berada di wilayah Kecamatan Gerung, yang mana fungsi/perannya sebagai ibukota baru dari Kabupaten Lombok Barat, membuat Kota ini berkembang pesat untuk memenuhi dari kedudukan kota sebagai ibukota.

Secara administratif Kota Gerung terdiri dari tiga desa dengan luas wilayah 29,94 Km². Topografi alamnya sebagian merupakan dataran dan sebagian lagi merupakan daerah pegunungan, terutama dibagian barat dan selatan wilayah Kecamatan Gerung. Karena itu pembangunan secara fisik tidak diarahkan kearah selatan melainkan ke arah barat dan timur

Penduduk atau sumberdaya manusia Kota Gerung sudah mencapai 27.996 orang dengan kepadatan sebesar 626 orang/km. Ini menunjukkan bahwa Kota Gerung memiliki sumberdaya manusia yang sangat padat. Mengingat wilayah ini merupakan ibukota kabupaten dan kecamatan, sehingga tingkat hunian dan pergerakan aktivitas memusat di kota ini. Kepadatan penduduk kota dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL III.13.
KEPADATAN PENDUDUK KOTA GERUNG DIRINCI PER DESA TAHUN 2001

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)
1	Gerung	13.70	6095	493
2	Babussalam	12.30	3876	287
3	Dasan Geres	14.04	18025	1283
	Kota Gerung	40.04	27996	626

Sumber Kecamatan Gerung dalam Angka 2001

Selain tingkat pendidikan penduduk mendiami wilayah Kota Gerung juga termasuk berusia muda. Kualitas sumber daya manusia yang rendah tersebut juga dapat dilihat dari struktur mata pencaharian tenaga kerjanya sebagian besar terserap pada sektor tradisional (pertanian dan nelayan). Ini dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :

TABEL III. 14.
PENDUDUK KOTA GERUNG MENURUT MATA PENCAHARIAN 2001

No	Mata Pencapaian	1995			2001		
		Desa Gerung	Desa Babussalam	Desa Dasan Geres	Desa Gerung	Desa Babussalam	Desa Dasan Geres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Petani	1343	638	1940	960	480	1125
2	PNS	60	30	15	100	74	125
3	PN ABRI	35	25	12	60	40	55
4	Pedagang	1351	1459	1113	876	890	764
5	Buruh Tani/Nelayan						
6	Buruh Swasta	44	30	14	300	250	346
7	Industri Kerajinan	65	155	48	557	521	428

Sumber Kecamatan Gerung dalam Angka 2001

Dari tabel diatas tampak jelas bila sektor pertanian mendominasi pergerakan ekonomi wilayah, namun seiring dengan bergesernya fungsi kota yang dulunya adalah desa, membuat kota ini berkembang sesuai dengan fungsi dan perannya merubah wajah kota menjadi kota baru dengan jenis aktivitas ekonomi menggambarkan pusat pertumbuhan dengan sektor-sektor ekonomi yang berperan adalah sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh perkotaan.

Fasilitas wilayah yang ada, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, mulai diperhatikan dengan adanya pembangunan dimana-mana. Sarana prasarana ekonomi yang ada di wilayah Kota Gerung terdiri dari pasar umum, hotel/losmen, toko, kios/warung, KUD, Bank, LPK dan Pegadaian. Fasilitas pasar umum tersebar disemua desa. Yang terbanyak adalah sarana kios/warung, terbanyak di Desa Gerung. Sarana keuangan berupa Bank, LPK dan Pegadaian hanya di Ibukota Gerung, sedangkan KUD hanya ada di Desa Gerung.

Sedangkan untuk fasilitas pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, tersebar merata di setiap desa dengan jumlah 5-15 buah, untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama ada 3

buah sekolah negeri dan 13 buah sekolah swasta, demikian untuk Sekolah Lanjutan Atas, 1 sekolah negeri dan 5 buah sekolah swasta. Hal ini masih menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah

Jumlah sarana kesehatan, puskesmas 1 di Dsa Gerung dan posyandu 14 buah di Desa Dasan Geres dan 6 buah di Desa Gerung dan pustu 2 buah di Desa Babussalam.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat hidup rukun dengan adanya beraneka ragam fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Di Gerung, agama mayoritas adalah islam.

Masalah sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh sistem nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. Untuk memahami nilai sosial budaya yang berkembang pada masyarakat Gerung, khususnya disekitar lokasi pengembangan Ibukota Kabupaten dapat didekati dengan menggunakan kerangka Teori Van den Berg tentang "*Receptio in Complexu*". Menurut kerangka Teori Van den Berg bahwa hukum adat yang berlaku pada masyarakat merupakan resepsi dari hukum agamanya. Berdasarkan teori ini maka sebagai sumber nilai yang dipedomani oleh masyarakat adalah Hukum Agama

3.3. Kajian Umum Wilayah Mataram sebagai Ibukota Lama

Secara geografis Kota Mataram terletak antara 116°04' sampai 116°07' Bujur Timur dan 08°33' sampai 08°42' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat

Secara morfologis rona fisik Kota Mataram berupa dataran rendah, dengan kondisi topografi yang bervariasi yaitu dari mulai 0 meter (m) dari permukaan laut (dpl) sampai dengan 25 m.dpl (rata-rata 16 m.dpl). Kelerengan lahan di wilayah Kota Mataram mulai dari 0 - 2% yang meliputi bagian barat sampai dengan bagian tengah Kota Mataram dan kelerengan 0 - 15 % di bagian timur dan secara klimatologis, beriklim tropis

Kota Mataram terdiri dari tiga kecamatan (Mataram, Ampenan dan Cakranegara), Kota Mataram hakikatnya mulanya berperan sebagai pusat-pusat kegiatan utama di bagian barat Pulau Lombok. Kegiatan utama ini digerakkan oleh fungsi sebagai perdagangan, pusat pemerintahan dan sekaligus permukiman.

Registrasi penduduk pada tahun 1998 sebanyak 299.148 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 8,74% dari tahun 1990. Penduduk terpadat di Kota Mataram berada di kecamatan Mataram, yakni sebesar 3.727 jiwa/km² pada tahun 1998, kemudian kecamatan Cakranegara sebesar 2.999 jiwa/km² pada tahun 1998 dan kecamatan Ampenan sebesar 2.937 jiwa/km² pada tahun yang sama. Di tahun 2001 mencapai 317.434 jiwa.

Pola pemanfaatan lahan/ruang pada suatu wilayah perkotaan dapat mencerminkan perkembangan tingkat pembangunan di wilayah tersebut, sebab penggunaan lahan bersifat dinamis dan selalu berganti menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi

pada wilayah tersebut. Dalam menyusun suatu rencana pembangunan suatu wilayah, harus memperhatikan kondisi yang ada (fakta) utamanya fakta mengenai penggunaan lahan eksisting. Penggunaan lahan di wilayah Kota Mataram meliputi penggunaan lahan untuk fungsi yang beragam yaitu permukiman, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, pertambangan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Dari informasi di atas, tampak bahwa pemanfaatan lahan permukiman mendominasi luas keseluruhan wilayah Kota Mataram. Permukiman ini tersebar di seluruh kecamatan dengan pemusatan permukiman terdapat di kawasan-kawasan perkotaan.

Secara umum kondisi perekonomian wilayah Kota Mataram menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, baik dari segi nilai produksi maupun dari segi pertumbuhan sektoral. Nilai PDRB Kota Mataram Tahun 1998 berdasarkan harga berlaku adalah Rp. 1.770.610 . Nilai tersebut meningkat cukup pesat dibanding nilai PDRB Kota Mataram pada tahun 1995 berdasarkan harga berlaku yang hanya Rp. 1.253.190 . Untuk tahun 2001 mencapai Rp. 3.101.807.meningkat 9.09 persen, ini menandakan tingkat pendapatan perkapita masyarakat bertambah

Sebagai pusat pemerintah hampir semua fasilitas sarana maupun prasaran dapat dijumpai di Kota Mataram, ini mempengaruhi sistem pelayanan yang ada terhadap wilayah pengaruhnya. Kota Mataram, sebagai ibukota kabupaten sudah menggambarkan suatu kota yang relatif maju, dengan segala bentuk pelayanannya baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Didukung oleh akses dan waktu tempuh yang relatif mudah dan cepat, Kota Mataram memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap hinterlannya.

Untuk keadaan sosial budaya, masuknya penguasaan Bali ke Lombok pada tahun 1550 disikapi sebagai suatu bentuk dominasi atas perkembangan budaya Sasak yang

menemukan identitasnya pada Islam yang baru datang pada tahun 1506-1545 dari Jawa. Hal yang tidak dapat dihindari kemudian adalah, terjadinya akulturasi budaya. Sebagian dari sistem budaya yang ada pada masyarakat Bali diadopsikan ke masyarakat Sasak untuk kemudian disesuaikan dengan keyakinan setempat, sehingga dapat dipahami bahwa budaya Sasak sebagian juga dipengaruhi oleh budaya Bali. Ini terlihat di Kota Mataram, dengan banyaknya pura dan aktivitas keagamaan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian juga dengan suku pendatang lainnya, seperti Tionghoa, Jawa, Bima, dan Sumbawa relatif tersebar pada beberapa lingkungan permukiman yang muncul seiring dengan tumbuhnya aktivitas publik (pemerintahan) yang mereka masuki. Sementara itu suku-suku lainnya seperti Arab, Bugis secara historis memiliki kawasan permukiman yang berada di wilayah pesisir Ampenan. Hal ini adalah sebagai konsekuensi peran yang diemban Ampenan sebagai pelabuhan pada masa lalu.

BAB IV

ANALISIS DAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

4.1. Analisis dan Perkembangan Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Pada dasarnya perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Secara internal proses perkembangan daerah dipengaruhi oleh keadaan fisik geografis, sumberdaya manusia dan perkembangan sektor perekonomian daerah, sedangkan secara eksternal perencanaan daerah tidak terlepas dari pengaruh wilayah yang lebih luas, dalam hal ini yaitu tingkat provinsi dan nasional (kebijakan secara politis) (Sitorus, 2000).

4.1.1. Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan Ibukota

Struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat sebelum pemindahan ibukota, terdiri dari sembilan kecamatan (Kecamatan Sekotong Tengah, Kecamatan Gerung, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Bayan) serta kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Administratif Mataram sebagai ibukota kabupaten (Gambar 4.2)

4.1.1.1. Kemampuan Pelayanan

Struktur perwilayahan Kabupaten Lombok barat sebelum pemindahan ibukota kabupaten, memperlihatkan peran yang dominan dari Mataram sebagai ibukota kabupaten.

Sebagai pusat pelayanan, Mataram berposisi sentral yaitu berada di tengah-tengah wilayah kabupaten yang bentuknya membujur arah utara selatan. Melalui posisi seperti ini Mataram dapat menjangkau wilayah pengaruh dalam rentang kendali yang seimbang antara wilayah bagian selatan dan wilayah bagian utara. Peran ini sekaligus menjustifikasi Mataram sebagai pengikat antarkawasan dalam wilayah Lombok Barat.

Gambaran konstelatif dari perwilayahan Lombok Barat sebelum pemindahan ibukota dengan fungsi-fungsi khusus diemban oleh masing-masing pusat pertumbuhan baru dapat dilihat dalam Gambar 4.2 dan tabel berikut ini:

TABEL IV. 1
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LOMBOK
BARAT SEBELUM PEMINDAHAN IBUKOTA

No	Wilayah Pengaruh	Fungsi Kegiatan	Hierarki	Orde
1	Mataram (*)	Pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, hotel dan restoran	I	I
2	Gerung	Pertanian dan Perdagangan	II	II
3	Narmada	Pertanian, jasa (pariwisata)	II	II
4	Tanjung	Pertanian dan perikanan	III	II
5	Kediri	Perdagangan dan jasa	II	II
6	Gunungsari	Pertanian (Pertanian tanaman tahunan)	II	II
7	Labuapi	Pertanian	II	III
8	Gangga	Pertanian (Pertanian tanaman tahunan, lahan kering)	III	III
9	Sekotong Tengah	Pertanian	III	III
10	Bayan	Pertanian	III	III

Sumber Hasil Analisis

Keterangan : (*) Ibukota Kabupaten yang terdiri dari wilayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Cakranegara

- **Hierarki I (Kota Mataram)**

Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan fungsi pendukung sebagai pusat pelayanan publik. Mempunyai akses dan fasilitas sarana-prasarana yang dapat menunjang semua wilayah pengaruh serta memberi pelayanan secara regional, dengan dukungan Bandara Selaparang sebagai pintu masuk.

- **Hierarki II** (Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gerung)

Fungsi kegiatan diarahkan pada aktivitas sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Mempunyai fasilitas yang cukup untuk memberikan pelayanan bagi internal kawasan dan daerah sekitarnya. Kawasan ini masih kuat dipengaruhi oleh Kota Mataram karena berada pada lapis pertama yang mengelilingi kota.

- **Hierarki III** (Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Sekotong Tengah)

Fungsi kegiatan bergerak dibidang pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman tahunan dan semusim, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Fasilitas yang ada hanya mendukung kebutuhan lokal

Sedangkan berdasarkan pembobotan, ternyata posisi hierarki berubah dengan adanya kecamatan yang ada di posisi ketiga naik peringkat berada di kriteria hierarki kedua seperti pada Kecamatan Tanjung, hal ini disebabkan karena jumlah dari masing-masing sarana prasara yang ada lebih banyak sekalipun jenisnya lebih sedikit, hal tersebut lebih mampu melayani jumlah penduduk yang lebih besar.

4.1.1.2. Interaksi Keruangan

Pengembangan Kota Mataram sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat pelayanan identik dengan kegiatan perkotaan. Hal ini akan mempengaruhi daerah sekitar maupun hinterlandnya, baik secara keruangan maupun secara ekonomi. Implikasinya bukan saja memunculkan suatu kawasan perkotaan secara umum, namun juga mampu memicu aktivitas, baik di dalam pusat-pusat pelayanannya sendiri maupun terhadap kawasan sekitarnya, yang diharapkan aktivitas ini dapat bersinergi untuk membangkitkan

kegiatan perekonomian dalam masing-masing pusat pertumbuhan. Selain itu pusat tersebut juga diarahkan dalam memberikan pelayanan yang terpadu bagi masyarakat di sekitarnya baik di bidang pemerintahan, sosial, kesehatan, perekonomian, keamanan, maupun di bidang-bidang lainnya.

TABEL IV.2.
MATRIKS INTERAKSI ANTARKECAMATAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBELUM PEMINDAHAN IBUKOTA

Wilayah Pengaruh	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mataram (*)	0	-	-	#	#	#	#	#	#	-
Bayan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gangga	-	-	0	#	-	-	-	-	-	-
Tanjung	#	-	#	0	#	-	-	-	-	-
Gunungsari	#	-	-	#	#	#	-	-	-	-
Narmada	#	-	-	-	-	#	#	#	-	-
Kediri	#	-	-	-	-	-	0	#	-	-
Labuapi	#	-	-	-	-	-	#	0	#	-
Gerung	#	-	-	-	-	-	-	#	0	-
Sekotong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber Hasil Analisis

Keterangan : (*) Ibukota Kabupaten yang terdiri dari wilayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Cakranegara

0	Mataram	5	Narmada		Hubungan
1	Bayan	6	Kediri	#	Kuat
2	Gangga	7	Labuapi	-	Rendah
3	Tanjung	8	Gerung	*	Ibukota Kabupaten
4	Gunungsari	9	Sekotong Tengah		

Dilihat dari interaksi di atas Kota Mataram sangat kuat pengaruhnya. Pengaruh ini berdampak pada pertumbuhan Kota Mataram sebagai pusat pelayanan lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota kecamatan lainnya. Selain itu dengan akses dan jarak yang relatif dekat serta terjangkau menjadikan Mataram memegang kendali fungsi ekonomi dan sosial.

Cakupan (pelayanan) Kota Mataram terhadap kota-kota seperti tersebut dalam uraian berikut :

1. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Selatan (Kecamatan Sekotong Tengah, dan Kecamatan Gerung)

Peran kecamatan tersebut diatas adalah sebagai kota penyuplai bahan pangan untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pembagian fungsi-fungsi kota di Kabupaten Lombok Barat kurang jelas, akibat dari Kota Mataram sebagai ibukota yang merupakan bukan wilayah administrasi dari Kabupaten Lombok Barat sendiri, sehingga orientasi geografis pemasaran dan pelayanan sosial serta fungsi pengembangan dan penyebaran barang dan jasa antarkota dengan daerah pengaruhnya lebih condong mengakses ke Kota Mataram.

2. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Tengah (Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Narmada, dan Kecamatan Gunung sari)

Secara geografis lokasi kota-kota kecamatan tersebut sangat strategis, permasalahan yang dihadapi adalah koordinasi antarkecamatan

3. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Utara (Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung)

Secara geografis lokasi kecamatan-kecamatan tersebut diatas memiliki rentang kendali jauh di bagian utara dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Namun karena lokasi Kota Mataram yang sentralitas untuk menjangkau kawasan ini tidak terlalu sulit, hanya akses menuju ke utara hanya dilewati oleh satu jalur sarana prasarana transportasi.

4.1.1.3. Sistem Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berada di ibukota kabupaten Kota Mataram, sedangkan wilayah pengaruh hanya dilengkapi oleh sistem transportasi dua arah dan memanjang dari utara ke selatan, sedangkan untuk wilayah-wilayah yang jauh lokasinya dari ibukota hanya di hubungi dengan jalan tanah. Sehingga dalam hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat.

Untuk mencapai ibukota masyarakat dilayani oleh transportasi darat baik berupa angkutan umum maupun pribadi. Di Kabupaten Lombok Barat terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Lembar. Dimana Pelabuhan ini merupakan jalan masuk distribusi barang maupun penumpang. Lokasi dari Pelabuhan ini berada di Kecamatan Gerung kurang lebih 21 Km dari Ibukota Mataram. Sedangkan di Kota Mataram sendiri terdapat Lapangan Udara Selaparang, yang melayani penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini yang menyebabkan mobilitas yang tinggi berada di wilayah Kota Mataram. Kelengkapan fasilitas ibukota merupakan daya tarik bagi masyarakat yang berada di luar wilayah ibukota. Perkembangan Kota Mataram, juga berpengaruh bagi perkembangan wilayah sekitarnya yaitu wilayah utara Kecamatan Tanjung, wilayah tengah Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Kediri sedangkan wilayah selatan Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gerung, untuk wilayah yang terletak agak jauh dari jangkauan pelayanan mengalami kesenjangan seperti dibagian utara Kecamatan Bayan dan Kecamatan Gangga dan bagian selatan yaitu Kecamatan Sekotong Tengah, akibat dari minimnya transportasi sebagai media penghubung antarwilayah, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN
PEMEKARAN KECAMATAN

PETA SISTEM PERKOTAAN MATARAM
DAN SEKITARNYA

KETERANGAN :

- - - : Batas Kabupaten
- . - . : Batas Kota
- : Jalan Propinsi/Negara
- · - · : Batas Kecamatan
- · — · : Wilayah Inti dalam
- : Wilayah Inti
- : Pusat Pertumbuhan

SUMBER UTARA



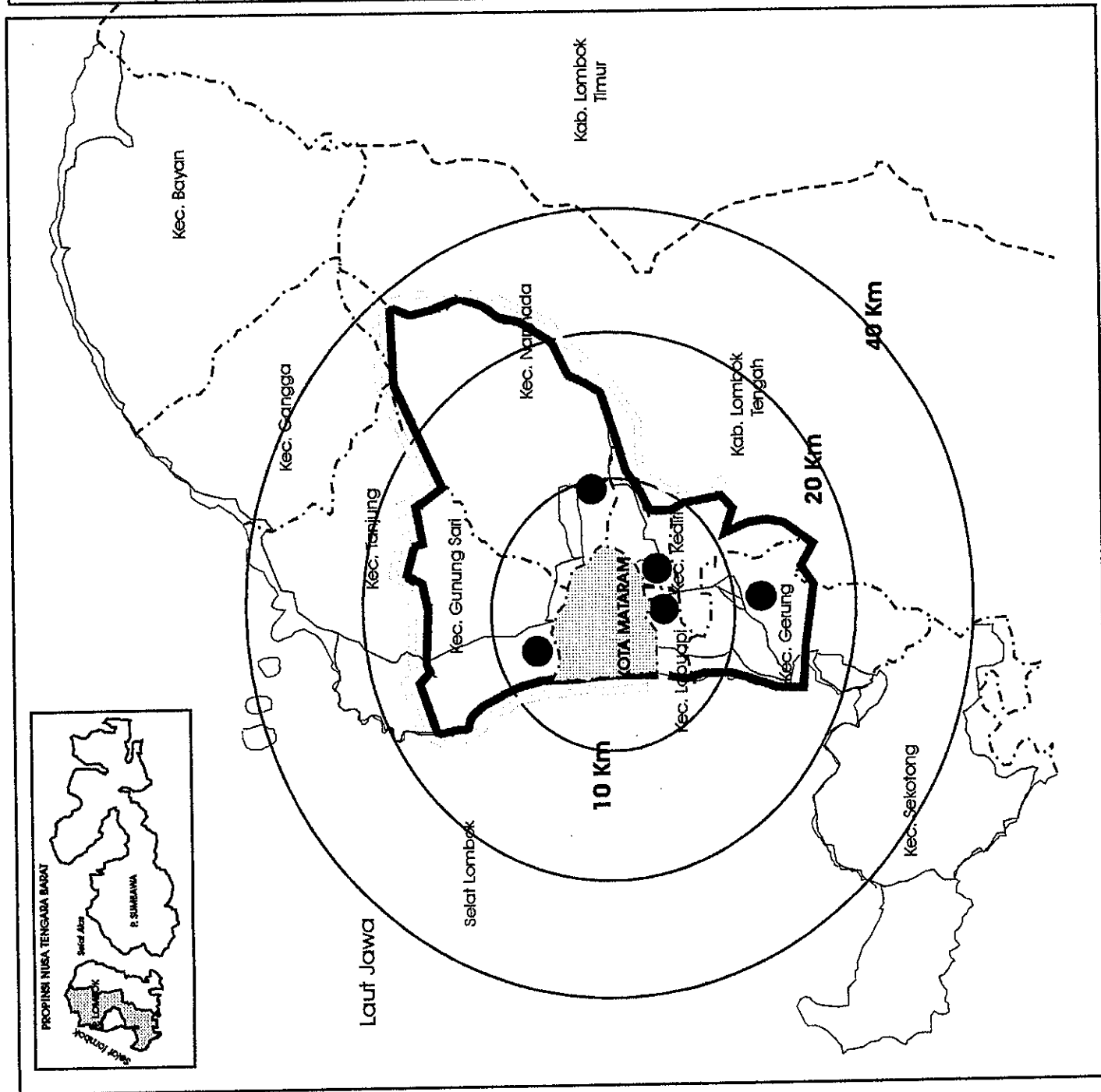
BAPPEDA LOMBOK BARAT

SKALA

1 : 100.000

NOMOR GAMBAR

4.1



4.1.1.4. Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Barat dari tahun 1995 hingga 2000, memperlihatkan laju pertumbuhan 30% dengan rata-rata penduduk per kecamatan 50.000 jiwa

TABEL IV.3
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LOMBOK BARAT
PER KECAMATAN TAHUN 1995, 1997, dan 2000

Wilayah Pengaruh	Penduduk (jiwa)		
	1995	1997	2000
Bayan	20.420	31.527	38.169
Gangga	47.789	64.148	69.845
Tanjung	50.052	59.983	65.426
Gunungsari	58.038	77.091	82.884
Narmada	91.993	115.234	132.236
Kediri	50.418	66.565	76.186
Labuapi	34.617	43.418	52.163
Gerung	75.237	89.759	97.096
Sekotong Tengah	26.949	36.182	40.734
Lombok Barat	455.513	583.907	665.749
Laju Pertumbuhan penduduk	30%		

Sumber Hasil Analisis 2004

Dilihat dari perkembangan di atas, kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar ibukota kabupaten seperti Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Gerung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk dan luas wilayah dari masing-masing kecamatan ini berpengaruh terhadap aspek pengelolaan pembangunan kecamatan bersangkutan. Salah satunya adalah pada kebutuhan pelayanan publik berupa organisasi yang memadai untuk mengantisipasi perkembangannya. Kondisi inilah yang kemudian menggerakkan pemerintah daerah melaksanakan pemekaran bagi kecamatan-kecamatan yang dianggap kepadatan penduduknya sudah berada diatas rata-rata.

4.1.1.5. Struktur dan Perkembangan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan yang pesat pada sektor-sektor unggulan pada sistem perekonomian Kota Mataram yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Sektor-sektor lain juga mengalami kenaikan namun nilainya secara keseluruhan masih terlalu kecil untuk meningkatkan nilai PDRB secara agregat. Melalui distribusi persentase sektoral PDRB dan nilai PDRB, dapat diidentifikasi terjadinya perubahan-perubahan yang cukup sistematis dalam hal struktur perekonomian di wilayah Kota Mataram. Sejak tahun 1994, dominasi produksi dari sektor pertanian terhadap nilai PDRB secara keseluruhan mulai diimbangi dan bahkan dilampaui oleh sektor industri.

Modernisasi dan kebijakan pemerintah di bidang industrialisasi pada masa tersebut menunjang percepatan pertumbuhan di sektor industri pengolahan yang berbasis pada industri kecil dan rumah tangga. Namun menurunnya kontribusi sektor pertanian bukan berarti berkurangnya kualitas potensi sektor ini untuk menunjang perekonomian di Kota Mataram. Sebab sebagian besar jenis industri yang ada di wilayah Kota Mataram merupakan industri yang bertumpu pada pengolahan hasil sektor pertanian. Yang mana Kabupaten Lombok Barat berbasis pada sektor pertanian dan lahan di wilayah ini sangat terkenal subur (lahan kelas 1).

TABEL IV.4
LQ KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN SEBELUM
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Wilayah Pengaruh	Sektor Ekonomi								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mataram (*1)	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1
Bayan	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Gangga	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Tanjung	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Gunungsari	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Narmada	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Kediri	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1

Labuapi	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1
Gerung.	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1
Sekotong Tengah	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1

Sumber Hasil Analisis

Keterangan :

B : Basis (LQ>1) NB : Nonbasis (LQ<1)

(*) Ibukota Kabupaten yang terdiri dari wilayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Cakranegara

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pertanian | 4. Listrik, gas dan Air Bersih | 7. Angkutan dan Komunikasi |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 5. Bangunan | 8. Persewaan dan Keuangan |
| 3. Industri | 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran | 9. Jasa |

Tabel di atas memperlihatkan sektor-sektor basis dan nonbasis yang berpotensi untuk dikembangkan dengan mengacu pada kondisi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat.

Hasil analisis memperlihatkan sektor pertanian sebagai sektor basis berada pada hampir seluruh wilayah pengaruh di Kabupaten Lombok Barat. Hanya pada wilayah Mataram yang telah berkembang pesat, karena penduduk besar dan fasilitas memadai, yang merupakan tipikal unsur-unsur perkotaan sektor industri, bangunan, angkutan dan komunikasi, perdagangan, persewaan dan jasa mewarnai sektor perekonomian wilayah tersebut. Bagi wilayah lainnya, bukan berarti tidak memiliki potensi untuk berkembang, namun untuk saat tersebut aktivitas kawasan dipengaruhi oleh sektor-sektor berbasis perdesaan. Kemungkinan ke depannya dapat lebih dikembangkan lagi, karena masih tersedia sumberdaya alam yang potensial diantaranya seperti sektor jasa (pariwisata).

4.1.1.5. Kedudukan Kota Mataram sebagai Ibukota Lama dalam Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa desentralisasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan posisi Kabupaten/Kota yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga pelayanan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan seyogyanya berada pada level ini. Posisi Kabupaten/Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti ini diharapkan terjadi peningkatan pelayanan.

Amanat ini apabila dihadapkan pada kondisi dualisme pengelolaan daerah otonom dalam satu wilayah yuridiksi seperti ibukota kabupaten yang berada dalam wilayah daerah otonom lain akan menjadi beban secara yuridis, dan teknis. Tidak terkecuali bagi Kabupaten Lombok Barat yang beribukota di Kota Mataram. Kabupaten akan mengalami kesulitan teknis dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari terutama bagi aparatur pemerintah yang melaksanakan tugasnya tidak berada di wilayah/daerah yang dilayani. Hal lainnya yang mendukung argumentasi ini adalah: (1) letak Ibukota Kabupaten Lombok Barat kurang menguntungkan, karena berada di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat; (2) Ibukota Kabupaten Lombok Barat berhimpit dengan Ibukota Kotamadya Mataram, di samping berhimpit dengan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Kota Mataram sendiri sangat mempengaruhi sebagian wilayah yang berada di wilayah pengaruh Kabupaten Lombok Barat, selain peran dan fungsi tadi juga posisi Kota Mataram yang sentralitas sehingga mudah dijangkau, dengan daya tarik yang sangat kuat karena fasilitas publik yang relatif lengkap, kearah depannya Kota ini tetap memiliki daya tarik tersendiri. Untuk itu diharapkan peran Kota Mataram ini, bisa menjadi patner yang baik bagi kota-kota di wilayah pengaruhnya, termasuk Kota Gerung sebagai ibukota baru dan wilayah Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan. Mengingat lokasi Kota Mataram-Gerung relatif dekat, untuk menghindari lebih besar pengaruh Kota Mataram terhadap wilayah pengaruh Kabupaten Lombok Barat, perlunya pemantapan Kota Gerung sebagai ibukota baru yang bisa mengimbangi Kota Mataram sebagai ibukota lama. Dengan cara membuat kondisi Kota Gerung layaknya seperti Kota Mataram.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN
LOMBOK BARAT SEBELUM
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN
PEMEKARAN KECAMATAN

PETA STRUKTUR PERWILAYAHAN
KAB. LOMBOK BARAT SEBELUM
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN

KETERANGAN :

- - - : Batas Kabupaten
- - - : Batas Kota
- - - : Jalan Propinsi/Negara
- : Batas WP
- : Jalan Negara
- : Hierarki I
- : Hierarki II
- : Hierarki III
- : Pertanian Ladang Kering
- : Garis Danau/DAM
- : Hutan Konversi
- : Hutan Lindung
- : Perkebunan Tanaman Tahunan
- : Area Konservasi
- : Kawasan Kotar/Ibu Kota Kec.
- : Zona Pelembutan
- : Sawah Tadah Hujan
- : Tegalan
- : Zona taman Laut
- : Pertanian Ladang Basah
- : Zona Wisata

UTARA



SUMBER

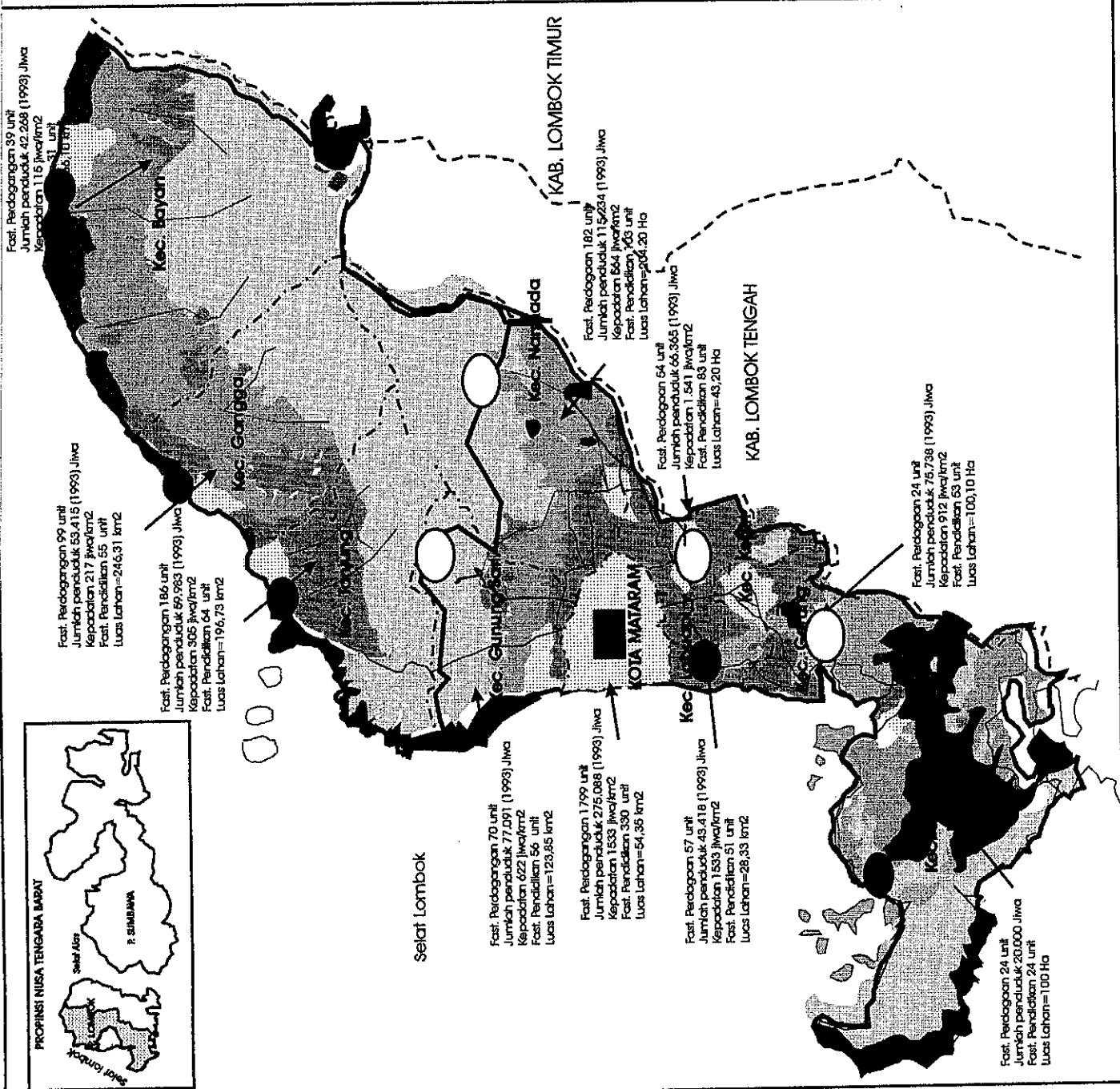
BAPPEDA LOMBOK BARAT

SKALA

1 : 100.000

NOMOR GAMBAR

4.2



4.1.2. Kajian Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebagai Akibat Pemindahan Ibukota Kabupaten

4.1.2.1. Kemampuan Pelayanan

Banyak cara yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan pelayanan kota, baik metode langsung maupun tidak langsung. Salah cara yang cukup mudah dilakukan tetapi tidak mengurangi muatan analisisnya adalah dengan melihat bagaimana kelengkapan fasilitas dari kota tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk diterapkan karena setiap pelayanan mempunyai *range of goods*. Jangkauan ini bisa dianalogikan dengan jangkauan pelayanan.

Untuk menilai kemampuan pelayanan kota-kota kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, model pendekatan itulah yang dipergunakan. Sebagai jabarannya, maka dipergunakan dua teknis analisis yaitu Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall. Jenis-jenis fasilitas yang akan dikaji cukup beragam, yang pada dasarnya mewakili kepentingan sosial, ekonomi, dan pemerintahan (pelayanan masyarakat). Hasil analisis, data yang digunakan, uji statistik, kesemuanya dapat dilihat pada *Lampiran A dan B*.

Berdasarkan hasil perhitungan Skalogram Guttman tersebut, terlihat bahwa Kota Mataram masih dominan sebagai pusat pelayanan mengingat peran dan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Gerung muncul sebagai pusat pertumbuhan baru karena peran dan fungsinya sebagai ibukota kabupaten. Kecamatan Gerung menjadi pusat pelayanan terbesar di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, karena mempunyai fasilitas pelayanan paling lengkap.

Secara keseluruhan kecamatan-kecamatan yang mempunyai fungsi pelayanan lebih dari 85% (minimal 12 jenis) adalah sebagai berikut: Tanjung, Gunungsari, Narmada,

Kediri, Labuapi dan Gerung. Kecamatan-kecamatan tersebut dengan demikian bisa dikatakan mempunyai skala pelayanan yang setingkat (*Lampiran A*). Bila dikaji ulang dengan menggunakan Indeks Sentralitas Marshall, maka komposisi peringkat tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Ada beberapa kecamatan yang nilai indeks-nya besar, tetapi peringkat/hierarki rendah, seperti misalnya Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lembar. Selengkapnya lihat *Lampiran.B*.

Dari analisis tersebut terlihat bahwa kota-kota kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pelayanan menyebar cukup merata di seluruh wilayah. Namun kalau diamati lebih lanjut akan terlihat bahwa terdapat beberapa pengelompokan pada kecamatan-kecamatan tertentu, yaitu di sekitar Kecamatan Tanjung, sekitar Kecamatan Narmada, sekitar Kecamatan Gerung. Hal ini mengindikasikan ketiga kawasan/subwilayah tersebut memang akan menjadi pusat kegiatan Kabupaten Lombok Barat di masa-masa yang akan datang (pasca pemindahan ibukota). Adapun pola dan potensi kegiatan terbagi atas: (1) dipengaruhi oleh kegiatan sektor perkotaan (industri, perdagangan dan jasa); (2) dipengaruhi oleh kegiatan sektor pedesaan (pertanian dan perternakan); (3) dipengaruhi oleh sektor pertanian dan kehutanan; (4) dipengaruhi oleh sektor perkotaan dan pedesaan.

Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota kabupaten, dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini :

TABEL IV. 5
PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT AKIBAT
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

No	Wilayah Pengaruh	Fungsi Kegiatan	Hierarki	Orde
0	Mataram (1*)	Pemerintahan, Pendidikan, Industri, Perdagangan dan Jasa Pelayanan	I	I
0	Gerung (2*)	Pemerintahan, Perdagangan, Industri, dan Jasa	I	I
1	Gerung	Perdagangan, Pertanian, industri dan Jasa	I	II
2	Narmada	Areal Konservasi, Pariwisata	II	II
3	Lembar	Industri dan Jasa Perdagangan	III	II

4	Batulayar	Pariwisata	III	II
5	Kediri	Dormitory Area, Pertanian Lahan Basah	II	II
6	Gunungsari	Industri Rumah Tangga	II	II
7	Tanjung	Pariwisata	II	II
8	Lingsar	Pertanian	III	III
9	Pemenang	Areal Konservasi, Kawasan Budidaya	III	III
10	Labuapi	Dormitory Area, Industri/kerajinan	II	III
11	Kuripan	Pertanian Lahan Basah	III	III
12	Sekotong Tengah	Pertanian Lahan kering dan Perternakan	III	III
13	Bayan	Pertanian	III	III
14	Gangga	Pertanian dan Kehutanan	III	III
15	Kayangan	Perkebunan dan Perternakan	III	III

Sumber Hasil Analisis 2004

Keterangan : (1*) Ibukota Provinsi NTB (2*) Ibukota Kabupaten Lombok Barat

Hasil analisis hierarki pusat pelayanan (Gambar 4.5):

1. **Hierarki I** (Kota Mataram, Kota Gerung dan Kecamatan Gerung,)

Kota Mataram dan Kota Gerung merupakan pusat pemerintahan dengan segala fasilitas yang menunjangnya sehingga secara hierarki berada pada posisi pertama terhadap daerah pelayanannya. Sedangkan Kecamatan Gerung merupakan pusat pertumbuhan baru yang perkembangannya ditunjang oleh kelengkapan sarana yang dimiliki sebagai lokasi dari ibukota kabupaten. Prasarana yang tersedia mampu memberi pelayanan terhadap daerah pengaruh baik secara regional maupun lokal.

2. **Hierarki II** (Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Labuapi)

Kecamatan-kecamatan ini memiliki prasarana yang cukup lengkap dan didukung oleh beberapa potensi khusus. Kecamatan Narmada, selain kelengkapan prasarana yang dimiliki juga dilalui oleh jalur transportasi yang menghubungkan antara Kota Mataram-Kabupaten Lombok Barat-Kabupaten Lombok Tengah-Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Kediri sebagai kawasan pendidikan (santri), Kecamatan Gunungsari sebagai kawasan industri rumah tangga dan Kecamatan Labuapi sebagai kawasan permukiman yang didukung industri kecil (kerajinan rumah tangga). Sementara untuk

Kecamatan Tanjung di samping sebagai sebagai kawasan pariwisata dapat juga berperan sebagai subpelayanan untuk daerah bagian utara (Lombok Bagian Utara).

3. **Hieraki III** (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong Tengah)

Yang termasuk dalam hierarki ini adalah kecamatan-kecamatan di bagian utara, tengah dan selatan yang mengalami pemekaran wilayah.

Dari uraian di atas, secara hierarki seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat terkait dalam suatu sistem, namun perlu dicermati lebih lanjut mengenai susunan orde kota-kota ini karena perubahan yang terjadi menciptakan perkembangan beberapa kota kecil yang pada awalnya kurang berkembang menjadi berkembang, seperti Kecamatan Bartulayar dan Kecamatan Lembar dan penurunan kelas pada Kecamatan Labuapi, ini disebabkan karena penjumlahan dari banyaknya dari suatu sarana prasarana yang ada, bukan dari jumlah jenisnya. Sehingga dari hasil pembobotan mengakibatkan adanya kecamatan yang naik peringkat dan ada yang turun dalam hal ketersediaan pelayanan publik.

4.1.2.2. Interaksi Keruangan

Interaksi keruangan antarkota mencerminkan adanya keterkaitan antara satu kota dengan kota lainnya. Hubungan ini biasanya tercermin dengan adanya jalur transportasi, komunikasi, atau aliran barang. Beberapa pendekatan bisa dipergunakan untuk mengetahui besarnya interaksi keruangan, di antaranya Analisis Gravitasi dan Analisis/Model Titik Henti (*Breaking Point Analysis*). Adapun perhitungan dengan menggunakan analisis tersebut terangkum dalam Lampiran.

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kota-kota yang berdekatan mempunyai nilai interaksi yang besar. Ini tentunya bisa diterima karena pada umumnya lokasi-lokasi yang berdekatan akan membentuk suatu pengelompokan (*cluster*) yang menguntungkan secara dua arah.

Selain hasil tersebut, dari analisis ini juga bisa dimunculkan adanya kecamatan-kecamatan yang mempunyai interaksi paling aktif. Artinya kota-kota ini paling banyak memiliki interaksi dengan kota lainnya. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai interaksi aktif ini sangat potensial menjadi pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya. Jangkauan pelayanan ini bisa diketahui dengan Analisis Titik Henti. Keseluruhan komposisi pusat kegiatan dengan jangkauan pelayanannya membentuk suatu pola interaksi yang nantinya akan membentuk suatu sistem perkotaan. Wilayah merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian sistem yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu, namun memiliki tujuan yang sama. Dalam sistem ini, bagian-bagian wilayah yang memiliki kemampuan lebih akan menempatkan diri sebagai pusat pelayanan bagi bagian wilayah lainnya. Interaksi wilayah akan membentuk suatu sistem ruang yang utuh. Variabel yang dipakai untuk mengetahui tingkat interaksi antar kota kecamatan/kecamatan adalah jarak antara kecamatan, serta jumlah penduduk kecamatan (Tabel IV.6)

TABEL IV.6
MATRIKS INTERAKSI ANTARKECAMATAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bayan	0	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kayangan	#	0	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gangga	-	#	0	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	-	#	#	0	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemenang	-	-	-	#	0	#	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batulayar	-	-	-	#	#	0	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gunungsari	-	-	-	#	#	#	0	#	#	#	-	-	-	-	-	-	-
Mataram (*)	-	-	-	#	#	#	#	0	#	#	#	-	#	#	#	-	-
Lingsar	-	-	-	-	-	-	#	#	0	#	-	-	-	-	-	-	-
Narmada	-	-	-	-	-	-	#	#	#	0	#	-	#	-	-	-	-
Kediri	-	-	-	-	-	-	-	#	-	#	0	#	#	-	-	-	-
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	0	#	-	-	-	-

Labuapi	-	-	-	-	-	-	-	#	-	#	#	#	0	#	-	-
Gerung	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	#	0	#	-
Gerung (*)	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	0	#
Sekotong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	0

Sumber Hasil Analisis 2004

Keterangan :

(1*) Ibukota Provinsi NTB (2*) Ibukota Kabupaten Lombok Barat

1	Bayan	6	Batulayar	11	Kediri	16	Lembar
2	Kayangan	7	Gunungsari	12	Kuripan	17	Sekotong Tengah
3	Gangga	8	Mataram (*)	13	Labuapi		Hubungan
4	Tanjung	9	Lingsar	14	Gerung	#	Kuat
5	Pemenang	10	Narmada	15	Gerung (*)	-	Rendah

Besarnya jarak antar pusat-pusat kecamatan di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut: interaksi terbesar terjadi antara Kecamatan Batulayar dengan Kecamatan Gunungsari. Hal ini dikarenakan jarak keduanya yang hanya 3 Km. Sedangkan interaksi terendah adalah antara Kecamatan Bayan dengan Kecamatan Sekotong Tengah hal ini dikarenakan jarak antara keduanya sangat jauh yaitu 163 km.

Interaksi antara Gerung dengan Kecamatan Lembar jarak Lembar-Gerung hanya 6 km, dan terkecil dengan Kecamatan Bayan. Hal ini karena dipengaruhi oleh jauhnya jarak dengan wilayah tersebut 139 km, sedangkan Kecamatan lain yang relatif berinteraksi kuat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Sekotong Tengah, dengan jumlah penduduk antara relatif lebih banyak dari wilayah lainnya (*Lampiran D*).

Masing-masing kota diatas secara teoritis adalah cakupan (pelayanan) Kota Gerung terhadap kota-kota seperti tersebut dalam uraian berikut :

1. Hubungan dengan Kota Mataram

Kota Mataram sebagai Ibukota Propensi dan Ibukota Kota Mataram, mengakibatkan kota-kota disekitarnya berfungsi sebagai kota pembantu atau kota penyangga bagi Kota

Mataram, termasuk Kota Gerung. Karena jarak yang relatif dekat dan pencapaian mudah, aksesibilitas antar kota semakin tinggi, hal tersebut berupa :

- a. Limpahan investasi dari Kota Mataram yang sudah jenuh atau mencari nilai-nilai ekonomi yang baru
- b. Arus antar Kota Gerung-Mataram sebaliknya dalam hal ini karyawan
- c. Arus wisatawan, karena wilayah sekitar Kota Gerung, memiliki obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan, dan lokasi yang strategis memudahkan para wisatawan berkunjung
- d. Arus pelajar yang bersekolah baik di Kota Mataram-Gerung

Dengan demikian alternatif pengembangan fungsi kota bagi kota Gerung terhadap kota Mataram antara lain :

- a. Sebagai kota penyangga urbanisasi kota Mataram, membutuhkan fasilitas-fasilitas pemukiman, fasilitas angkutan dan fasilitas penyediaan kesempatan kerja
- b. Sebagai kota penyangga ekologi air kota Mataram dengan menyediakan fasilitas-fasilitas jalur hijau (penghijauan) di sekitar sungai, mata air dan sebagainya
- c. Sebagai kota wisata luar Kota Mataram dengan penyediaan fasilitas wisata dan perlindungan potensi alam menarik

2. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Selatan, (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar,)

Peran kecamatan tersebut diatas adalah sebagai kota penyangga Kota Gerung. Dapat dilihat dari fungsi ekonomi kota, dimana dalam pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, dan Kecamatan Lembar, lebih berfungsi sebagai terminal ekonomi, karena relatif dekat dengan kota-kota perdagangan. Sedangkan Kota Gerung berfungsi sebagai terminal ekonomi lebih ditingkatkan, disebabkan karena

terserap langsung ke Kota Mataram. Dengan fungsi ekonomi pada kecamatan-kecamatan tersebut tetap dipertahankan, untuk merangsang dan menjalankan kesempatan berkembang di Kabupaten Lombok Barat bagian selatan

Pembagian fungsi-fungsi kota di Kabupaten Lombok Barat tetap jelas, baik dalam peran maupun fungsi sesuai dengan potensinya, sehingga orientasi geografis pemasaran dan pelayanan sosial serta fungsi pengembangan dan penyebaran barang dan jasa antarkota dengan daerah pengaruhnya dapat berupa sub satuan wilayah ekonomi yang jelas, dan terlebih lagi didukung dengan adanya Pelabuhan Lembang sebagai akses baik secara lokal ataupun regional.

3. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Tengah, (Kecamatan Kuripan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunung sari, dan Kecamatan Batulayar)

Secara geografis lokasi kota-kota kecamatan tersebut sangat strategis, sebagai pusat perdagangan dan jasa karena jalur transportasi regional melalui kota-kota tersebut sehingga orientasi kota Mataram, karena lokasinya berada dalam cakupan (mengelilingi) wilayah Kota Mataram. Jadi permasalahan yang dihadapi adalah koordinasi antarkecamatan dengan keberadaan Kota Gerung, sebagai pusat pemerintahan. Untuk itu Kota Gerung harus meningkatkan fungsinya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagaimana fungsi kota-kota lain di Indonesia. Disamping dalam pembangunan perkembangannya Kota Gerung sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat menjalankan fungsi utama yang jelas harus dimiliki Kota Gerung diantaranya :

- a. Kemandiriannya sebagai ibukota kabupaten yaitu sebagai pusat pemerintahan, pelayanan, administrasi, politik, bagi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan wilayah yang lebih luas (sekitarnya)
 - b. Keterkaitannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan
 - c. Sebagai pusat pelayanan fasilitas sosial, khususnya bagi Kota Gerung, Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan wilayah sekitarnya
 - d. Sebagai pusat pengembangan dan pengendalian pembangunan Kota Gerung dan Kabupaten Lombok Barat sebagai pusat penggalian potensi kota
 - e. Sebagai kota berskala lokal dan regional dengan penyediaan fasilitas pendukung
- 4. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Utara, (Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung)**

Secara geografis lokasi kecamatan-kecamatan tersebut diatas memiliki rentang kendali jauh di bagian utara dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Diarahkan dalam peningkatan potensi lokal, seperti halnya sebagai kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan wisata, yang mendukung keberadaan Kota Gerung sebagai ibukota kabupaten.

4.1.2.3. Sistem Transportasi

Untuk menunjang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota kabupaten, dilihat dari karakteristik wilayah yang memanjang dari utara ke selatan dan sebagian besar didaratan, disini peran dari fasilitas wilayah yang mengakses ke ibukota, sangat penting keterkaitan dalam pelayanan publik dalam hal ini transportasi darat, hingga tahun 2001 tercatat adanya penambahan jalur-jalur transportasi seperti adanya jalur lingkaran mengelilingi Kota Mataram untuk lebih efisiensi bagi masyarakat bagian utara dalam melakukan aktivitas terutama menuju ibukota kabupaten

baru Kota Gerung. Sedangkan untuk Kota Gerung, fasilitas-fasilitas transportasi menunjang sebagai ibukota sudah cukup memadai, hanya untuk bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Lombok Barat perlu adanya jalur baru yang lebih efisien, misalnya jalur tengah/lingkar bagian utara menembus Kecamatan Narmada, melihat jalur ini memiliki potensi wisata. Dari utara Gunung Rinjani menuju Narmada, dengan Taman Sesaot, Taman Suranadi, dan Taman Narmada. Selain itu Kecamatan Narmada merupakan jalur transit dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk arah kedepan Kecamatan ini berpotensi dalam hal sektor jasa dan keuangan, dengan memunculkan pusat-pusat pemasaran bagi sektor-sektor lainnya

4.2. Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Munculnya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 menjadi faktor pendorong percepatan perubahan struktur perwilayahan administratif di Kabupaten Lombok Barat. Melalui pemindahan ibukota sebenarnya telah dilakukan upaya penataan organisasi ruang wilayah, namun terbentur oleh peran pemerintah yang masih dominan untuk melegalkan. Momentum inilah yang kemudian dijadikan sarana untuk memperkuat justifikasi perlunya kelembagaan perangkat daerah yang bersifat keruangan akibat pemindahan ibukota. Menurut UU No. 22 tahun 1999, kecamatan bukan lagi sebagai wilayah dekonsentrasi, melainkan sebagai perangkat daerah, sehingga penetapan pembentukannya pun tidak lagi melalui Peraturan Pemerintah, melainkan cukup dengan Peraturan Daerah. Artinya kewenangan pembentukan wilayah kecamatan sepenuhnya berada pada pemerintah kabupaten/kota. Hal inilah yang kemudian terjadi pada wilayah

Kabupaten Lombok Barat. Beberapa kecamatan kemudian dimekarkan seperti yang ditunjukkan pada tabel. IV.7, di bawah ini.

TABEL IV. 7
PEMEKARAN KECAMATAN SETELAH PEMINDAHAN
IBUKOTA KABUPATEN

Kecamatan Induk	Kecamatan Pemekaran
Gerung	Lembar
Kediri	Kuripan
Gunungsari	Batulayar
Narmada	Lingsar
Tanjung	Pemenang
Gangga	Kayangan

Sumber Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Pemekaran kecamatan ini berimplikasi terhadap struktur ruang kabupaten yang semula terbagi atas 9 kecamatan, menjadi 15 kecamatan. Pertimbangan pemekaran kecamatan didorong oleh kondisi kemudahan proses pengambilan keputusan yang dilakukan sendiri oleh daerah sesuai kebutuhan dan untuk menghindari terjadinya kesenjangan antarwilayah kecamatan itu sendiri. Pemekaran kecamatan menciptakan institusi baru sekaligus pusat pertumbuhan baru yang dapat melayani masyarakat wilayah jangkauannya dengan fasilitas sarana prasarana. Wilayah kecamatan yang dimekarkan, dan kedudukannya dalam perwilayahan Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :

1. Kecamatan Lembar

Kecamatan ini pecahan dari Kecamatan Gerung sebagai kecamatan induk yang juga merupakan lokasi Ibukota Kabupaten Lombok Barat, dan Kecamatan Lembar sebagai kecamatan pemekaran. Kedua perubahan ini menyebabkan Gerung naik peringkat dalam struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat menjadi hierarki I. Kecamatan Lembar berada di bagian selatan Kecamatan Gerung, memiliki jenjang hierarki III, perkembangannya didukung oleh keberadaan Pelabuhan Lembar yang dapat merangsang

perkembangannya didukung oleh keberadaan Pelabuhan Lembar yang dapat merangsang pertumbuhan Lembar secara cepat sebagai wilayah industri, perdagangan, angkutan dan komunikasi, persewaan dan keuangan serta jasa. Implikasinya hierarki Lembar dimungkinkan dapat meningkat.

2. Kecamatan Kuripan

Kecamatan ini hasil pemekaran dari Kecamatan Kediri. Posisi Kecamatan Kediri pada jenjang hierarki II tidak berubah karena pemekaran ini. Hal ini disebabkan oleh wilayah pemekaran berada di bagian selatan wilayah kecamatan yang tidak mempengaruhi produk unggulannya. Kecamatan Kuripan menduduki jenjang hierarki III, karena dalam potensi wilayah masih dipengaruhi oleh sektor kegiatan pedesaan yang memberi kontribusi dalam sektor ketersediaan pangan. Dilihat dari lokasi wilayah, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Gerung, sehingga kemungkinan besar arah perkembangan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kedudukan Gerung sebagai ibukota kabupaten.

3. Kecamatan Batulayar

Kecamatan induk Gunungsari, baik sebelum maupun sesudah pemindahan ibukota masih menduduki jenjang hierarki II. Aktivitas unggulan masih pada sektor industri kerajinan rotan yang merupakan salah satu kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Kecamatan Batulayar sebagai wilayah pemekaran berada di bagian barat wilayah, merupakan daerah pinggiran, yang hendaknya akan di gunakan sebagai kawasan pariwisata. Kawasan wisata Senggigi dan sekitarnya termasuk dalam wilayah administratif kecamatan ini.

4. Kecamatan Lingsar

Kecamatan Narmada sebagai kecamatan induk merupakan pusat pengembangan daerah wisata di bagian tengah yang bertumpu pada sektor jasa, dan transportasi, menduduki

hierarki II, sedangkan Kecamatan Lingsar sebagai kecamatan pemekaran berada di bagian barat Kecamatan Narmada, yang diorientasikan sebagai penyangga Kota Mataram dan penyedia pangan, dimana potensi wilayah berbasis pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian tanaman pangan juga bidang perikanan mewarnai daerah ini dengan pengembangan ikan air tawarnya.

5. Kecamatan Pemenang

Kecamatan ini pemekaran dari Kecamatan Tanjung setelah pemekaran tetap berada pada jenjang hierarki II karena kawasan ini berkembang sebagai kawasan pariwisata yang maju dan pusat perekonomian Lombok Bagian Utara. Kecamatan Pemenang sebagai kecamatan pemekaran berpotensi untuk maju karena keberadaan tiga gili sebagai aset wilayah yang dapat diandalkan yang diperuntukan untuk menunjang pariwisata di sekitar kawasan dan berbatasan langsung dengan kawasan wisata Senggigi.

6. Kecamatan Kayangan

Kecamatan ini dimekarkan untuk lebih pemeratakan penyebaran penduduk, pada wilayah-wilayah yang kosong, yang fungsinya untuk lebih pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Walaupun untuk tahap awal belum kelihatan manfaatnya namun ke arah depan dapat lebih memberi peran yang berarti. Kecamatan ini memiliki potensial dalam sektor pertanian lahan kering dan peternakan dengan kondisi wilayah yang terdiri dari lahan kering dan savana untuk pengembangan peternakan berskala besar

Dampak pemekaran kecamatan membutuhkan pengadaan fasilitas publik dan prasarana baru sehingga menyebabkan terjadinya efek pengganda (*multiplier*). Selanjutnya akan menjadi akselerasi atau percepatan pembangunan. Proses *multiplier* dan akselerasi

akan semakin saling mendorong dengan adanya pembentukan instansi pemerintah dan tumbuhnya institusi swasta. Seterusnya akan mempercepat perkembangan ekonomi dan dinamika masyarakat.

Dalam hal pembiayaan pembangunan bagi kabupaten yang memekarkan kecamatan, besarnya kebutuhan fiskal yang akan dialokasikan tentunya akan bertambah seiring dengan pengadaan fasilitas publik dan prasarana. Kecamatan lain yang tidak mekar memang meningkat juga pembiayaannya, tapi lebih kecil pertumbuhannya dibandingkan yang dimekarkan.

Secara teoritis, pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila dianggap bahwa kebutuhan fiskal di atas adalah representasi pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai (W) dan *transfer of payment* (R) bagi pemenuhan pelayanan di kecamatan pemekaran, maka (W) dan (R) akan mempengaruhi permintaan agregat (Z) dengan perubahan sebesar (Boediono, 1997) : $(Z = (1-c)^c \quad WZ = (1-c)^c \cdot R)$

Faktor pelipat untuk W dan R yaitu $(1-c)^c$ lebih kecil dari multiplier untuk pembelian barang dan jasa (G) yaitu $(1-c)^{-1}$. Apabila dilakukan pengeluaran pembangunan sebesar satu miliar misalnya dan diketahui nilai kecenderungan berkonsumsi (MPC) sebesar $(0,8)$, maka kebijakan publik karena pengeluaran pembangunan akan mempunyai dampak berganda sebesar lima miliar. Sementara itu melalui pengeluaran untuk gaji akan menghasilkan dampak berganda sebesar empat miliar. Gambaran di atas untuk pengeluaran pembangunan publik (ΔG) formulasinya adalah $(1/1-MPC \times \Delta G)$, sedangkan untuk gaji/upah (ΔW) formulasinya adalah $(MPC/1-MPC \times \Delta W)$. Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan peredaran uang (uang inti) sebagai akibat dari penambahan organisasi baru (kecamatan pemekaran) akan meningkatkan volume ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat.

4.2.1. Perkembangan Penduduk

Pada dasarnya analisis ini berupaya mengidentifikasi pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kecenderungan yang terjadi di masa lalu secara agregat. Kecenderungan di masa lalu ini akan mendasari kemungkinan pertumbuhan jumlah penduduk di masa yang akan datang.

Berdasarkan data jumlah penduduk secara agregat tahun 1995 sampai tahun 2001, dapat dilakukan proyeksi penduduk dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk bervariasi dari waktu ke waktu, tidak konstan, semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula laju pertumbuhannya.

TABEL IV.8
JUMLAH PENDUDUK DAN PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN
TAHUN 1995, 1997, 2000, 2001

Wilayah Pengaruh	Penduduk (Jiwa)				Proyeksi 5 Tahun	Proyeksi 10 Tahun
	1995	1997	2000	2001	2006	2011
Bayan	20.420	31.527	38.169	38.290	46.147	65.353
Kayangan	-	-	-	32.804	43.435	62.343
Gangga	47.789	64.148	69.845	37.278	52.345	74.321
Tanjung	50.052	59.983	65.426	38.892	53.234	76.543
Pemenang	-	-	-	27.766	36.321	57.432
Gunungsari	58.038	77.091	82.884	60.158	70.345	89.876
Batulayar	-	-	-	32.873	40.676	58.890
Narmada	91.993	115.234	132.236	77.366	85.675	100.654
Lingsar	-	-	-	54.454	60.765	80.123
Kediri	50.418	66.565	76.186	48.441	56.567	76.234
Kuripan	-	-	-	28.279	39.567	60.002
Labuapi	34.617	43.418	52.163	54.056	68.654	88.432
Gerung	75.237	89.759	97.096	34.461	43.432	64.376
Gerung (*)	-	-	-	27.996	35.457	54.567
Lembar	-	-	-	39.418	50.456	70.876
Sekotong Tengah	26.949	36.182	40.734	40.958	48.567	69.678
Lombok Barat	455.513	583.907	665.749	674.490	831.643	1.149.700

Sumber Hasil Analisis 2004

Keterangan :

(*) Ibukota Kabupaten - = tidak ada data

Berdasarkan pada data tersebut di atas maka terlihat pertumbuhan dari tahun ke tahun sangat bervariasi dengan rata-rata terjadi lonjakan pertumbuhan. Terlihat pada tahun sebelum pemindahan ibukota laju pertumbuhan yang pesat terjadi pada Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Gerung. Setelah pemindahan dilakukan pemekaran wilayah pada kecamatan-kecamatan tersebut dengan maksud untuk terciptanya efektivitas pemerataan pelayanan penduduk sehingga pelayanan tidak hanya terkonsentrasi pada kecamatan tertentu yang penduduknya padat. Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tahun ke 5 dan ke 10, tampak laju pertumbuhan pada wilayah yang dimekarkan amat sangat tinggi.

4.2.2. Struktur dan Perkembangan Sektor Ekonomi

Untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menganalisis data nilai tambah sektor ekonomi yang tercantum dalam PDRB. Analisis selanjutnya yang bisa dipergunakan adalah dengan LQ (*Location Quotient*) yang pada dasarnya merupakan suatu perbandingan relatif kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam konstelasi wilayah lain yang lebih luas. Perhitungan LQ ini dilakukan menurut satuan kecamatan, dengan pembanding Kabupaten Lombok Barat. Hasil perhitungan ini terdapat dalam Lampiran.

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa sebagian besar Kabupaten Lombok Barat, mempunyai sektor basis pertanian (nilai LQ sektor pertanian > 1). Sektor industri menjadi sektor unggulan di beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Gerung. Sektor jasa mempunyai sebaran cukup luas dan lebih banyak didukung oleh subsektor pemerintahan. Berdasarkan

analisis ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ekonomi produktifnya sebagian besar adalah pertanian.

Selain gambaran perekonomian Kabupaten Lombok Barat dalam suatu agregat (makro) seperti di atas, analisis LQ lebih lanjut dapat digambarkan dalam konteks kecamatan. Dalam hal ini, perekonomian dilihat sebagai penjumlahan dari perekonomian subwilayah (kecamatan) dan Kota Gerung sebagai ibukota. Kajian ini akan dapat mempertajam bagaimana pola keruangan dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan PDRB tahun 2001 menurut harga konstan, perekonomian Kabupaten Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Batulayar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar. Kurang lebih 30% dari perekonomian Kabupaten Lombok Barat merupakan kontribusi dari kecamatan tersebut (Tabel IV.9).

TABEL IV.9
PDRB KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN ATAS DASAR
HARGA KONSTAN TAHUN 1995-2001 (JUTAAN Rp)

Wilayah Pengaruh (1)	1995 (2)	1999 (3)	2000 (4)	2001 (5)
Bayan	34.430.020	34.430.020	35.956.097	36.927.993
Kayangan		30.526.092	31.846.243	32.468.968
Gangga	25.008.155	25.008.155	25.090.468	26.911.941
Tanjung	37.071.580	37.071.580	38.398.546	40.245.561
Pemenang		27.938.083	28.415.349	30.010.657
Gunungsari	42.430.889	42.430.889	43.973.649	46.119.687
Batulayar		66.074.246	57.962.991	62.779.061
Narmada	55.162.063	55.162.063	56.611.181	58.747.783
Lingsar		35.678.264	37.041.374	38.301.075
Kediri	32.715.416	32.715.416	34.242.223	35.604.773
Kuripan		22.291.909	23.305.170	24.126.980
Labuapi	36.781.473	36.781.473	38.340.154	39.766.409
Gerung	43.675.298	43.675.298	45.864.748	45.864.748
Lembar		41.332.086	43.274.775	45.516.670
Sekotong Tengah	32.868.634	32.868.634	34.486.722	35.637.342
Lombok Barat	310.561.757	563.984.099	575.809.690	600.310.955

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat

Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang laju pertumbuhan ekonominya tinggi, juga mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam perkembangan jumlah penduduknya. Sebagaimana halnya dengan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk, pola keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja ini cenderung linier.

Dari kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa akan semakin banyak penduduk yang bermukim di kawasan-kawasan perkotaan. Pergeseran pemukiman penduduk yang mengarah ke kota tersebut tentunya berdampak kepada kegiatan ekonomi. Sektor-sektor perkotaan akan berkembang dengan akselerasi yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor primer yang akan semakin tertinggal. Jadi secara umum, mestinya perkembangan perkotaan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi atau sebaliknya. Dalam kaitan itulah dilakukan tinjauan mengenai keterkaitan antara keduanya, serta keterkaitan antara sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa dengan perkembangan perkotaan.

Tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sektor unggulan. Istilah yang biasa dipakai adalah *leading sector* dan *base sector*. *Leading sector* biasanya diukur dari tingkat pertumbuhannya, sementara *base sector* pada umumnya menggunakan ukuran besarnya dominasi (kontribusi) pada perekonomian dengan Metode Kuosien Lokasi (*LQ: Location Quotient*). Seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.10
LQ KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN SETELAH
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Wilayah Pengaruh	Sektor Ekonomi								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mataram (*1)	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ>1	LQ>1
Bayan	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Kayangan	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Gangga	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1

Tanjung	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ>1
Pemenang	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Batulayar	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Gunungsari	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Lingsar	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Narmada	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Kediri	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Kuripan	LQ>1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ>1
Labuapi	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Gerung	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1
Gerung (*2)	LQ>1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1
Lembar	LQ>1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ>1	LQ<1
Sekotong Tengah	LQ>1	LQ>1	LQ>1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ<1	LQ>1	LQ<1

Sumber Hasil Analisis 2004

Keterangan :

B : Basis (LQ>1)

NB : Nonbasis (LQ<1)

(*1) Ibukota lama

(*2) Ibukota baru

1. Pertanian

2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri

4. Listrik, gas dan Air Bersih

5. Bangunan

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Angkutan dan Komunikasi

8. Persewaan dan Keuangan

9 Jasa

Melihat struktur perekonomian Kabupaten Lombok Barat, sebagian besar kecamatan mempunyai karakteristik yang serupa dengan sektor pertanian sebagai sektor basis. Selain itu adanya pemekaran kecamatan yang semula hanya 9 kecamatan menjadi 15 kecamatan menciptakan penambahan sebaran sektor basis.

Adapun sektor-sektor unggulan yang mendukung perkembangan dan terkait dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sektor industri

Perkembangan perkotaan yang sangat berkait erat dengan pertumbuhan sektor industri ini terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar

2. Sektor Pertanian

Pertumbuhan kawasan yang terkait dengan pertumbuhan sektor pertanian terjadi pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan

Kayangan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Sekotong Tengah

3. Sektor Perdagangan

Pertumbuhan kawasan yang terkait dengan pertumbuhan sektor perdagangan terdapat di kecamatan seperti Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan dan Kota Gerung dan Kecamatan Lembar.

4. Sektor Jasa

Pertumbuhan kota yang terkait dengan pertumbuhan sektor jasa terjadi pada Kecamatan hierarki II seperti Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan dan Kota Gerung

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Lombok Barat ternyata lebih mengarah berkaitan dengan perkembangan sektor jasa. Sektor jasa yang paling dominan adalah jasa pemerintahan. Jadi, pada dasarnya yang mempengaruhi perkembangan wilayah secara umum adalah subsektor pemerintahan.

Gambaran sektor unggulan di atas adalah gambaran secara makro wilayah, yang dapat dikatakan bisa mewakili kinerja perekonomian wilayah. Tetapi dalam konteks mikro perkotaan, bisa saja terdapat beberapa perbedaan di antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, karena strategi pengembangan kecamatan ini dilakukan dalam unit wilayah atau kecamatan, maka gambaran mengenai karakteristik perekonomian kecamatan perlu dibahas lebih dalam.

4.3. Dampak Keberadaan Ibukota Gerung sebagai Ibukota Baru terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Perkembangan Kota Gerung dari kota kecil menuju kota yang lebih teratur dan mapan. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan Kota Gerung yang berubah status menjadi Ibukota Kabupaten Lombok Barat, banyak dana pembangunan yang mengalir untuk pembangunan ibukota baru ini guna penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pemerintahan dan pemukiman, para penanam modal mulai tertarik dan menginvestasikan uangnya dengan membeli lahan di kawasan Kota Gerung, karena harga masih relatif murah dibandingkan di Kota Mataram, lokasi Kota Gerung mudah dicapai dan tersedianya fasilitas yang memadai, potensi alam yang tenang, hijau dan sejuk menarik untuk membangun perumahan dan kegiatan wisata alamiah. Dan lokasi terletak di jalur arteri primer menghubungkan dengan kota-kota wilayah pengaruhnya dan kota-kota lain diluar wilayah pengaruh.

Dengan demikian hal tersebut meningkatkan jenjang hierarki kota mejadi hierarki I menyebabkan peluang terjadinya perubahan hierarki bagi kota-kota lainnya sekaligus meningkatkan peran kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu memberikan pelayanan pada wilayah sekitarnya. Mengingat pemindahan ibukota belum berjalan secara maksimal maka peran dan fungsi Kota Gerung juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Pola yang menjadi alternatif di sini adalah diarahkan untuk menciptakan pengembangan wilayah belakang, dan mempercepat transformasi struktur, dari wilayah terkesan terpisah menjadi wilayah yang terintegrasi.

Secara keseluruhan terdapat empat fungsi dasar Gerung sebagai ibukota kabupaten yang berhasil diidentifikasi dari kajian sebelumnya. Keempat fungsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Daerah Belakang. Fungsi utama kebanyakan ibukota adalah penyediaan pelayanan bagi daerah belakangnya. Fungsi tersebut terutama adalah dalam bidang ekonomi. Produsen di daerah perdesaan mengangkut hasil pertanian ke kota terdekat, sementara kota menyediakan sarana dan jasa pemasaran serta faktor produksi lainnya. Selain ekonomi, pelayanan ini juga berkaitan dengan bidang sosial dan pemerintahan, karena umumnya pada kota-kota inilah terdapat pusat administrasi pemerintahan.
2. Perhubungan antarwilayah. Beberapa kota kecamatan memainkan peranan khusus sebagai pusat perhubungan antarwilayah. Barang-barang yang dihasilkan di sentra produksi dikumpulkan di tempat tersebut untuk dikirimkan ke daerah lain atau diekspor.
3. Industri pengolahan. Kota biasanya menjadi tempat untuk pengolahan (pabrik), pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Semua kota kecamatan pada dasarnya mempunyai kegiatan industri pengolahan, tetapi fungsi ini biasanya lebih banyak terkonsentrasi di sekitar kota besar.
4. Subpusat permukiman. penduduk kota yang berada dekat pusat kota dapat tumbuh pesat kalau perkembangan pusat kota tersebut sudah melewati batas yang efisien. Penduduk memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke tempat yang tidak begitu padat dan pulang pergi ke pusat kota untuk bekerja.

Sebagai ibukota, Gerung merupakan aglomerasi perkotaan yang membutuhkan pengaturan fungsi secara efisien. contohnya di dalam kenyataannya mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini tindakan yang perlu dilakukan adalah merubah struktur internal kota dengan melakukan pendekatan:

1. Penyusunan struktur ibukota yang dimulai dari tingkat terbawah.
2. Pengembangan pusat-pusat yang saling berkompetitif.

3. Kebijakan infrastruktur diperlukan untuk membantu mengembangkan peran ibukota dalam melaksanakan pembangunan.

Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat ke Gerung diharapkan menciptakan suatu struktur perwilayahan yang seimbang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai perwilayahan meliputi pusat-pusat kegiatan dan sistem hierarki, serta identifikasi sektor-sektor basis dan sektor-sektor unggulan dan dikaitkan dengan hasil analisis wawancara langsung dengan narasumber, analisis manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten terhadap pengembangan wilayah, perlu diciptakan pusat pengembangan wilayah baru bagi wilayah Kabupaten Lombok Barat, selain Gerung sebagai ibukota kabupaten.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara keseluruhan, perlunya peningkatan fungsi Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan pelayaran jasa ekonomi, sebagai pendukung diharapkan lebih mampu berperan terutama pada sektor ekonomi (pasar) dan jasa untuk kawasan selatan dan tengah Kabupaten Lombok Barat, karena akses lebih dekat. Melalui pola ini pergerakan yang berorientasi ke Kota Mataram dapat diimbangi, sehingga dapat terjadi keseimbangan dan integrasi kawasan.

Pengembangan pusat baru selain Gerung dengan pengembangan hierarki ini akan menandai perubahan struktur wilayah. Tujuan akhirnya adalah terkonsolidasinya wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan Gerung sebagai ibukotanya tanpa harus melakukan pemekaran wilayah. Pusat pertumbuhan baru yang berperan sejajar dengan ibukota, diharapkan mendukung upaya menjangkau pelayanan lokal dan regional secara lebih cepat, efektif dan efisien.

Langkah yang dapat ditempuh dapat melalui proses penyediaan sarana prasarana pendukung untuk menyesuaikan perubahan, dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kota-kota tersebut sebagai pusat wilayah, dalam hal ini sistem transportasi dengan semua penunjang seperti akses-akses yang mudah dijangkau (jalan). Hal ini akan memacu produktivitas masyarakat sehingga dapat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas wilayah secara umum, khususnya terkait dengan penyediaan kebutuhan aktivitas masyarakat. Dalam hal ini peran dominan sektor pertanian dapat lebih diimbangi dengan sektor ekonomi lainnya seperti jasa dan pariwisata sehingga terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih kompleks, sebagai daya tarik dari suatu kawasan.

Langkah selanjutnya pada akhirnya akan memberikan peluang bagi kota-kota kecil di wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk lebih berkembang. Pengembangan kota-kota ini memang tidak diarahkan untuk menyaingi Kota Gerung, namun lebih diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam lingkup tertentu sesuai dengan peran masing-masing. Dalam hal ini bagaimana tidak terjadinya kesenjangan dalam pelayanan publik sehingga struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat terintegrasi. Peran Gerung sebagai ibukota dituntut mampu memberi kontribusi bagi wilayah pengaruhnya dengan peran utama pada produk jasa pemerintahan. Untuk itu Gerung harus mampu meningkatkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagaimana fungsi-fungsi ibukota lainnya di Indonesia.

Untuk wilayah yang tidak berkembang, karena keterbatasan akses dan sumberdaya baik alam maupun manusia, diarahkan untuk berorientasi menggali potensi lain yang memungkinkan dengan investasi sarana prasarana pendukung baik di kawasan tersebut atau disekitarnya yang mendukung tujuan tersebut. Dengan membagi kawasan sesuai dengan potensi di wilayahnya



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

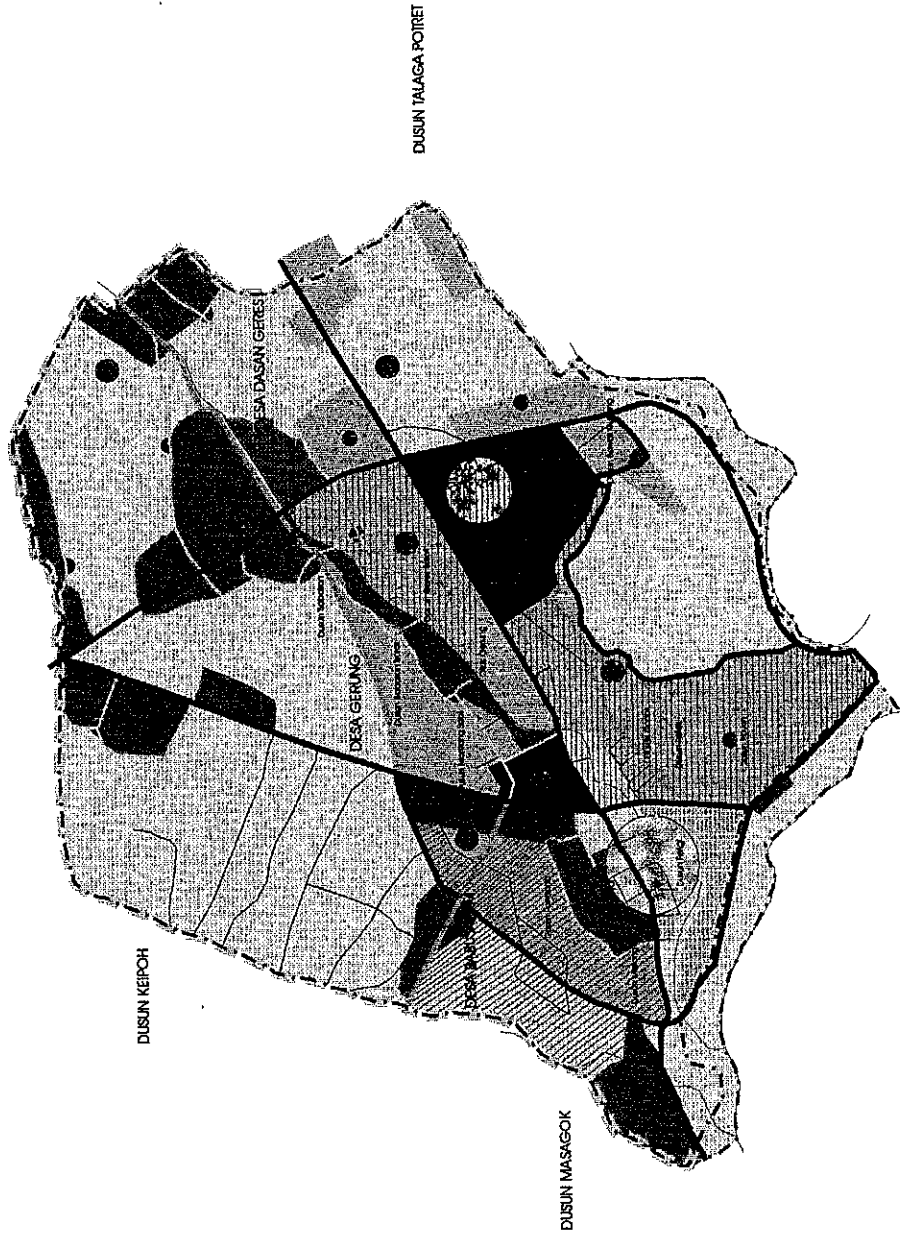
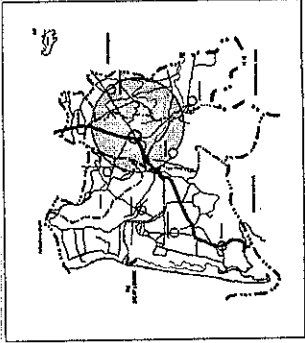
**PETA
STRUKTUR KERUANGAN KOTA GERUNG
AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA**

- - - - : Batas Kota
- : Jalan Arteri
- : Jalan Lokal
- : Sungai
- : Jalan Arteri Primer
- : Jalan Kolektor Primer
- : Jalan Lokal Primer
- : Jalan Arteri Sekunder
- : Jalan Kolektor Sekunder
- : Jalan Lokal Sekunder
- : Batas Wilayah Perencanaan
- ⊙ : Fungsi F1 (Perdagangan/Terminal)
- ⊙ : Fungsi F2 (Pemerintahan)
- : Pusat Lingkungan
- : Sub Pusat Lingkungan

SUMBER UTARA

RTRK IBUKOTA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

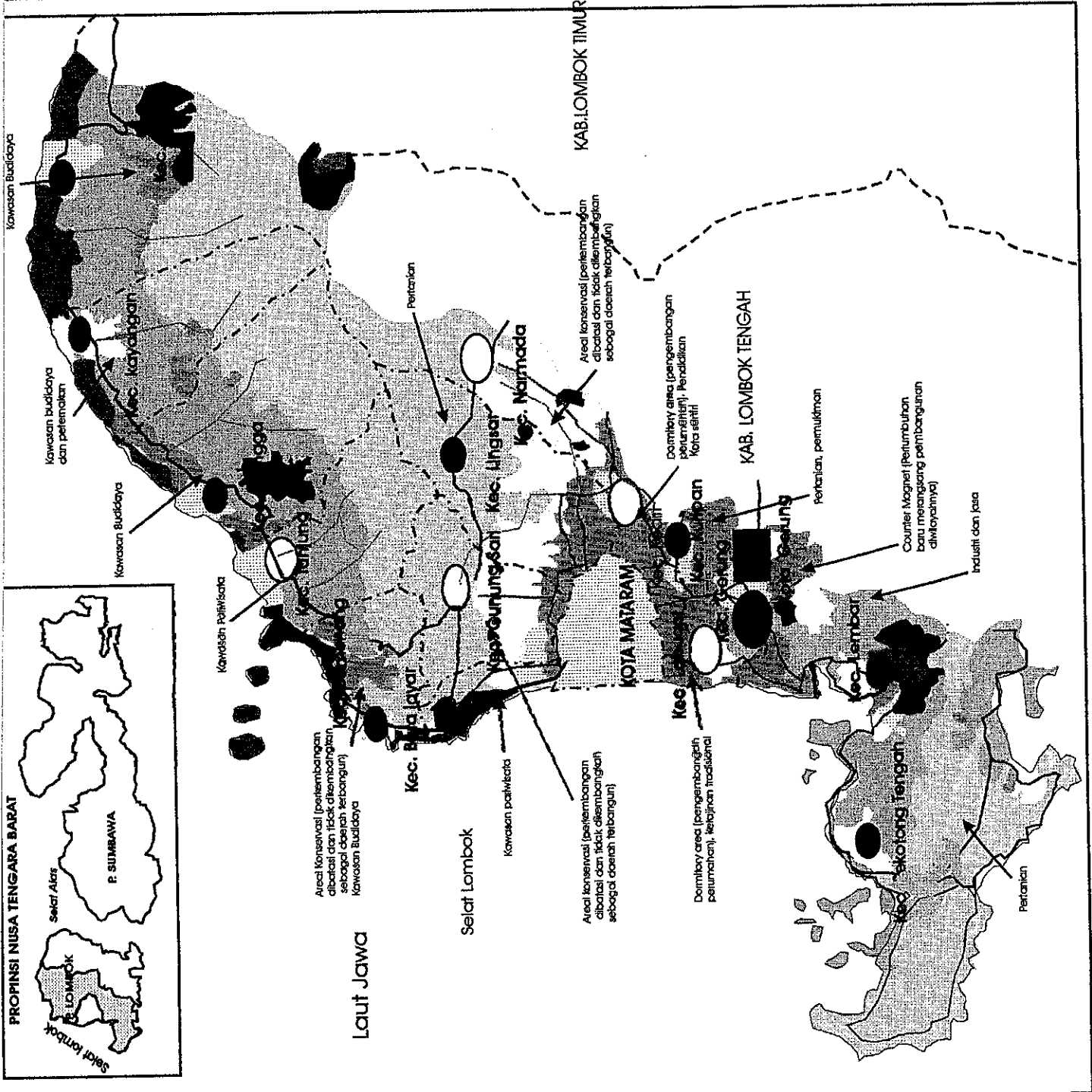
SKALA	0 1 2 3 0 0,214 0,428 0,642	Cm Km
NOMOR GAMBAR	4.4	



DUSUN KEIPOH

DUSUN MASGOK

DUSUN TALAGA POTRET



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

PETA

STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

- KETERANGAN :**
- - - : Batas Kabupaten
 - . - . : Batas Kota
 - : Jalan Kabupaten
 - : Jalan Propinsi/Negara
 - ▨ : Pertanian Ladang Kering
 - ▨ : Garis Danau/DAM
 - ▨ : Hutan Konversi
 - ▨ : Hutan Lindung
 - ▨ : Perkebunan Tanaman Tahunan
 - ▨ : Area Konservasi
 - ▨ : Kawasan Kota/Ibu Kota Kec.
 - ▨ : Zona Pelembutan
 - ▨ : Sawah Tadah Hujan
 - ▨ : Tegalan
 - ▨ : Zona taman Laut
 - ▨ : Pertanian Ladang Basah
 - ▨ : Zona Wisata
 - ▨ : Garis Pantai
 - ▨ : Hierarki I/Ibukota Kabupaten
 - : Hierarki I
 - : Hierarki II
 - : Hierarki III

SUMBER	UTARA
BAPPEDA LOMBOK BARAT	
SKALA	NOMOR GAMBAR
1 : 100.000	4.5

4.4. Analisis Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten

Dari berbagai informasi narasumber serta hasil analisis dengan menggunakan metode PHA (*Proses Hierarki Analitik*) memperlihatkan pemindahan ibukota kabupaten ke Gerung berdampak positif maupun negatif. Metode ini dipakai untuk menjawab dua sasaran penelitian antara lain menganalisa manfaat dan beban pemindahan ibukota ke Gerung dan mengidentifikasi dampak pemindahan ibukota kabupaten terhadap pengembangan wilayah.

4.4.1. Manfaat Dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten

4.4.1.1. Hasil Penilaian Alternatif Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten

Hasil penilaian diperoleh dari perhitungan nilai perbandingan berpasangan dengan skala 1-9 dari setiap kriteria utama, subkriteria dan alternatif. Nilai perbandingan ini representasi dari persepsi narasumber diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari nilai indeks konsistensinya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.11
MANFAAT DAN BEBAN SETIAP ALTERNATIF
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Alternatif	Manfaat	Beban	Perbandingan	Keterangan
Pemantapan Peran dan Fungsi Ibukota	0.268	0.245	1.003	Tidak Terpilih
Penataan Keruangan Wilayah	0.570	0.545	1.045	Terpilih
Pemukaran Daerah	0.165	0.210	0.785	Tidak terpilih

Sumber Hasil Analisis

Perbandingan antara nilai kepuasan alternatif terpilih dengan keadaan eksisting adalah manfaat dan beban sama, artinya nilai perbandingan antara manfaat dan beban sama dengan satu, dengan demikian ada tiga kemungkinan yang terjadi :

1. Nilai perbandingan >1 berarti alternatif terpilih lebih baik dibandingkan dengan keadaan sekarang
2. Nilai perbandingan <1 berarti alternatif terpilih tidak lebih baik dibandingkan keadaan sekarang
3. Nilai perbandingan $= 1$ berarti alternatif terpilih sama dengan keadaan sekarang

Dari hasil penilaian manfaat dan beban menunjukkan alternatif yang menunjukkan manfaat terbesar adalah alternatif II yaitu penataan keruangan wilayah melalui memantapkan fungsi kota-kota kedua dengan nilai manfaat 0.570 dan beban 0.545. Dari hasil penilaian perbandingan manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten juga menunjukkan bahwa alternatif ke II mempunyai nilai terbesar dengan bobot nilai 1.045. Artinya bahwa alternatif II memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan beban, sedangkan untuk alternatif I, masih memberikan manfaat yang lebih besar dari beban namun masih berada dibawah alternatif II, sedangkan alternatif III, sebaliknya beban dari pemindahan ibukota lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ini menggambarkan bahwa keadaan struktur perwilayahan saat ini kurang bisa mengakomodasi wilayah pengaruhnya sehingga ada wilayah-wilayah tertentu merasa kurang terlayani (terutama untuk wilayah utara), selain karena kurang memadainya fasilitas juga akses yang menghubungkan wilayah (sarana-prasarana transportasi). Oleh sebab itu perlu suatu struktur perwilayahan yang dapat mengatasi permasalahan/beban yang ditimbulkan akibat dari pemindahan ibukota kabupaten ke Gerung. Menjawab dari pertanyaan tersebut, dengan terpilihnya alternatif II, struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat diarahkan dengan penataan keruangan wilayah melalui memantapkan fungsi kota-kota kedua, yang dapat berperan dan berfungsi

layaknya Gerung sehingga seluruh wilayah terintegrasi dan memantapkan Gerung sebagai ibukota dengan peningkatan pelayanan dengan penambahan sarana-prasara serta akses yang dapat dengan mudah dijangkau dari seluruh wilayah pengaruhnya.

4.4.1.2. Hasil Penilaian Manfaat dan Beban dari setiap Bidang Penelitian

Untuk melengkapi hasil penelitian, dibahas mengenai manfaat dan beban alternatif pada bidang penilaian antara lain : pemerintahan., pembangunan dan kemasyarakatan. Hasil dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.12
MANFAAT DAN BEBAN SETIAP BIDANG PENELITIAN
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Bidang	Manfaat	Beban	Perbandingan
Pemerintahan	0.437	0.310	1.009
Pembangunan	0.472	0.396	1.191
Kemasyarakatan	0.091	0.294	0.309

Sumber Hasil Analisis 2004

Perkembangan suatu wilayah tentunya membawa akibat atau dampak atau pengaruh, terutama pada fungsi utama kota sebagai ibukota kabupaten. Dampak dalam hal ini adalah manfaat dan beban yang dapat diperoleh atau digunakan untuk menunjang fungsi kota sebagai ibukota kabupaten, terdiri dari tiga bidang yaitu:

1. Pemerintahan,

Hasil dari analisis manfaat pemindahan ibukota kabupaten dalam bidang pemerintahan menduduki prioritas ke dua dengan nilai akhir 0.437. Dapat dikatakan pemindahan ibukota kabupaten, berarti mengakibatkan status dan kedudukan menjadi jelas dan meningkat, yaitu sebagai ibukota kabupaten, Gerung kapasitasnya dapat mempengaruhi suatu kota secara internal dan keseluruhan wilayah administrasi dari kabupaten itu

sendiri secara eksternal, keterkaitan dengan aspek kelembagaan yang menyangkut fungsi dan peran Gerung sebagai pusat pemerintahan. Struktur kelembagaan dari pusat pemerintah daerah hingga daerah pengaruhnya harus mampu menjangkau wilayah administrasinya, ini memenyangkut manajemen pemerintahan baik dalam menyediakan sarana dan prasarana fisik ataupun sumberdaya manusia dalam hal ini para aparatur pemerintahan. Sedangkan beban pemindahan ibukota bidang pemerintahan menduduki prioritas ke dua dengan nilai akhir 0.310, dapat dikatakan beban pemindahan termasuk besar mengingat adanya suatu wilayah baru yang harus dikelola dan dibangun. Kaitannya disini dengan penyediaan fasilitas perkantoran dan sarana prasarana pendukung sehingga peran dan fungsi Gerung sebagai ibukota. Namun dari hasil perbandingan dapat dilihat bahwa manfaat yang diperoleh dari pemindahan ibukota lebih besar dibandingkan beban.

2. Pembangunan,

Dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten otomatis berdampak langsung dalam pembangunan daerah. Ini menempatkan bidang pembangunan merupakan prioritas utama, dengan hasil penilaian sebesar 0.472. Manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dapat merencanakan pembangunan dengan lebih terintegrasi sesuai dengan keadaan eksisting wilayah, untuk melaksanakan pembangunan, yang sangat dipengaruhi oleh aspek fisik keruangan dan aspek ekonomi sebagai penunjang mengakibatkan perubahan fisik keruangan wilayah baik itu Gerung yang merupakan ibukota kabupaten dan perwilayahan Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan, sehingga fungsi Gerung dapat mendorong dan mengarahkan perkembangan kota dan wilayah sekitarnya. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, manfaat yang diterima untuk memperlancar peran Gerung sebagai pusat pemerintahan

baru. Untuk beban pemindahan ibukota tampak pada bidang pembangunan dengan nilai beban sebesar 0.396. Pembangunan dimanapun merupakan suatu beban besar karena menyakut pendanaan. Terlebih lagi dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah, nilai dana yang dibutuhkan tidak sedikit, sedangkan pendapatan daerah terbatas. Hasil perbandingan manfaat dan beban diperoleh manfaat lebih besar dibandingkan beban, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur wilayahnya.

3. Kemasyarakatan.

Dalam bidang kemasyarakatan ini memberi dampak manfaat bagi perkembangan kependudukan, disamping itu karena fasilitas sosial terjadinya mobilitas penduduk masuk ke wilayah ibukota kabupaten. Terutama dalam pemberian pelayanan publik. Dalam hal ini keterkaitannya dengan aspek sosial dan kependudukan. Bidang ini menduduki prioritas terakhir, dianggap tidak mempengaruhi secara langsung, hanya menjadi akibat dari keberadaan dari bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Sedangkan untuk bidang ini menempati posisi pada beban terendah. Dengan hasil analisis sebesar 0.294. Namun disini Beban lebih besar dibandingkan manfaat, gambaran ini menunjukkan bidang kemasyarakatan merupakan beban terkecil dalam konteks pemindahan ibukota kabupaten. Hal ini dikarenakan bidang pemerintahan dan pembangunan yang menentukan sedangkan bidang kemasyarakatan ini menjadi akibat dari keberadaan bidang lainnya.

4.4.1.3. Hasil Penilaian Manfaat dan Beban pada Tingkat Kebijakan

A. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh atau digunakan untuk menunjang fungsi kota sebagai ibukota kabupaten, berdasarkan sembilan kebijakan yang dikelompokkan dalam aspek fisik keruangan, aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan, seperti terlihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.13
ALTERNATIF MANFAAT PEMINDAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEBIJAKAN	ALTERNATIF I PEMANTAPAN	ALTERNATIF II PENATAAN WILAYAH	ALTERNATIF III PEMEKARAN DAERAH
A0	0.060	0.126	0.015
A1	0.043	0.023	0.059
A2	0.026	0.067	0.018
A3	0.075	0.123	0.017
A4	0.020	0.126	0.006
A5	0.016	0.072	0.015
A6	0.012	0.039	0.018
A7	0.016	0.019	0.017
Total	0.268	0.570	0.165
Keterangan			
A0	Konsentrasi perkantoran		
A1	Peningkatan kemampuan aparatur		
A2	Efisiensi dan efektivitas tugas pengelolaan pembangunan		
A3	Pengembangan wilayah sekitarnya		
A4	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis perenc. pembangunan		
A5	Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan		
A6	Peningkatan pelayanan masyarakat		
A7	Peningkatan kemandirian ekonomi		

Sumber Hasil Analisis

Dapat dilihat dari kebijakan yang muncul, terdiri atas empat aspek dan kemudian dijabarkan menjadi kriteria temuan studi. Aspek fisik keruangan terdiri atas dua kriteria manfaat, sosial dan kependudukan terdiri atas satu kriteria, ekonomi terdiri atas dua kriteria, administrasi kelembagaan tiga kriteria. Dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek Fisik Keruangan

Manfaat pemindahan ibukota, terkait dengan kondisi fisik dasar dan keruangan. Keruangan yang dimaksud adalah pemanfaatan ruang, penataan dan hal-hal yang terkait dengan upaya pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat.

- Pengembangan kota dan wilayah sekitarnya manfaat yang diterima untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan kota dan wilayah sekitarnya, terutama pengembangan potensi ekonomi dan potensi penduduk kota dan wilayah sekitarnya. Dari hasil analisis kriteria ini menduduki prioritas tertinggi di bidang pembangunan dengan nilai 0.215 dan dibandingkan kriteria dibidang lain kriteria ini juga menduduki prioritas utama. Ini dimungkinkan sebagai pusat baru untuk pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat, pembangunan Kota Gerung sebagai tujuan utama jangka panjang yang ingin dicapai, karena pertimbangan karakteristik fisik wilayah, selama ini belum ada wilayah sebagai pusat magnet pertumbuhan, untuk itu Gerung diarahkan untuk menjadi pusat baru untuk membuka dan mengembangkan potensi wilayah.
- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, manfaat yang diterima untuk memperlancar tugas dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, terutama dikaitkan dengan penataan ruang, perbaikan kualitas lingkungan, dan pembangunan fasilitas pelayanan umum yang juga merupakan kriteria dari bidang pembangunan yang merupakan aspek dari fisik keruangan dari hasil analisis narasumber dan responden mendapatkan nilai 0.152. Pemindahan ibukota kabupaten ke Gerung merupakan salah satu bagian penataan ruang wilayah. Selain itu keterkaitannya dengan penataan sistem kota-kota dan

jangkauan pelayanan terhadap wilayah-wilayah belakang dalam menciptakan ruang yang terintegrasi bagi pengembangan wilayah

2. Aspek Sosial dan Kependudukan

- Peningkatan pelayanan masyarakat. Manfaat yang diterima masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur dan pelayanan fasilitas dan utilitas. Kreteria ini menduduki prioritas terendah dibidangnya dengan nilai 0.009. Dianggap kurang mempengaruhi, menurut narasumber dan responden karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terbentang dari utara hingga selatan Pulau Lombok tidak mempengaruhi kesenjangan wilayah bila dilakukan koordinasi secara tepat dan dengan meningkatnya status Gerung menjadi ibukota kabupaten akan membawa banyak dampak seperti mempercepat modernisasi masyarakat sehingga mampu membawa masyarakat keluar dari isolasi budaya
- Peningkatan kemandirian ekonomi. Dibidang kemasyarakatan merupakan prioritas pertama dengan nilai 0.052. Manfaat yang diterima memungkinkan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan serta pengembangan ekonomi sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Memacu peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Membuka peluang pengembangan wilayah. Selain itu keberadaan ibukota menciptakan pemasukan dari sektor perkotaan berupa pajak, retribusi, dan lainnya.

3. Aspek Ekonomi

- Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan .Dibidang pembangunan merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0.105. Dikarenakan manfaat yang diterima karena peluang bagi peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan, baik yang berasal dari dana perimbangan maupun yang berasal dari potensi

keuangan, mendorong perubahan struktur perekonomian kawasan (*aktivitas*), namun untuk jangka pendek masih belum terlihat dampaknya, ini merupakan tujuan jangka panjang dengan berkembangnya Gerung sebagai pusat pemerintahan, struktur perekonomian yang didominasi oleh aktivitas pertanian, diharapkan akan berkembang seiring perkembangan aktivitas jasa perkotaan untuk menciptakan wajah kota yang sebenarnya.

4. Aspek Administrasi Kelembagaan

- Konsentrasi perkantoran. Manfaat yang diterima karena memungkinkan pembentukan kantor pengelola dan instansi lainnya. Kepastian pusat lokasi pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Lombok Barat. Disini merupakan prioritas utama dalam bidang pemerintahan dengan nilai 0.204. Mengingat sebagai ibukota baru harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang. Untuk itu kriteria ini menjadi hal yang terpenting. Sehingga fungsi ibukota dapat berjalan secara optimal. Ketersediaan perkantoran bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatan kemampuan aparatur. Manfaat yang diterima karena terbukanya peluang bagi pengembangan kemampuan manajerial dan teknis aparatur. Diprioritaskan setelah konsentrasi perkantoran, dengan nilai 0.125. Ini berkaitan dengan sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia dalam peranannya sebagai subyek pembangunan, sehingga perlunya meningkatkan tingkat pendidikan dari masyarakat.
- Efisiensi dan efektifitas tugas pengelolaan pembangunan. Manfaat yang diterima karena akan memperlancar tugas-tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam bidang pemerintahan mendapatkan hasil sebagai

prioritas terakhir dengan nilai 0.111. Kreteria ini akan terpenuhi apabila kreteria sebelumnya juga sudah terpenuhi. Ini menjelaskan bahwa antar kreteria yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Sehingga tidak bisa diabaikan karena merupakan hasil sebab akibat dari bidang pemerintahan tersebut.

B. Beban

Dari hasil perhitungan analisis terhadap beban pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat, dari sepuluh kriteria yang dikelompokkan dalam aspek fisik keruangan, aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan, dapat dilihat hasilnya dalam tabel berikut ini :

TABEL IV.14
ALTERNATIF BEBAN PEMINDAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

KRETERIA	ALTERNATIF I PEMANTAPAN	ALTERNATIF II PENATAAN WILAYAH	ALTERNATIF II PENEKARAN DAERAH
B0	0.010	0.013	0.008
B1	0.009	0.011	0.007
B2	0.036	0.046	0.029
B3	0.034	0.078	0.030
B4	0.013	0.030	0.011
B5	0.059	0.136	0.052
B6	0.023	0.052	0.020
B7	0.016	0.037	0.014
B8	0.008	0.019	0.005
B9	0.037	0.123	0.034
Total	0.245	0.545	0.210
Keterangan			
B0	Rasio personil dengan masyarakat		
B1	Beban tugas aparat keamanan		
B2	Tingkat dukungan partisipasi masyarakat		
B3	Aparat pemerintah		
B4	Mata pencaharian		
B5	PADS		
B6	RTRW		
B7	Hubungan fungsional antar daerah-kota		
B8	Kepadatan penduduk perkotaan		
B9	Tingkat pendidikan		

Sumber Hasil Analisis

Bagian beban terdiri atas empat aspek dan kemudian dijabarkan menjadi kriteria temuan studi. Aspek fisik keruangan terdiri atas dua kriteria manfaat, sosial dan kependudukan terdiri atas dua kriteria, ekonomi terdiri atas dua kriteria, administrasi kelembagaan terdiri atas dua kriteria

1. Aspek Fisik Keruangan

- Hubungan fungsional antar daerah-kota. Beban keuangan akibat struktur ekonomi memberi dampak pada perkembangan wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar pembangunan Kota Gerung. Pembangunan sarana prasarana khususnya transportasi sangat dibutuhkan saat ini. Tingginya pengadaan sarana prasarana ini merupakan beban bagi pemerintah daerah. Dari hasil analisis dalam bidang kemasyarakatan kriteria ini menempati urutan ke dua dengan nilai sebesar 0.067. Ini berhubungan dengan kemudahan untuk mencapai ibukota kabupaten dalam menyelesaikan kegiatan baik dalam sektor formal maupun non formal. Namun biaya pembangunan fisik sangatlah besar, mengingat keberadaan dari Gerung hal ini haruslah diperoleh jalan keluarnya.
- RTRW. Beban keterbatasan lahan dimasa datang mengakibatkan harga lahan tinggi. Beban bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan yang matang dan akurat yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi wilayah eksisting. Produk perencanaan ini harus menjadi pegangan pemerintah dalam melakukan pembangunan sehingga tercipta suatu perencanaan yang terintegrasi. Kriteria beban ini menunjukkan prioritas yang penting dengan nilai sebesar 0.094. Dengan adanya perubahan struktur perwilayahan, mengakibatkan perubahan peruntukan lahan, sehingga nilai lahan akan dipengaruhi, dalam perencanaan wilayah ini pula yang mempengaruhi struktur perwilayahan, contohnya harga tanah semula tidak terlalu tinggi di Gerung dengan

perubahan fungsi tersebut menyebabkan nilai tanah di wilayah Gerung menjadi tinggi.

2. Aspek Sosial dan Kependudukan

- Kepadatan penduduk perkotaan. Beban yang ditanggung tenaga kerja ahli mencari kerja diluar daerah, akibat kesempatan kerja yang ada sedikit. Ini dikaitkan dengan aktivitas ekonomi yang berbasis pertanian, sehingga untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja kurang memadai. Semakin meningkatnya status suatu wilayah kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat, berkaitan dengan dominasi sektor pertanian masih besar, mengakibatkan dalam jangka pendek ketersediaan lapangan pekerjaan masih sempit sedangkan mobilitas dan jumlah penduduk setiap tahun semakin meningkat. Ini beban buat pemerintah daerah untuk merubah dominasi sektor pertanian dengan menciptakan bentuk-bentuk lapangan pekerjaan baru. Namun kreteria ini di bidang kemasyarakatan menunjukan hasil terendah sebesar 0.032. Mengingat wilayah Kabupaten Lombok Barat masih memiliki potensi-potensi dibidang lain.
- Tingkat pendidikan. Beban yang ditanggung, rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung. Ini beban terberat dalam bidang pemerintahan sebesar 0.195, mengingat dari tingkat pendidikan masyarakatnya yang masuiah berpendidikan rendah. Untuk itu didalam bidang kemasyarakatan merupakan prioritas pertama yang harus dipertimbangkan untuk menunjang pembangunan daerah.

3. Aspek Ekonomi

- Mata pencaharian. Beban akibat meningkatnya jumlah penduduk sehingga membawa tekanan terhadap lapangan kerja dan fasilitas dan utilitas kota. Jenis mata

pencapaian yang terbatas sedangkan jumlah penduduk meningkat, menempatkan kriteria ini berada didalam bidang pembangunan, karena pembangunan daerah dipengaruhi oleh sektor ekonomi wilayah, dari hasil analisis tidak menempatkan sebagai prioritas utama, karena hal ini masih bisa diciptakan dengan adanya potensi dari wilayah, sehingga hasil dari penilaian terhadap responden dan narasumber sebesar 0.054

- PAD. Beban yang diakibatkan perubahan dan penataan kembali wilayah sehingga membawa konsekuensi terhadap pembiayaan pembangunan. Kriteria ini merupakan kriteria tertinggi dalam beban pemindahan ibukota kabupaten dibidang pembangunan dan bidang lainnya. Merupakan kriteria dengan prioritas utama dengan nilai 0.243. Pembangunan merupakan dasar dari terbentuknya suatu kota ataupun wilayah. Untuk itu perlu dana yang tidak sedikit. Pendapatan Anggaran Daerah tidak mampu untuk menutupi biaya pembangunan

4. Aspek Administrasi Kelembagaan

- Penyiapan aparatur pengelola pembangunan. Rasio personil dengan masyarakat. Beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan biaya, sulit membentuk tenaga tetap. Beban pemindahan sebesar 0.031 merupakan beban prioritas terkecil di dalam bidang pemerintahan. Mengingat dengan pemindahan ibukota kabupaten, dapat merekrut aparatur pengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah.
- Beban tugas aparat keamanan. Beban kerja yang meningkat sebagai konsekuensi ibukota baru, akibat struktur wilayah. Namun menurut hasil analisis tidak terlalu mempengaruhi dibandingkan kriteria yang lain dengan nilai 0.026, sekalipun ada sebagian masyarakat terutama dibagian utara merasa adanya ketidak seimbangan

pembangunan. Dilihat dari letak geografis wilayah sehingga hal ini juga termasuk beban bagi pemerintah daerah bagaimana cara merangkul semua wilayah administrasinya sehingga masyarakat merasa aman, tenang dan damai dalam melaksanakan aktivitas yang menunjang pembangunan itu sendiri.

- **Tingkat dukungan partisipasi masyarakat.** Beban akibat pemindahan struktur organisasi dan tata laksana sehingga memerlukan penataan kembali perangkat kelembagaan yang ada secara keseluruhan, merupakan salah satu prioritas yang penting, ini dapat dilihat dari perolehan nilai sebesar 0.111. Sebagai dampak dari pemindahan, pemerintah daerah harus bebenah diri. Ini beban berat bagi pemerintah daerah. Untuk itu agar tujuan dari pembangunan tercapai, harus ada dukungan dari masyarakatnya sendiri. Terlebih lagi disini dukungan masyarakat yang berdomisili di wilayah bagian utara. Untuk itu pemerintah harus berpikir keras dan harus mampu menunjang ketersediaan fasilitas yang terbatas dengan peningkatan jumlah dan jenis fasilitas baik sarana dan prasarana di daerah yang masih terbatas. Ini beban bagi pemerintah sehubungan dengan pendanaan.
- **Aparat pemerintah.** Beban kesadaran politik masyarakat berbeda, pembentukan kader susah. Di dalam suatu pemerintahan peran politik masih berpengaruh, dilihat dari hasil analisis dengan angka 0.147, ini menunjukkan prioritas dari kriteria ini yang tertinggi. Dan ini merupakan beban besar bagi pemerintahan daerah. Seperti halnya pencampatan lokasi ibukota kabupaten sarat dengan pengaruh politik di daerah.

4.4.2. Perbandingan Alternatif Terpilih dengan Kondisi Eksisting

Berdasarkan hasil pembahasan terlihat alternatif terpilih adalah penataan ruang wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua. Hal ini secara realita struktur

perwilayahan Kabupaten Lombok Barat yang memiliki struktur perwilayahan memanjang dari utara ke selatan, dengan posisi ibukota kabupaten agak ke selatan, untuk menghindari terjadinya gap antarkecamatan, untuk itu perlu meningkatkan peran kota-kota kedua yang berada baik dibagian utara dan tengah, yang dapat berperan layaknya Gerung sebagai ibukota, untuk menjadi perpanjangan dari ibukota dalam memberikan pelayanan terhadap wilayah pengaruhnya.

Dari analisis manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten dapat ditarik kesimpulan kriteria yang mempengaruhi teridentifikasi dapat dilihat dalam tabel IV.15. Kriteria ini merupakan kecendrungan manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten terhadap struktur perwilayahan.

TABEL IV.15
KRITERIA MANFAAT DAN BEBAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT

MANFAAT	Bobot Prioritas	BEBAN	Bobot Prioritas
Konsentrasi perkantoran	0.204	Rasio personil dengan masyarakat	0.031
Peningkatan kemampuan aparat	0.125	Beban tugas aparat keamanan	0.026
Efisiensi dan efektivitas tugas pengelolaan pembangunan	0.111	Tingkat dukungan partisipasi masyarakat	0.111
Pengembangan wilayah sekitarnya	0.215	Aparat pemerintah	0.142
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis perenc. pembangunan	0.152	Mata pencaharian	0.054
Lanjutan Tabel IV.17			
Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan	0.105	PAD	0.248
Peningkatan pelayanan masyarakat	0.039	RTRW	0.094
Peningkatan kemandirian ekonomi	0.052	Hubungan fungsional antar daeah-kota	0.067
		Kepadatan penduduk perkotaan	0.032
		Tingkat pendidikan	0.135
Jumlah	1.000	Jumlah	1.000

Sumber Hasil Analisis

Manfaat yang diperoleh menunjukkan lebih diarahkan untuk lebih mengembangkan potensi wilayah bagian utara (khususnya) dan selatan Kabupaten Lombok Barat dengan penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua. Ini merupakan suatu indikasi dari potensi wilayah yang cukup besar, belum dikembangkan.

Beban yang paling berat akibat dari pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat adalah dalam investasi dan pembiayaan pembangunan. Membaca dari dampak pemindahan ini, pemindahan ibukota kabupaten merupakan suatu upaya kebijakan dari Pemda Kabupaten Lombok Barat yang cukup strategis walaupun menjadi beban dari Pemda Kabupaten Lombok Barat sendiri. Untuk jangka pendek, pemindahan ibukota kabupaten ini merupakan beban, dalam hal ini investasi dan pengadaan sarana prasarana. Namun dilihat dalam jangka panjang, pemindahan ini memberi dampak manfaat dibandingkan beban, mengingat dengan adanya pemindahan menciptakan iklim yang kondusif tercapainya pemerataan pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Barat

4.4.3. Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat dengan Alternatif Terpilih (PHA)

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka pengelompokan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lombok Barat menurut fungsinya. Karakteristik kegiatan dari masing-masing fungsi kota tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Kawasan perkotaan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan regional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya. Dalam hal ini yang termasuk adalah Kecamatan Lembar dengan Pelabuhan Lembarnya

sebagai pintu gerbang, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Kediri sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Tengah , sebagai wilayah transit dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur serta dari wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa yang memiliki kepentingan baik ke wilayah Lombok Barat ataupun Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan

2. Pusat pengolahan dan atau pengumpul barang untuk beberapa kecamatan baik yang tetap berorientasi kepada pertanian maupun kepada nonpertanian. Dalam kreteria ini hampir semua kecamatan memiliki, Kecamatan Lembar sebagai pusat perdagangan dan industri untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, terutama untuk wilayah Kecamatan : Sekotong Tengah, Gerung, Labuapi, Kediri dan Kuripan. Kecamatan Narmada sebagai pusat perdagangan wilayah tengah, terutama untuk wilayah Kecamatan : Gunungsari, Lingsar dan Kediri dan Tanjung untuk wilayah selatan, untuk wilayah Kecamatan : Batulayar, Pemenang, Gangga , Kayangan dan Bayan
3. Simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan, dan pusat jasa-jasa publik yang lainnya untuk melayani kegiatan internasional, nasional dan kabupaten serta untuk beberapa kecamatan. Disini Peran Gerung sebagai ibukota kabupaten terhadap wilayah pengaruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat diarahkan terdiri dari satu Wilayah Pembangunan (WP) yang didukung oleh beberapa Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Masing-masing Sub WP didukung oleh beberapa Satuan Kawasan Pembangunan (SKP). Arahkan struktur ini diambil berdasarkan :

1. Kesamaan karateristik wilayah, jangkauan pelayanan, jarak serta interaksi keruangan, terbagi tiga sub wilayah pembangunan yaitu sub wilayah pembangunan : utara, tengah dan selatan.

2. Kesamaan potensi wilayah, sektor basis dan pergerakan perekonomian wilayah. Hal ini yang dikembangkan adalah industri yang mengolah produk pertanian wilayah belakang.
3. Hasil *proses hierarki analitik*, persepsi dari narasumber, baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat dan merasakan langsung dengan adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat, dimana terpilih adalah alternatif II, yaitu penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi-fungsi kota kedua. Seperti telah dibahas, karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat memanjang dari utara ke selatan dan ibukota berada di bagian selatan, mengakibatkan wilayah utara merasa adanya kesenjangan akibat pemindahan tersebut. Untuk itu perlunya suatu persamaan persepsi dalam arahan struktur perwilayahan sehingga akan tercapai kesepakatan bersama dimana semua pihak terakomodasi kebutuhannya, gap yang terjadi dapat dihindari.
4. Hasil analisis hierarki dan jangkauan pelayanan, terbagi atas tiga kelas dengan masing-masing rentang kendali/jangkauan pelayanan. Yang mana dikatakan hierarki I, Kota Gerung, Hierarki II, dipilih dari wilayah yang memiliki karakter yang dapat berperan seperti halnya Kota Gerung dengan fasilitas wilayah yang ada mampu mengantisipasi kesenjangan wilayah akibat dari karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Kecamatan Tanjung untuk sub wilayah pembangunan utara meliputi satuan kawasan pembangunan yaitu Kecamatan : Pemenang, Gangga, kayangan dan Bayan, Kecamatan Narmada untuk sub wilayah pembangunan tengah meliputi satuan kawasan pembangunan yaitu Kecamatan : Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Kediri dan Kuripan dan Kota Gerung sendiri untuk sub wilayah pembangunan

selatan meliputi satuan kawasan pembangunan yaitu Kecamatan : Labuapi, Lembar dan Sekotong Tengah dan juga sebagai pusat wilayah pembangunan.

Pada dasarnya konsep arahan ini mempergunakan pertimbangan-pertimbangan dasar sebagai berikut: kebijakan yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Kaitannya dalam hal ini laju pertumbuhan tidak merata diseluruh wilayah pengaruh kabupaten, dan ketersediaan lapangan pekerjaan berdasarkan potensi wilayah, homogen. Untuk hal tersebut perlu menciptakan struktur perekonomian wilayah dari potensi yang ada untuk saling terintegrasi satu dengan yang lain. Kebijakan yang cenderung kepada penataan komposisi sektoral tenaga kerja (titik berat pada keseimbangan antara industri dan pertanian). Kebijakan yang memberi dampak langsung pada langkah desentralisasi.

Faktor-faktor tersebut merupakan dasar dari kajian dalam pembagian fungsi wilayah pengembangan dan juga didasarkan pada sistem hierarki, aksesibilitas dan interkoneksi. Untuk lebih menjelaskan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pusat Wilayah Pembangunan (Pusat WPP)

Pusat Wilayah Pembangunan atau Satuan Wilayah Pengembangan Inti berpusat di Kota Gerung, sifatnya homogen dan strategis serta dipisahkan dengan fungsi yang diemban sebagai berikut :

- Kawasan pusat pelayanan administrasi (*civic center*)
- Kawasan pusat pelayanan jasa dan perdagangan
- Kawasan pusat pelayanan jasa dan pergudangan

b. Pusat Sub Wilayah Pembangunan (Pusat Sub WPP)

Sub Wilayah Pembangunan dapat difungsikan sebagai kawasan penyangga pertumbuhan pusat WPP, yang meliputi :

- Sub WPP Utara yang berpusat di Kecamatan Tanjung
Terdiri dari Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung
Diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai berikut : pengembangan pariwisata, pengembangan perkebunan, pengembangan konversi alam
- Sub WPP Tengah yang berpusat di Kecamatan Narmada
Terdiri dari Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Labuapi
Diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai berikut : pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan pariwisata, pelayanan jasa, pengembangan perternakan
- Sub WPP Selatan yang berpusat di Kota Gerung
Terdiri dari Kecamatan Sckotong, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung
Diarahkan untuk mengemban fungsi, sebagai berikut : pengemban jasa distribusi, industri kecil, konversi alam

Kecamatan ini terpilih disebabkan memiliki potensi yang tinggi untuk melayani dua kepentingan yaitu: dalam integrasi wilayah regional dan wilayah belakang-nya. Perumusan arahan ini dilakukan dalam jangka pendek dan menengah. Munculnya pusat pengembangan baru akan memainkan peran penting dalam penentuan strategi. Pusat pengembangan baru yang paling mungkin kecamatan-kecamatan hierarki II yang dalam kenyataanya telah berkembang dengan pesat dan mampu menjadi pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya. Dengan demikian diharapkan kesenjangan wilayah semakin kecil, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan antarwilayah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Karakteristik Kabupaten Lombok Barat secara sosio-geografis terbagi dalam dua bagian kawasan berbeda yaitu kawasan bagian utara dan kawasan bagian selatan secara membujur. Melalui pemindahan ibukota dari lokasi yang relatif sentral ke kawasan bagian selatan mempunyai dampak terhadap upaya mengelola rentang kendali struktur perwilayahan. Pemindahan ke bagian selatan berarti mengubah konstelasi yang relatif berimbang selama ini dengan peran Mataram yang berada di tengah-tengah kedua bagian kawasan ini. Dampak yang timbul atas pemindahan tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut:

(1) Perkembangan Struktur Perwilayahan Lombok Barat

Struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat mengalami perubahan yang semula terdiri dari sembilan kecamatan dan Kota Mataram sebagai ibukota kabupaten, menjadi limabelas kecamatan dan Kota Gerung sebagai ibukota kabupaten. Hal ini mengakibatkan meningkatnya hierarki dari kecamatan-kecamatan, seperti pada hierarki I yaitu Kecamatan Gerung, dimana peran/fungsi Gerung sebagai pusat pemerintahan.

Identifikasi interaksi paling aktif, kecamatan-kecamatan tersebut menjadi pusat pertumbuhan, seperti kecamatan-kecamatan dibagian tengah (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan), dipengaruhi jarak yang relatif dekat dengan Kota Gerung sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram sebagai ibukota lama dan ibukota provinsi. Ini dipengaruhi oleh jarak dan jumlah penduduk.

(2) Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Fenomena yang ada dalam struktur perekonomian wilayah adalah sektor basis pertanian yang mendominasi, mengingat adanya pemekaran kecamatan yang berdampak munculnya lokasi baru yang berimplikasi pada munculnya sektor basis baru pada wilayah. Kemungkinan kearah depannya struktur dan pergerakan perekonomian Kabupaten Lombok Barat akan bergeser hal ini didukung dengan munculnya kawasan-kawasan yang potensial dalam penambahan investasi daerah, seperti kawasan industri (Kecamatan : Gunungsari, Labuapi, Narmada, Kediri, Gerung dan Lembar) dan kawasan pariwisata (Kecamatan : Tanjung dengan tiga gilinya : Trawangan, Meno dan Air, Pemenang dengan Kawasan Senggigi, Batulayarnya dengan Kawasan Batubolong, Narmada dengan Taman Narmada dan Surandi, dan Sekotong Tengah dengan wisata pantai dan gilinya : Bangko-banko). Analisis mengenai struktur dan perkembangan wilayah ini pada dasarnya berusaha untuk menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya peringkat kecamatan, kemampuan pelayanan kota, serta bagaimana pola perkembangannya.

Sedangkan analisis sektor unggulan mengenali sektor basis, bagaimana pola pergeseran, serta pertumbuhan yang terjadi. Dari hasil kajian peringkat kota tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai indikator karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat. Terlihat bahwa sebagian besar kecamatan-kecamatan yang potensial untuk berkembang berada pada kota-kota kecamatan yang berada pada posisi wilayah dibagian tengah.

(3) Dampak Keberadaan Ibukota Gerung Terhadap Perkembangan Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Keberadaan Gerung yang berubah status dan meningkatkan jenjang hierarki kota menyebabkan peluang terjadinya perubahan hierarki bagi kota-kota lainnya sekaligus meningkatkan peran kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu memberikan pelayanan pada wilayah sekitarnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat pemindahan ibukota belum berjalan secara maksimal, perlunya pemantapan Gerung sebagai ibukota, sehingga peran dan fungsi Gerung belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu perlu strategi yang dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Namun dengan adanya kebijakan otonomi daerah memberi kesempatan pada daerah untuk membangun wilayahnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan kemampuan/ potensi-potensi yang dimiliki lebih dipengaruhi unsur kota, hingga mempermudah dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan

(4) Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten

Untuk jangka pendek, pemindahan ibukota kabupaten ini merupakan beban, dalam hal ini investasi dan pengadaan sarana prasarana. Namun dilihat dalam jangka panjang, pemindahan ini memberi dampak manfaat dibandingkan beban, mengingat dengan adanya pemindahan menciptakan iklim yang kondusif tercapainya pemerataan pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan karakteristik wilayah, kesamaan potensi, hasil analisis wilayah diarahkan penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua yang berpusat di Gerung didukung oleh beberapa Sub-Wilayah Pembangunan: (a) Tanjung untuk

kawasan bagian utara, (b) Narmada untuk kawasan bagian tengah dan (c) Gerung untuk kawasan bagian selatan. Masing-masing Sub-Wilayah Pembangunan didukung oleh beberapa Satuan Kawasan Pembangunan untuk pemantapan wilayah sehingga tidak terjadi penumpukan konsentrasi di ibukota baru yang berdampak pada kesenjangan antarkawasan, mengingat karakteristik sosio-geografis Lombok Barat yang berbeda antara kawasan bagian utara dan kawasan bagian selatan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diajukan sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka meminimalkan beban dan memaksimalkan manfaat, adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pembangunan Kota Gerung sebagai ibukota dan memindahkan aktivitas pemerintahan yang masih berada dalam wilayah Kota Mataram sehingga Gerung dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengembangan Gerung didasarkan atas dukungan kondisi internal yang dimiliki dan arah kecenderungan perkembangan wilayahnya. Percepatan pembangunan Gerung dilakukan dengan memberikan alokasi pembiayaan pada prasarana penunjang internal kota dan akses yang terkait.
2. Pengembangan kecamatan-kecamatan yang telah menjadi pusat wilayah pembangunan strategis di Kabupaten Lombok Barat dengan upaya penggalian potensi daerah dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pemakaian sumberdaya baik alam, manusia maupun modal sehingga dapat berperan sebagai pusat pengembangan kedua yang memantapkan wilayah melalui: (1) perbaikan area pertumbuhan baru yang lepas dari pusat pertumbuhan utama, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat; (2) pengembangan sistem koridor, yaitu pertumbuhan di sepanjang alur jaringan jalan

utama yang keluar secara radial dari pusat-pusat kota. Pengembangan kecamatan dapat dilakukan dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan seperti jalan khususnya, terutama untuk mempermudah akses ke kawasan bagian utara dan selatan. sehingga wilayah tersebut tidak mengalami kesenjangan pembangunan. Selain itu fasilitas pendukung lainnya, yang berkaitan dengan pelayanan publik berupa penguatan kelembagaan keruangan berdasarkan aspirasi peran serta masyarakat sesuai dengan pembangunan desentralisasi/ otonomi daerah yang diatur dalam UU No 22/1999, sehingga masing-masing kawasan di Kabupaten Lombok Barat dapat mengoptimalkan pelayanan kebutuhannya sendiri sesuai dengan keinginan dan cita-cita masyarakat. Hal ini dapat mengurangi tingkat ketergantungan masing-masing kawasan tersebut.

3. Dalam bagian ini akan memberikan rekomendasi yang berisikan alokasi program aktivitas beserta aplikasinya terhadap fungsi kota yang berbeda.
 - a. Memperkuat akses jalan yang menghubungkan antara kota pusat dengan wilayah belakangnya. Ini dimaksudkan untuk mempermudah arus manusia dan barang produk dari wilayah belakang ke kota pusat sebaliknya. Terutama untuk wilayah bagian utara, dimana akses dari Bayan untuk ke pusat pemerintahan dan ke wilayah-wilayah lain hanya ada satu akses, melalui jalur sepanjang pantai utara. Sedangkan untuk jalur tengah melalui Kecamatan Tanjung melewati Kecamatan Gunungsari dan ke Kota Mataram, untuk langsung ke bagian tengah, sebaiknya ada akses yang menghubungi Kecamatan Bayan langsung ke Kecamatan Narmada, seperti jalan lingkar/ateri, mengingat adanya kawasan Gunung Rinjani dan Air Terjun Sendanggila di Kecamatan Kayangan, sehingga bisa diakses sebagai

kawasan wisata, memungkinkan jalur ini akan terjadi pergerakan struktur ruang ataupun struktur perekonomian kearah depannya.

- b. Meningkatkan pelayanan kota pusat terhadap wilayah belakang, dengan demikian kebutuhan dari wilayah belakang cukup didapatkan dari kota pusat ini, kebutuhan ini berupa kebutuhan pasar dan fasilitas lingkungan. Untuk itu perlu pemantapan Gerung sebagai ibukota kabupaten dimana peran dan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan bagi wilayah pengaruhnya. Dalam hal ini sehubungan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Lombok Barat yang memanjang dari utara ke selatan sehingga semua kebutuhan dari wilayah pengaruhnya terakomodasi. Pada hakekatnya tujuan utama disini adalah untuk menarik investasi guna menciptakan efisiensi komunikasi internal sehingga akan memperkuat integrasi wilayah. Konsep perbaikan struktur internal ini dapat dilakukan dengan dua alternatif, di mana keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.: memperbaiki area tumbuh baru yang lepas dari pusat pertumbuhan utama, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat. Untuk itu perlu ada pusat pengembangan baru yang dapat berpungsi dan berperan seperti halnya ibukota kabupaten sebagai perwakilan, tujuannya disini untuk bisa lebih dekat dan menjangkau wilayah pengaruhnya dan pengembangan sistem koridor, yaitu pertumbuhan di sepanjang alur jaringan jalan utama yang keluar secara radial dari pusat-pusat kota, pertumbuhan yang terjadi disini tinggi. Membangkitkan pergerakan baik dari ibukota kabupaten ke wilayah pengaruhnya atau sebaliknya.
4. Pembentukan wilayah pembangunan strategis untuk memudahkan pengakomodasian pelayanan dan kegiatan masing-masing daerah. Di Kabupaten Lombok Barat dapat dibentuk tiga kelompok wilayah pembangunan strategis yaitu :

- a. WP Utara (Kecamatan Bayan, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Kayangan Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Tanjung) dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Tanjung;
- b. WP Selatan (Kecamatan Gerung, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong Tengah) dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Gerung.
- c. WP Tengah (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan) dengan pusat pertumbuhan di Narmada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bintarto, 1987. *Pola Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Branch, Melville, 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta. UGM Press.
- Catanese. J. Anthony and Snyder, James C. (ed), 1989. *Perencanaan Kota*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Chapin, F. S and J Kaiser, 1979. *Urban Land Use Planning*. Chicago . University Chicago Press
- Daldjoeni, 1987. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung. Penerbit Alumi
- Davey, K.J, 1988; *Pembiayaan Pemerintah Daerah- Pratek-Pratek Internasional dan Relevansinya bagi dunia ke tiga*, terjemahan oleh Amanullah dkk, UI. Jakarta
- Dayan, Anto, 1981. *Pengantar Metode Statistik I*. LP3ES. Jakarta
- Departemen Dalam Negeri, 1985. *Tugas, fungsi dan Peranan Pemerintahan Di Daerah*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta
- Eisner, Simon, et al, 1993. *The Urban Pattern*. New York : Sixth Edition, Van Nostrand Reinhold
- Firman, Tommy, 1997, *Urbanisasi, Persebaran Penduduk dan Tata Ruang di Indonesia*, dalam Budhy Tjahjati Soegijoko (ed) *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Grasindo, Jakarta

- Friedmann, John, 1966. *Regional Development Policy, a Case Study of Venezuela*. The MIT Press
- Glasson, John, 1974. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan : Paul Sitohang. LP3ES. UI. Jakarta
- Jayadinata, JT. 1999. *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung. Penerbit ITB
- John, James H, 1976. *Urban Geography an Introductory Analysis*. Second Edition. Pergamon Press
- Koesoemahatmadja, R.D.H, 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bina Cipta Jakarta
- Massam, Bryan, 1975. *Location and Space in Social Administration*. Edward Arnold Publisher Ltd. London
- Mc. Gee, T.G., 1994. *Labour Force Change and Mobility Indonesia the Extended Metropolitan Region Indonesia* dalam Fuchs, Roland J. et al (ed) *Mega City Growth and the Future*, United Nation University Press, Tokyo
- Pamudji S, MPA,Drs, 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, PT. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Richardson, Harry W, 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan : Paul Sitohang. LP3ES. UI. Jakarta
- Rondinelli, Dennis A and Kenneth Ruddle, 1978. *Urbanization and Rural Development*, Preager Publishers, New York.

- Rondinelli, Dennis A and Kenneth Ruddle, 1985. *Applied Methods of regional Analisis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. New York. Westviews Press
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks*, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Saragih JPN. Drs dan Sitorus S. *Mekanisme Pemerintahan di Daerah beserta Peraturan Pelaksanaanya*. PT. Twins. Jakarta
- Singarimbun, M & Effendi S, 1989. *Metodologi dan Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Sitohang, Paul, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, terjemahan dari Glasson, John, Regional Planning, FE UI
- Sujarto, Djoko. 2000. *Catatan Kuliah PL 203 Pengantar Planologi*. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Penerbit ITB.
- Sukirno, Sadono, 1980. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. LP3ES. UI. Jakarta.
- Soemendar R. Drs dan Sitorus S, 1985. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Karya Aksara, Semarang.
- Soemarwoto, Oto. 1988. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Bandung*. Djambatan
- The Liang Gie, 1968. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta
- Warpani, Suwardjoko, 1980. *Analisa Kota dan Daerah*. ITB. Bandung
- William G. Cochran, 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. Terjemahan; Rudiansyah. Universitas Indonesia. Jakarta

Yunus, Hadi Sabari, 1978. *Konsep Perkembangann dan Pengembangan Daerah Perkotaan*, Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM.

_____, 1982. *Pengarahan Pemahaman Pengertian Kota*, Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM.

_____, 1984. *Beberapa Determinan Perkembangan Pemukiman Kota (Dampak dan Pengelolaannya)*. Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM

_____, 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta. PT. Pustaka Pelajar

Majalah dan Terbitan Berkala :

Firman, Tommy, 1995. *Pengembangan dari Pusat Pertumbuhan ke Pembangunan Lokal*. Kompas

Hendarto, Mulyo. 1997. *Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota*. Makalah pada Diskusi Rutin Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang

Hilhorst, Jos G.M. 1990. *Industrialization and Local/Regional Development Revisited* Development and Change, Vol 29, pp.1-26

Sujarto Djoko, 2000. *Pengembangan Kota Kecil dan Menengah di Indonesia, dalam Prosiding Seminar Sehari Perananan Kota Menengah dan Kota Kecil dalam Pembangunan Daerah*, Program Studi Planologi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Widyaningsih NS. 2001. *Relevansi Preferensi Penduduk terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota*. Jurnal Planit, Jurusan Planologi. Institut Teknologi Nasional Malang. Nomor 2- Juli-Agustus-2001

Undang-Undang

UU Dasar Republik Indonesia 1945.

UU No 18 tahun 1965. UU tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

UU No 5 tahun 1974, tentang : “ Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”. Pasal 1 ayat (e), (g), pasal 3, 74,76 dan 80.

UU No 24 tahun 1992. tentang “Penataan Ruang”

UU No 22 tentang : “Pemerintahan Daerah”.1999. CV Eko Jaya. Jakarta

Peraturan dan Penerbitan Terbatas

Departemen Dalam Negeri. 1985 *Tugas, fungsi dan Peranannya Dalam Pemerintahan di Daerah*, Depdagri, Jakarta

Direktorat tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pu.1992. *Studi Tipologi Kabupaten*. Laporan Akhir. Penerbit : PSDAL_LP UNHAS

Direktorat Jenderal Cipta Karya berkerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. 1997. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta

Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang : “Garis-garis Besar Haluan Negara”

Peraturan Pemerintah Nomer 45 tahun 1992 tentang: “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah bTingkat II”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah”

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah. 2000. CV Eko Jaya. Jakarta

Buku Data/Laporan

Data series Hasil Pembangunan kabupaten Lombok Barat 2001. Bappeda kabupaten Lombok Barat

Kecamatan Gerung dalam Angka 1996. BPPS dan Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat dalam Angka 2001. BPPS dan Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Mataram dalam Angka 1998. BPPS dan Bappeda Kodya Mataram.

Rencana Tata Ruang Kecamatan Gerung, 1992. Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Rencana Umum tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, 1992. Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Bahan-bahan yan Tidak diterbitkan

Hendarto, R.M. 2001. *Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota.* Bahan Kuliah. Semarang : MTPK Universitas Diponegoro

Neonufa, Suliha.1999. *Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang.* Tugas Akhir Tidak Di Terbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

Warpani, Suwardjoko,1982. *Draft Sementara, Pedoman Pemindahan Ibukota Kabupaten.* Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan. Departemen Dalam Negeri. Jakarta